



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020

Representasi Manajemen

1.	Laporan Realisasi Anggaran.....	i
2.	Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih	iv
3.	Neraca	v
4.	Laporan Operasional	vii
5.	Laporan Arus Kas.....	ix
6.	Laporan Perubahan Ekuitas.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
	2.1. Ekonomi Makro	5
	2.2. Kebijakan Keuangan	11
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	18
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	20
	3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	20
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	21
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	48
	4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	48
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	49
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	50
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	56
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	61
	5.1. Rincian dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	61
	5.2. Rincian dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	90
	5.3. Rincian dan Penjelasan Pos – Pos Neraca	91
	5.4. Rincian dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional.....	141
	5.5. Rincian dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas	161
	5.6. Rincian dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	166
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN..	169
BAB VII	PENUTUP	170

DAFTAR TABEL

2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat.....	6
2.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	6
2.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	6
2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat	7
2.5	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama.....	7
2.6	Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat.....	8
2.7	Indeks Pembangunan Manusia.....	9
2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat	9
2.9	Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat	10
2.10	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	11
3.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin BaratAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.....	20
5.1	Rincian Pajak Daerah.....	62
5.2	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah.....	63
5.3	Rincian Lain-lain PAD yang Sah.....	65
5.4	Rincian Pendapatan Transfer	67
5.5	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak.....	68
5.6	Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	68
5.7	Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah	70
5.8	Rincian Belanja Daerah.....	71
5.9	Rincian Belanja Operasi.. ..	72
5.10	Rincian Belanja Pegawai.. ..	72
5.11	Rincian Belanja Barang dan Jasa	73
5.12	Rincian Belanja Hibah	75
5.13	Rincian Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.. ..	76
5.14	Rincian Belanja Hibah BOP Kesetaraan.....	77
5.15	Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.....	78
5.16	Rincian Belanja Bantuan Sosial.....	78
5.17	Rincian Belanja Modal Tanah.....	79
5.18	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80
5.19	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81
5.20	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83
5.21	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84
5.22	Rincian Belanja Modal Aset Lainnya	84
5.23	Rincian Transfer.....	86
5.24	Rincian Penerimaan Pembiayaan.....	87
5.25	Rincian Pengeluaran Pembiayaan.....	88
5.26	Rincian Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih.....	90
5.27	Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah	91
5.28	Rincian Kas JKN.....	93
5.29	Rincian Piutang Pajak	94
5.30	Rincian Piutang Retribusi	95
5.31	Rincian Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi	95

5.32	Rincian Beban Dibayar Di Muka.....	97
5.33	Rincian Persediaan.....	97
5.34	Daftar Saldo Akhir Persediaan SKPD	98
5.35	Rincian Investasi Non Permanen	100
5.36	<i>Aging Schedule</i> Dana Bergulir.....	100
5.37	Rincian Investasi Permanen.....	100
5.38	Rincian Aset Tetap.....	102
5.39	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Tanah.....	103
5.40	Daftar Saldo Aset Tetap – Tanah SKPD.....	106
5.41	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	107
5.42	Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin SKPD	112
5.43	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	113
5.44	Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan SKPD	117
5.45	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan	119
5.46	Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPD	121
5.47	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya.....	122
5.48	Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD.....	123
5.49	Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	124
5.50	Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD	126
5.51	Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap SKPD.....	128
5.52	Rincian Tagihan Lainnya.....	129
5.53	Rincian Aset yang Dibatasi Penggunaannya	131
5.54	Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud	131
5.55	Daftar Saldo Aset Tak Berwujud SKPD.....	132
5.56	Daftar Saldo Amortisasi SKPD.....	133
5.57	Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain.....	135
5.58	Daftar Saldo Aset Lain-lain SKPD	136
5.59	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain SKPD	137
5.60	Daftar Utang Belanja SKPD	139
5.61	Rincian Pendapatan – LO	141
5.62	Rincian Pendapatan Pajak Daerah... ..	142
5.63	Daftar Pendapatan Retribusi Daerah SKPD.....	142
5.64	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143
5.65	Daftar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah SKPD	144
5.66	Rincian Pendapatan Transfer – LO.....	145
5.67	Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah	145
5.68	Rincian Pendapatan Hibah – LO.....	146
5.69	Rincian Beban – LO.....	147
5.70	Rincian Beban Operasi	147
5.71	Daftar Beban Pegawai SKPD	148
5.72	Daftar Beban Persediaan SKPD.....	149
5.73	Daftar Beban Jasa SKPD	150
5.74	Daftar Beban Pemeliharaan SKPD	152
5.75	Daftar Beban Perjalanan Dinas SKPD.....	153
5.76	Daftar Beban Hibah SKPD... ..	155
5.77	Daftar Beban Penyusutan SKPD.....	156
5.78	Daftar Beban Amortisasi SKPD	157
5.79	Daftar Beban Penyisihan Piutang SKPD	158
5.80	Rincian Beban Transfer	159

5.81	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi	161
5.82	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	162
5.83	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	162
5.84	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	163
5.85	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan	163
5.86	Rincian Saldo Akhir Kas	165

DAFTAR LAMPIRAN

5.1	Realisasi Belanja Hibah BOP PAUD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.....	171
5.2	Rekening-Rekening Sekolah yang Belum Ditetapkan sebagai Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	174
5.3	Daftar Aset Bersengketa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat..	182



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 21 Mei 2021

Nomor : 900/634/V/BPKAD/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada:
Yth. Kepala Perwakilan BPK-RI
Provinsi Kalimantan Tengah
Di –
Palangka Raya

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca per 31 Desember 2020, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern.
13. Kami telah menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
18. Berkaitan dengan dampak pandemi *COVID-19*:
 - a. Kami telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi *COVID-19* dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.
 - b. Kami telah menyajikan dalam Laporan Keuangan dan/atau telah mengungkapkan semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi *COVID-19* tersebut.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	Anggaran Perubahan 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
4	PENDAPATAN	1.458.882.254.748,00	1.449.011.596.895,94	99,32	1.357.377.147.401,90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.652.378.511,00	224.651.929.841,28	102,74	170.185.828.808,34
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	69.400.000.000,00	64.838.822.752,80	93,43	51.527.738.156,10
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	15.042.143.800,00	13.208.556.926,00	87,81	13.532.547.717,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.804.364.000,00	9.804.364.851,00	100,00	8.941.166.757,00
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	124.405.870.711,00	136.800.185.311,48	109,96	96.184.376.178,24
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.193.659.476.237,00	1.186.742.690.871,07	99,42	1.149.743.873.849,22
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER - DANA PERIMBANGAN	970.418.165.237,00	958.924.263.043,00	98,82	961.791.162.166,00
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	40.858.610.000,00	29.764.009.462,00	72,85	57.921.302.247,00
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	30.417.965.000,00	34.619.424.857,00	113,81	38.813.631.459,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	604.341.284.000,00	602.446.484.000,00	99,69	670.997.942.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	294.800.306.237,00	292.094.344.724,00	99,08	194.058.286.460,00
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	163.349.329.000,00	163.174.967.600,00	99,89	106.059.541.400,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian	163.349.329.000,00	163.174.967.600,00	99,89	106.059.541.400,00
4.2.3	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	59.491.982.000,00	64.243.460.228,07	107,99	81.343.170.283,22
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.491.982.000,00	64.243.460.228,07	107,99	81.343.170.283,22
4.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
4.2.4	BANTUAN KEUANGAN	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	550.000.000,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	550.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	46.570.400.000,00	37.616.976.183,59	80,77	37.447.444.744,34
4.3.2	Pendapatan Hibah	46.150.400.000,00	37.161.976.183,59	80,52	37.062.444.744,34
4.3.3	Pendapatan Lainnya	420.000.000,00	455.000.000,00	108,33	385.000.000,00

Kode Akun	URAIAN	Anggaran Perubahan 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	917.810.205.330,98	858.901.457.730,67	93,58	873.780.401.338,31
5.1.1	Belanja Pegawai	462.511.455.160,00	441.025.705.448,00	95,35	482.596.403.755,50
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	442.558.280.170,98	407.431.358.282,67	92,06	381.938.443.234,81
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	280.000.007,00
5.1.5	Belanja Hibah	8.515.470.000,00	7.351.394.000,00	86,33	7.804.054.341,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.225.000.000,00	3.093.000.000,00	73,21	1.161.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	388.884.591.217,02	377.005.194.475,77	96,95	357.837.690.237,29
5.2.1	Belanja Tanah	676.000.000,00	415.506.760,00	61,47	346.517.905,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	105.888.795.985,02	97.622.948.332,00	92,19	54.893.662.839,22
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	145.668.507.461,00	143.482.401.078,77	98,50	132.223.414.395,24
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.304.922.625,00	125.882.549.773,00	99,67	154.912.088.124,43
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.389.114.934,00	4.759.374.090,00	88,31	10.951.107.223,40
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	4.957.250.212,00	4.842.414.442,00	97,68	4.510.899.750,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	65.000.000.000,00	49.260.669.634,36	75,79	-
5.3.1	Belanja Tak Terduga	65.000.000.000,00	49.260.669.634,36	75,79	-
	JUMLAH BELANJA	1.371.694.796.548,00	1.285.167.321.840,80	93,69	1.231.618.091.575,60
6	TRANSFER				
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	8.989.815.000,00	7.740.424.700,00	86,10	6.423.330.300,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.359.367.000,00	6.502.448.300,00	88,36	5.118.744.700,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	1.630.448.000,00	1.237.976.400,00	75,93	1.304.585.600,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	151.644.301.200,00	149.566.271.300,00	98,63	153.647.369.684,00
6.2.1	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	151.644.301.200,00	149.566.271.300,00	98,63	153.647.369.684,00
	JUMLAH TRANSFER	160.634.116.200,00	157.306.696.000,00	97,93	160.070.699.984,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.532.328.912.748,00	1.442.474.017.840,80	94,14	1.391.688.791.559,60
	SURPLUS/DEFISIT	(73.446.658.000,00)	6.537.579.055,14	(8,90)	(34.311.644.157,70)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.946.658.000,00	95.493.771.371,23	117,97	120.826.890.811,61
7.1.1	Penggunaan SiLPA	44.946.658.000,00	59.479.771.371,23	132,33	120.684.471.011,61
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	100,00	-
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	14.000.000,00	-	142.419.800,00

Kode Akun	URAIAN	Anggaran Perubahan 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	4.500.000.000,00	60,00	27.000.000.000,00
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	4.500.000.000,00	60,00	7.000.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	20.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	73.446.658.000,00	90.993.771.371,23	123,89	93.826.890.811,61
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		97.531.350.426,37		59.515.246.653,91

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, Mei 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	59.479.771.371,23	120.684.471.011,61
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(59.479.771.371,23)	(120.684.471.011,61)
3	Subtotal (1 + 2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	97.590.424.926,37	59.515.246.653,91
5	Subtotal (3 + 4)	97.590.424.926,37	59.515.246.653,91
6	Lain-lain	(59.074.500,00)	(35.475.282,68)
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	97.531.350.426,37	59.479.771.371,23

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, Mei 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 31 DESEMBER TAHUN 2019
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas Di Kasda	44.402.895.610,80	3.074.805.820,73
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	3.367.123,00	1.150.000,00
	Kas Di Bendahara Penerimaan	7.835.000,00	2.705.000,00
	Kas JKN	388.439.034,00	242.046.946,00
	Kas BLUD	18.962.379.039,12	7.941.322.444,51
	Kas BOS	1.611.950.309,65	4.101.602.885,19
	Piutang Pajak	41.093.736.163,45	38.792.616.379,88
	Penyisihan Piutang Pajak	(27.338.328.868,98)	(25.483.491.547,13)
	Piutang Retribusi	1.587.470.143,00	1.010.388.787,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(753.398.068,45)	(664.316.407,10)
	Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21	579.089.303,00	1.226.721.259,00
	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21	-	-
	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	32.637.149.875,29	-
	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	-
	Piutang Lainnya	97.209.155.589,00	22.608.745.227,75
	Penyisihan Piutang Lainnya	(5.690.612.058,45)	(1.981.658.706,18)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	63.289.423,50	77.894.676,00
	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(31.644.711,75)	(7.789.467,60)
	Beban Dibayar Di Muka	343.830.227,96	317.892.613,46
	Persediaan	51.010.082.128,19	26.834.480.351,75
	Jumlah Aset Lancar	256.086.685.262,33	78.095.116.263,26
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen	218.705.204,00	232.705.204,00
	Investasi Permanen	130.035.019.825,41	127.923.098.853,25
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	130.253.725.029,41	128.155.804.057,25
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	498.396.123.964,07	491.179.690.204,07
	Peralatan dan Mesin	607.825.996.038,55	502.297.771.577,42
	Gedung dan Bangunan	1.087.204.097.394,82	946.795.518.678,20
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.884.524.022.534,07	2.717.274.864.457,20
	Aset Tetap Lainnya	42.243.910.443,40	38.476.186.662,40
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.172.344.563,91	77.189.127.975,03
	Akumulasi Penyusutan	(2.592.903.399.665,60)	(2.328.787.127.741,86)
	Jumlah Aset Tetap	2.640.463.095.273,22	2.444.426.031.812,46

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Tagihan Lainnya	175.342.231,00	177.389.331,00
	Aset yang dibatasi Penggunaanya	32.154.484.809,80	44.116.138.774,80
	Aset Tak Berwujud	49.212.867.367,00	46.315.302.925,00
	Amortisasi	(37.637.624.341,00)	(32.610.048.993,00)
	Aset Lain-lain	15.253.676.120,76	16.756.612.124,01
	Aset Lain-lain	21.715.281.878,00	20.232.361.725,39
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(6.461.605.757,24)	(3.475.749.601,38)
	Jumlah Aset Lainnya	59.158.746.187,56	74.755.394.161,81
	JUMLAH ASET	3.085.962.251.752,52	2.725.432.346.294,78
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Pendapatan Diterima Di Muka	53.626.410,96	40.600.000,00
	Utang Belanja	111.850.190.338,99	38.638.171.352,90
	Utang Jangka Pendek Lainnya	36.000.000.000,00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	147.903.816.749,95	38.678.771.352,90
	JUMLAH KEWAJIBAN	147.903.816.749,95	38.678.771.352,90
3	EKUITAS	2.938.058.435.002,57	2.686.753.574.941,88
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.085.962.251.752,52	2.725.432.346.294,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, Mei 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
	KEGIATAN OPERASIONAL			
8	PENDAPATAN - LO	1.535.448.527.918,09	1.299.385.297.164,88	236.063.230.753,21
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	297.799.584.382,39	181.498.369.592,09	116.301.214.790,30
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	66.328.550.464,37	57.071.408.999,15	9.257.141.465,22
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.589.810.282,00	13.803.201.987,00	(213.391.705,00)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.327.140.787,00	8.941.166.757,00	385.974.030,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	208.554.082.849,02	101.682.591.848,94	106.871.491.000,08
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.137.966.033.146,36	1.047.622.586.701,33	90.343.446.445,03
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	958.924.263.043,00	961.791.162.166,00	(2.866.899.123,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak	29.764.009.462,00	57.921.302.247,00	(28.157.292.785,00)
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34.619.424.857,00	38.813.631.459,00	(4.194.206.602,00)
	Dana Alokasi Umum	602.446.484.000,00	670.997.942.000,00	(68.551.458.000,00)
	Dana Alokasi Khusus	292.094.344.724,00	194.058.286.460,00	98.036.058.264,00
				-
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	81.761.160.000,00	29.855.908.600,00	51.905.251.400,00
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
	Dana Penyesuaian	81.761.160.000,00	29.855.908.600,00	51.905.251.400,00
8.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	97.280.610.103,36	55.975.515.935,33	41.305.094.168,03
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.880.610.103,36	55.425.515.935,33	41.455.094.168,03
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	400.000.000,00	550.000.000,00	(150.000.000,00)
8.2.4	Bantuan Keuangan	-	-	-
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	99.682.910.389,34	70.264.340.871,46	29.418.569.517,88
8.3.1	Pendapatan Hibah	99.227.910.389,34	69.879.340.871,46	29.348.569.517,88
8.3.3	Pendapatan Lainnya	455.000.000,00	385.000.000,00	70.000.000,00
				-
9	BEBAN	1.280.723.248.945,70	1.258.638.378.712,13	22.084.870.233,57
9.1	BEBAN OPERASI	1.204.107.942.545,70	1.174.445.964.927,13	29.661.977.618,57
9.1.1	Beban Pegawai	458.012.501.009,95	483.589.757.475,50	(25.577.256.465,55)
9.1.2	Beban Persediaan	103.257.689.915,22	70.604.095.093,89	32.653.594.821,33
9.1.3	Beban Jasa	261.589.681.680,61	208.837.067.169,94	52.752.614.510,67
9.1.4	Beban Pemeliharaan	24.356.503.297,32	33.906.741.098,17	(9.550.237.800,85)
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	32.454.937.262,43	56.106.712.073,00	(23.651.774.810,57)
9.1.6	Beban Bunga	-	200.000.006,00	(200.000.006,00)

Kode Akun	URAIAN	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
9.1.8	Beban Hibah	50.805.254.807,88	33.554.095.115,14	17.251.159.692,74
9.1.9	Beban Bantuan Sosial	3.093.000.000,00	1.161.500.000,00	1.931.500.000,00
9.1.10	Beban Penyusutan	259.733.790.355,32	275.083.697.679,39	(15.349.907.324,07)
9.1.11	Beban Amortisasi	5.027.575.348,00	5.720.718.668,00	(693.143.320,00)
9.1.12	Beban Penyisihan Piutang	5.777.008.868,97	5.486.580.548,10	290.428.320,87
9.1.13	Beban Lain-lain	-	195.000.000,00	(195.000.000,00)
9.2	BEBAN TRANSFER	76.615.306.400,00	84.192.413.785,00	(7.577.107.385,00)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	7.832.933.700,00	6.486.739.300,00	1.346.194.400,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	68.782.372.700,00	77.705.674.485,00	(8.923.301.785,00)
9.2.5	Beban Transfer Keuangan Lainnya	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	254.725.278.972,39	40.746.918.452,75	213.978.360.519,64
9.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS NON OPERASIONAL			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	157.643.353,43	477.465.256,49	(319.821.903,06)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.100.432.999,93	1.706.074.568,36	(605.641.568,43)
	Jumlah Surplus Non Operasional	1.258.076.353,36	2.183.539.824,85	(925.463.471,49)
	DEFISIT NON OPERASIONAL			
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	1.907.274.489,05	2.359.596.403,31	(452.321.914,26)
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.277.027.803,46	2.739.135.180,10	537.892.623,36
	Jumlah Defisit Non Operasional	5.184.302.292,51	5.098.731.583,41	85.570.709,10
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.926.225.939,15)	(2.915.191.758,56)	(1.011.034.180,59)
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	250.799.053.033,24	37.831.726.694,19	212.967.326.339,05
9.4	POS LUAR BIASA			
	PENDAPATAN LUAR BIASA			
	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	BEBAN LUAR BIASA			
	Beban Luar Biasa	733.667.268,00	-	733.667.268,00
	Jumlah Beban Luar Biasa	733.667.268,00	-	733.667.268,00
	POS LUAR BIASA	(733.667.268,00)	-	(733.667.268,00)
	SURPLUS/DEFISIT - LO	250.065.385.765,24	37.831.726.694,19	212.233.659.071,05

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, Mei 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Metode Langsung

(AUDITED)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	a. Arus Kas Masuk:		
	Penerimaan Pajak Daerah	64.838.822.752,80	51.527.738.156,10
	Penerimaan Retribusi Daerah	13.208.556.926,00	13.532.547.717,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.804.364.851,00	8.941.166.757,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	136.365.772.873,48	95.550.543.620,24
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	29.764.009.462,00	57.921.302.247,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	34.619.424.857,00	38.813.631.459,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	602.446.484.000,00	670.997.942.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	292.094.344.724,00	194.058.286.460,00
	Penerimaan Dana Penyesuaian	163.174.967.600,00	106.059.541.400,00
	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	64.243.460.228,07	81.343.170.283,22
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	400.000.000,00	550.000.000,00
	Penerimaan Hibah	37.161.976.183,59	37.062.444.744,34
	Penerimaan Dana Darurat	-	-
	Penerimaan Lainnya	455.000.000,00	385.000.000,00
	Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		
	Jumlah	1.448.577.184.457,94	1.356.743.314.843,90
	b. Arus Kas Keluar:		
	Pembayaran Pegawai	441.025.705.448,00	482.596.403.755,50
	Pembayaran Barang dan Jasa	407.372.358.282,67	381.938.442.734,81
	Pembayaran Bunga	-	280.000.007,00
	Pembayaran Subsidi	-	-
	Pembayaran Hibah	7.351.394.000,00	7.804.054.341,00
	Pembayaran Bantuan Sosial	3.093.000.000,00	1.161.500.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	49.260.669.634,36	-
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	6.502.448.300,00	5.118.744.700,00
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.237.976.400,00	1.304.585.600,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	149.566.271.300,00	153.647.369.684,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	Jumlah	1.065.409.823.365,03	1.033.851.100.822,31
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	383.167.361.092,91	322.892.214.021,59
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	a. Arus Kas Masuk:		
	Pencairan Dari Dana Cadangan	-	-
	Penjualan atas Tanah	-	-

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	220.660.438,00	633.832.558,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	213.752.000,00	-
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Penjualan Aset Lainnya (Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan)	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah	434.412.438,00	633.832.558,00
	b. Arus Keluar Kas:		
	Pembentukan Dana Cadangan		
	Perolehan Tanah	415.506.760,00	346.517.905,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	97.622.948.332,00	54.893.662.839,22
	Perolehan Gedung dan Bangunan	143.482.401.078,77	132.223.414.395,24
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.882.549.773,00	154.912.088.124,43
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.759.374.090,00	10.951.107.223,40
	Perolehan Aset Lainnya	4.842.414.442,00	4.510.899.750,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	7.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	20.000.000.000,00
	Jumlah	381.505.194.475,77	384.837.690.237,29
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(381.070.782.037,77)	(384.203.857.679,29)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	a. Arus Masuk Kas:		
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	36.000.000.000,00	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	14.000.000,00	142.419.800,00
	Jumlah	36.014.000.000,00	142.419.800,00
	b. Arus Keluar Kas:		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Jumlah	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	36.014.000.000,00	142.419.800,00
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
	a. Arus Masuk Kas:		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah	94.036.815.731,00	92.058.964.682,00
	Kiriman Uang Masuk/Pengembalian Kas dari Bendahara Pengeluaran dan Setoran Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	Jumlah	94.036.815.731,00	92.058.964.682,00

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	b. Arus Keluar Kas:		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.036.741.731,00	92.058.964.682,00
	Kiriman Uang Keluar/Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Belum dipertanggungjawabkan (UP/TUP)	-	-
	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	Sisa Kas Bendahara Kapitasi JKN	-	-
	Jumlah	94.036.741.731,00	92.058.964.682,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	74.000,00	-
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	38.110.653.055,14	(61.169.223.857,70)
	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN	59.479.771.871,23	120.648.995.728,93
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN	97.590.424.926,37	59.479.771.871,23
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN Terdiri dari:		
	1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)	44.461.969.610,80	3.074.805.820,73
	2. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya	32.154.484.809,80	44.116.138.774,80
	3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.835.000,00	2.705.000,00
	4. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.367.123,00	1.150.000,00
	5. Saldo Akhir Kas Dana JKN	388.439.034,00	242.046.946,00
	6. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin	18.962.379.039,12	7.941.322.444,51
	7. Saldo Akhir Kas Lainnya	-	-
	8. Saldo Akhir Kas BOS	1.611.950.309,65	4.101.602.885,19
	Saldo Akhir Kas	97.590.424.926,37	59.479.771.871,23

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, Mei 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	EKUITAS AWAL	2.686.753.574.941,88	2.635.607.501.706,97
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	250.065.385.765,24	37.831.726.694,19
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	1.239.474.295,45	13.314.346.540,72
1	Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda	35.068.265,00	
2	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD		31.199.999,66
3	Koreksi Lebih Catat Saldo Kas BOS		(66.675.282,34)
4	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
5	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak	809.344.972,00	(9.209.952,00)
6	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi	195.828.000,00	
7	Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
8	Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya	2.185.408.366,25	
9	Koreksi Saldo Awal Persediaan	472.742.155,77	
10	Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen		(2.595.000.000,00)
11	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen		
12	Koreksi Saldo Awal Tanah	79.860.000,00	8.811.868.400,00
13	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin		
14	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan		
15	Koreksi Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		(178.481.752,42)
16	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		
17	Koreksi Saldo Awal Konstruksi dalam Pengerjaan		
18	Koreksi Saldo Awal Tagihan Lainnya		
19	Koreksi Saldo Awal Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	(35.068.265,00)	
20	Koreksi Nilai Piutang		3.390.211.736,51
21	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	100.281.289,36	82.350.721,75
22	Koreksi Nilai Persediaan		(0,20)
23	Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi	(1.787.912.496,04)	3.492.105.030,86
24	Koreksi Nilai Utang	55.929.217,00	358.477.638,90
25	Koreksi Nilai Penyusutan Aset lain-Lain	(872.007.208,89)	
26	Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin		(2.500.000,00)
	EKUITAS AKHIR	2.938.058.435.002,57	2.686.753.574.941,88

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, Mei 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan saat ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah Pusat-Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Ikhtisar Laporan Dana Desa.



Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas;
- c. untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan ini dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.



1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;



- s. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Neraca
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Operasional
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan Atas Informasi – informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,59 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,76 persen
- c. Gini Ratio sebesar 0,333 persen
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,87 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 0,98 persen
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,62 persen (sesuai tingkat inflasi Kota Sampit sebagai acuan)
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp20.523.757,9 (Juta Rupiah)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Kotawaringin Barat (%)	4,11	3,59	(0,52)
2	Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribuan Orang)	12,76	11,46	(1,30)
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	4,98	4,82	(0,16)
4	Nasional (%)	9,22	9,78	0,56
5	Peringkat Provinsi	4	4	
6	Peringkat Nasional	36	20	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2020

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2019 sebesar 4,11 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 3,59 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat masih di bawah Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab	0,55	0,40	(0,15)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,70	0,80	0,10
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	0,06
4	Peringkat Provinsi	6	3	
5	Peringkat Nasional	60	21	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2020

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab	0,13	0,08	(0,05)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,14	0,20	0,06
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,01
4	Peringkat Provinsi	8	3	
5	Peringkat Nasional	93	23	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2020

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 adalah sebesar 4,76 persen, sebagaimana dijelaskan tabel 2.4.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab (%)	2,62	4,76	2,14
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,58	0,48
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,28	7,07	1,79
4	Peringkat Provinsi	3	9	
5	Peringkat Nasional	91	230	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,76 persen, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,62 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Namun demikian TPT Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,58 persen dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 7,07 persen.

Tabel 2.5
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama

No	Lapangan Kerja Utama	Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama						Total
		0 0*)	1 1-7	2 8-14	3 15-24	4 25-34	5 35+	
1	Primer	1,331	1,794	3,769	9,288	6,652	26,045	48,879
2	Sekunder	466	804	1,743	2,326	2,220	19,509	27,068
3	Tersier	2,861	1,981	3,965	7,092	5,462	65,641	87,002
Total		4,658	4,579	9,477	18,706	14,334	111,195	162,949

*) Sementara Tidak Bekerja

Sumber: Olahan Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

Keterangan:

Primer : Pertanian; Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian,

Sekunder : Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah/Limbah; Konstruksi,

Tersier : Perdagangan dan Reparasi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pemerintahan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; Jasa Lainnya.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;



- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 adalah sebesar 0,333 poin, sebagaimana dijelaskan tabel 2.6.

Tabel 2.6
Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun
1	Tingkat Kab	0,308	0,333	0,025
2	Tingkat Provinsi	0,336	0,320	(0,016)
3	Tingkat Nasional	0,382	0,385	0,003
3	Peringkat Provinsi	7	N/A	
4	Peringkat Nasional	205	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,333 poin. Angka ini naik 0,025 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,308 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional. Untuk peringkat Provinsi dan Nasional sampai dengan Laporan Audited Tahun 2020 ini disusun data belum tersaji lengkap untuk semua Kabupaten/Kota se-Indonesia.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 adalah sebesar 72,87 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.7.



Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	72,85	72,87	0,02
2	Provinsi	70,91	71,05	0,14
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	0,02
4	Peringkat Provinsi	2	2	
5	Peringkat Nasional	123	135	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Realisasi pencapaian IPM Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 72,87 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 72,85 poin mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,59 tahun pada Tahun 2020, lebih cepat 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,42 tahun dengan harapan lama sekolah 12,72 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp13,109 juta atau menurun Rp66 juta dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini berada pada urutan ke-2 (dua) dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan berada pada urutan 135 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	12.180.893,82	12.875.812	13.004,13	98,956,7 (T)	10.722,4 (T)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,46	5,79	0,98	4,39	3,72
3	Peringkat Provinsi	7	10	5		
4	Peringkat Nasional (Indonesia)*	196	149	45		

Sumber Dokumen: BPS Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dan Indonesia, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021



Dalam skala provinsi, Tahun 2020 laju pertumbuhan Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan 5 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan 46 dari laju pertumbuhan Propinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun, (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 adalah sebesar persen dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab (%)	0,70	0,52	(0,18)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,66	0,52	(0,14)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,34	0,28	(0,06)
4	Peringkat Provinsi*	N/A	N/A	
5	Peringkat Nasional	11	18	

*Berdasarkan Inflasi Kota Sampit, Tingkat Inflasi di wilayah Kalteng hanya Kota Palangka Raya dan Sampit yang menjadi acuan

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,52 persen (data Inflasi kota Sampit sebagai acuan), sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 0,70 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Dengan demikian inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2020 sama dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar



0,52 persen dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Nasional sebesar 0,28 persen.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.507.674,26	4.620.060	5210,35
2	Industri Pengolahan	4.519.801,42	4.772.810	111,71
3	Sepeda Motor	2.361.769,45	2.665.650	4212,75
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17.827.431,50	19.334.404,90	20.523.757,90
5	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas*	17.827.431,50	19.334.404,90	20.523.757,90
6	PDRB Provinsi	138.740,7 (M)	150.283,2 (M)	152.190,9 (M)
7	PDRB Nasional	14.838.311,5 (M)	15.833.943,4 (M)	15.434,2 (T)
8	Peringkat Provinsi	2	2	2
9	Peringkat Nasional	187	188	172

*PDRB Non Migas = PDRB Total karena Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengelola sektor Migas

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan komponen keuangan daerah yang terdampak *Covid-19*. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan sejumlah upaya *refocusing* anggaran untuk menyesuaikan kemampuan pendanaan dari pendapatan daerah. Berdasarkan amanat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan penyesuaian terhadap komponen pendapatan daerah, yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan melalui pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD pada 2020 terkoreksi akibat pandemi *Covid-19*, sehingga diperlukan penyesuaian dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap potensi pajak



daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2020. Pada beberapa lapangan usaha yang terdampak *Covid-19*, terjadi penurunan kegiatan perekonomian. Pelaku usaha yang menjadi wajib pajak mengurangi produksi sebagai respon dari berkurangnya permintaan (konsumsi) pasar. Menurunnya omset usaha ini mengakibatkan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan turunnya penerimaan daerah dari sektor PAD. Selain pajak dan retribusi daerah, penerimaan pendapatan asli daerah juga didapat dari pembagian laba kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari laba penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Kalteng dan PD BPR Marunting Sejahtera, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- b. Penyesuaian Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Penyesuaian pendapatan TKDD didasarkan atas rincian alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- c. Penyesuaian Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Penyesuaian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditetapkan dengan memperhitungkan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan penyesuaian target PAD Provinsi Kalimantan Tengah dari menurunnya kegiatan perekonomian. Selain itu, terjadi penyesuaian pada Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa menyesuaikan alokasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020.

Arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dilakukan pada tahun 2020 ditujukan untuk memulihkan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Upaya memulihkan target pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya memulihkan target PAD ditempuh dengan mengawal target pajak dan retribusi daerah, difokuskan pada upaya:
 - Tetap menjaga ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melakukan komunikasi persuasif kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
 - Memberikan dispensasi kepada wajib pajak tertentu berupa penundaan kewajiban pembayaran pajak di luar waktu jatuh tempo;
 - Peningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah; Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi



berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak;

- Penyesuaian peraturan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Perbaikan mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
- Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan lembaga keuangan lainnya;
- Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh.

2. Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi operasional yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Review Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- Peningkatan koordinasi antara SKPD dalam upaya meningkatkan PAD.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, pengalokasian didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2019 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun terakhir serta dalam rangka mengantisipasi menurunnya beberapa asumsi makro ekonomi pemerintah, seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar, harga minyak dunia dan kebijakan subsidi energi.

Penyesuaian pendapatan daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1.458.882.254.748,00 atau turun 8,87 persen dari target awal tahun 2020 sebesar Rp1.600.931.562.000,00. Target tersebut juga lebih tinggi 0,83 persen dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp1.446.784.192.000,00. Adapun komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp218.652.378.511,00 atau turun 14,27 persen dari target awal tahun 2020 sebesar Rp255.058.556.000,00. Target tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp226.495.773.000,00.

b. Pendapatan Transfer

Penyesuaian Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada APBD Tahun



Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp1.193.659.476.237,00 atau turun 8,56 persen dari target awal tahun 2020 sebesar Rp1.305.343.006.000,00. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.176.009.436.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp46.570.400.000,00 atau naik 14,90 persen apabila dibandingkan dengan target awal tahun 2020 sebesar Rp40.530.000.000,00. Target tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp44.278.983.000,00.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan mengupayakan 20 persen anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 persen anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
- c. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta peningkatan alokasi dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
- e. Memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

II. Aspek Pelayanan Publik

- a. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja Daerah;
- c. Mengalokasikan Belanja Pegawai maksimal 50 persen dari total belanja APBD;
- d. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/cluster industri berbasis pertanian.



III. Aspek Daya Saing

- a. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, dan bandara bertaraf internasional;
- b. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
- c. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;
- d. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang capable dan responsible, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good governance* dengan efektif;
- e. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan IPM;
- f. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat dan lain-lain dan menggantikannya ke dalam skema penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dalam upaya penyediaan kegiatan berskala kecil/desa;
- h. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif;
- i. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, termasuk investasi bidang pendidikan;
- j. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait penanganan *Covid-19* yang melanda sejak Triwulan I 2020, Pemerintah Kotawaringin Barat telah melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran pada APBD yang



dialokasikan untuk pendanaan kegiatan pencegahan/penanganan *Covid-19*, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian daerah, dengan menyesuaikan alokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp1.532.328.912.748,00 atau turun sebesar 9,34 persen dari target belanja awal sebesar Rp1.690.278.480.000,00. Target ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yaitu Rp1.499.450.230.000,00. Rencana Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2020 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp700.343.784.950,00 atau naik sebesar 5,24 persen dibandingkan dengan target awal 2020 sebesar Rp665.424.619.000,00. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp671.993.004.000,00. Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, pada 2020 diproyeksikan sebesar Rp461.969.198.750,00 lebih rendah dari target awal sebesar Rp481.202.204.000,00. Target tersebut juga masih lebih rendah dari plafon belanja yang sama pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp489.828.600.000,00;
 - b. Belanja Bunga
Belanja Bunga pada tahun anggaran 2020 tidak dialokasikan;
 - c. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi pada Tahun 2020 tidak dianggarkan, demikian juga dengan Tahun 2019 sebelumnya;
 - d. Belanja Hibah
Belanja Hibah merupakan hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah ini pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan turun menjadi Rp8.515.470.000,00 dari alokasi awal Rp10.495.800.000,00. Penurunan alokasi ini menyesuaikan dengan target pendapatan daerah. Alokasi ini masih lebih rendah dibandingkan alokasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.303.156.000,00;
 - e. Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp4.225.000.000,00 lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp1.450.000.000,00. Alokasi ini lebih tinggi dibandingkan alokasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.458.000.000,00;
 - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp8.989.815.000,00 atau berkurang dibandingkan target awal sebesar Rp11.002.250.000,00. Alokasi ini lebih rendah dibandingkan alokasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.303.156.000,00;

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, partai politik dan damang kepala adat. Belanja Bantuan Keuangan ini pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 151.644.301.200,00 atau menurun dari target awal di 2020 sebesar Rp 159.274.365.000,00. Alokasi tersebut juga lebih rendah daripada alokasi tahun sebelumnya Rp 160.746.348.000,00;

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Untuk tahun 2020, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 65.000.000.000,00 atau meningkat Rp63.000.000.000,00 dari alokasi awal 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00. Alokasi tersebut juga jauh lebih tinggi dari Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan sebesar Rp900.000.000,00. Alokasi belanja tidak terduga ini berasal dari hasil realokasi dan refocusing anggaran belanja, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan fokus:

- Belanja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
- Pengadaan jaring pengaman sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli karena terdampak *Covid-19*;
- Penanganan dampak ekonomi untuk menjaga agar dunia usaha tetap hidup dan menstimulasi kegiatan perekonomian daerah.

2. Belanja Langsung (BL) tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 831.985.127.798,00 atau turun dari target awal 2020 sebesar Rp 1.024.853.861.000,00. Target tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 827.517.226.000,00.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, meliputi kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, pembangunan daerah yang berdasarkan usulan masyarakat dalam forum musrenbang, rencana teknokratik SKPD, Pokok-pokok pikiran DPRD dan pembangunan daerah berdasarkan platform Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Belanja langsung mengalami penyesuaian dalam *refocusing* anggaran sebagai berikut:

- Rasionalisasi honorarium kegiatan, uang lembur, penyesuaian besaran belanja



- pegawai dari dana Kapitasi JKN dan dana BLUD
- Rasionalisasi perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
 - barang pakai habis untuk keperluan kantor
 - belanja cetak dan penggandaan
 - pakaian dinas dan atributnya
 - Perawatan kendaraan bermotor
 - Sewa
 - Jasa kantor
 - Jasa konsultasi
 - Tenaga ahli/instruktur/narasumber
 - Makanan dan minuman rapat
 - Sosialisasi/workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan kelompok diskusi terfokus serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang
 - Renovasi ruangan/gedung, meubelair dan perlengkapan perkantoran
 - Pembangunan gedung baru
 - Pembangunan infrastruktur yang masih memungkinkan untuk ditunda

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat masih menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari prediksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan berdasarkan potensi riil yang ada dan penerimaan kembali pemberian pinjaman jangka pendek kepada masyarakat.

Kebijakan atas pengeluaran pembiayaan digunakan untuk:

- a. Menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun rencana 2020;
- b. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 32 dimana klasifikasi belanja adalah berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja Urusan Wajib, belanja Urusan Pilihan dan belanja berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan.



Selanjutnya Urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab, dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah di Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan 342 program dan 1.327 kegiatan. Rekapitulasi Rencana Anggaran. Dalam Tahun 2020 belanja urusan wajib dan urusan pilihan dilaksanakan melalui anggaran Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan suatu program dan atau kegiatan. Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 88 program dan 360 kegiatan dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp624.840.895.757,32 atau 94,81 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp658.977.771.979,00 sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp34.136.876.221,67.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari 110 program dan 376 kegiatan dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp51.162.923.586,00 atau 94,27 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp54.272.143.400,00 Sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp3.109.219.814,00.

b. Urusan Pilihan

Belanja Urusan Pilihan terdiri dari 43 program dan 144 kegiatan dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp46.304.781.094,00 atau 94,55 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp48.969.549.872,00. Sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp2.664.768.778,00.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 101 program dan 447 kegiatan dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp 62.639.688.321,13 atau 89,78 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 69.765.662.547,00. Sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp7.125.974.225,87.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2020. Uraian kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, sedangkan untuk Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	SKPD	PAGU APBD (BL+BTL) (Rp)	REALISASI BL+BTL		
			(Rp)	% KEU	% FISIK
1	Disdikbud	301.869.365.785,00	279.294.287.713,13	92,52	99,83
2	Dinas Kesehatan	201.903.558.764,00	189.432.680.604,00	93,82	99,37
3	RSUD	205.348.874.180,00	197.971.417.881,64	96,41	96,97
4	DPU & PR	188.904.476.700,00	188.267.986.236,54	99,66	99,97
5	Dinas Perumahan Rakyat KP	8.917.108.100,00	8.643.833.275,00	96,94	98,84
6	Satuan Polisi PP & PK	20.649.591.000,00	19.453.866.263,00	94,21	99,95
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.312.267.500,00	4.228.876.395,00	98,07	99,77
8	BPBD	15.891.594.400,00	13.581.874.690,00	85,47	95,61
9	Dinas Sosial	8.307.295.750,00	7.812.392.510,00	94,04	99,36
10	Disnakertrans	8.633.239.000,00	8.367.550.155,00	96,92	98,84
11	DP3AP2KB	8.176.230.200,00	7.524.696.824,00	92,03	93,53
12	Dinas Ketahanan Pangan	5.549.860.500,00	5.320.787.750,00	95,87	99,49
13	Dinas Lingkungan Hidup	20.650.150.700,00	20.172.747.343,00	97,69	98,54
14	Disdukcapil	6.871.733.000,00	6.463.754.902,00	94,06	99,61
15	DPMD	6.280.490.400,00	6.027.673.839,00	95,97	99,45
16	Dinas Perhubungan	9.285.967.000,00	8.620.526.750,00	92,83	100,00
17	Diskominfo SP	9.595.789.900,00	9.226.098.499,00	96,15	99,55
18	Perindagkop UMKM	22.358.779.600,00	20.868.999.249,00	93,34	96,14
19	DPMPPT Satu Pintu	5.565.323.400,00	5.246.182.782,00	94,27	99,82
20	Dispora	9.105.740.500,00	8.570.738.099,00	94,12	96,00
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	4.947.132.600,00	4.863.871.158,00	98,32	99,96
22	Dinas Perikanan	19.134.503.650,00	18.772.805.475,00	98,11	99,99
23	Dinas Pariwisata	8.090.478.100,00	7.378.518.384,00	91,20	94,85
24	TPH Perkebunan	22.000.161.000,00	21.026.944.291,00	95,58	99,58
25	Dinas Peternakan & KH	10.360.337.700,00	9.607.416.263,00	92,73	98,62
26	DPRD	13.481.603.000,00	13.472.654.189,00	99,93	100,00
27	Kepala Daerah	752.037.000,00	744.739.632,00	99,03	100,00
28	Sekretariat Daerah	34.906.640.300,00	33.403.595.394,28	95,69	98,24



NO.	SKPD	PAGU APBD (BL+BTL) (Rp)	REALISASI BL+BTL		
			(Rp)	% KEU	% FISIK
29	Sekretariat DPRD	15.711.572.300,00	13.328.078.880,85	84,83	87,72
30	Kec. Arut Selatan	16.441.718.250,00	15.016.914.474,00	91,33	97,43
31	Kec. Arut Utara	4.260.459.000,00	4.085.637.484,00	95,90	99,82
32	Kec. Kumai	8.073.183.569,00	7.489.501.836,00	92,77	95,66
33	Kec. Ktw.Lama	7.427.601.750,00	7.084.706.162,00	95,38	99,99
34	Kec. P. Lada	2.330.651.900,00	2.249.599.463,00	96,52	99,22
35	Kec. P. Banteng	2.964.642.800,00	2.870.588.483,00	96,83	100,00
36	Inspektorat Kabupaten	8.386.305.000,00	7.447.465.881,00	88,81	97,54
37	Bappeda	7.005.992.900,00	6.592.545.631,00	94,10	99,32
38	Badan Pendapatan	9.078.568.200,00	8.487.295.856,00	93,49	97,96
39	BPKAD	24.434.642.550,00	20.712.530.649,00	84,77	98,40
40	PPKD	238.374.586.200,00	217.011.759.634,36	91,04	100,00
41	BKPP	5.988.658.600,00	5.729.876.860,00	95,68	98,62
JUMLAH		1.532.328.912.748,00	1.442.474.017.840,80	94,14	98,95

Sumber: Laporan Tepra per 31 Desember 2020

Secara ringkas capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 digambarkan di bawah ini:

- Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.449.011.596.895,94 atau 99,32 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.458.882.254.748,00. Sehingga dari pagu anggaran tersebut tidak terealisasi sebesar Rp9.870.657.852,06. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.357.377.147.401,90 terjadi kenaikan sebesar Rp91.634.449.494,03;
- Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 1.442.474.017.840,81 atau 94,14 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.532.328.912.748,00. Sehingga dari pagu anggaran tersebut tidak terealisasi sebesar Rp89.854.894.907,19. Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp1.391.688.791.559,60 terjadi kenaikan sebesar Rp50.785.226.281,21;
- Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp90.993.771.371,23 yang merupakan selisih lebih dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp95.493.771.371,23 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp44.946.658.000,00, Penerimaan Pinjaman Daerah Rp36.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp14.000.000,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.500.000.000,00 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.2.1 Hambatan dalam kendala dalam pencapaian target pendapatan

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan (**pencapaian kurang dari 95 persen**), antara lain:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** terealisasi sebesar Rp1.262.808.450,00 atau 70,15 persen dari target yang



ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000,00, hal ini terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* yang membuat aktivitas pekerjaan terbatas.

2. Dinas Perhubungan

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimana pencapaian realisasi sebesar Rp648.305.000,00 atau 64,83 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan di luar rumah saat pandemi *Covid-19* karena ada larangan oleh tim satgas *Covid-19* dan operasi yustisi sesuai Perbup Nomor 54 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu larangan mengumpulkan masa di beberapa tempat seperti di pasar-pasar, taman kota Bundaran Pancasila, tempat-tempat wisata, pelabuhan Panglima Utar Kumai;
- b. Retribusi Tempat Parkir Khusus dimana pencapaian realisasi sebesar Rp650.080.400,00 atau 65,01 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 disebabkan oleh tidak ada jadwal penerbangan selama 3 bulan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 551/409/Dishub-LLA tentang Penundaan Sementara Penerbangan Berjadwal;
- c. Penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020 sebesar Rp836.809.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000. Target Penerimaan Retribusi dari sektor Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai sebesar 83.68 persen, hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 yang mempengaruhi sektor perekonomian menyebabkan penurunan jumlah kendaraan yang diuji dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2019 jumlah kendaraan yang diuji sebanyak 7.550 Unit kendaraan, namun pada Tahun 2020 jumlah kendaraan yang diuji adalah sebanyak 6.233 Unit kendaraan. Ada penurunan sebanyak 1.317 Unit kendaraan;
- d. Retribusi Ijin Trayek dan Ijin Usaha Angkutan Darat dimana pencapaian realisasi sebesar Rp300.000,00 atau 7,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00, pencapaian tersebut dikarenakan:
 - armada angkutan umum banyak yang tidak layak pakai
 - pengurusan ijin trayek hanya dilakukan 5 tahun sekali
 - tidak ada armada yang mengurus perpanjangan izin trayek

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.664.492.950,00 atau 79,26 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp2.100.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak dapat diberlakukan sesuai rencana karena adanya resistensi dari pedagang pasar dan ditunda pelaksanaannya sesuai Surat Bupati



Kotawaringin Barat Nomor 511.2/1037/DPPKUKM.6/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.398.468,00 atau 33,28 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp4.202.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari adanya pembayaran denda retribusi pelayanan pasar yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo. Rendahnya pendapatan denda retribusi menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran para pedagang membayar retribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo.
4. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu** terealisasi sebesar Rp1.797.727.848,00 atau 89,89 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 hal ini terjadi karena:
- a. masih banyak bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah berdiri dan menjadi potensi dalam peningkatan PAD akan tetapi terkendala bangunan tersebut rata-rata melanggar GSB (Garis Sepadan Bangunan) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, sehingga tidak dapat diterbitkan izinnya;
 - b. terdapat kawasan tidak sesuai dengan Tata Ruang (menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018) tentang RT/RWK Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. **Dinas Perikanan**
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp106.300.000,00 atau 75,49 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp140.800.000,00 hal ini terjadi karena ada kerusakan Pabrik Es Besar Desa Teluk Bogam upaya yang dilakukan di Tahun Anggaran 2021 dianggarkan rehabilitasi Pabrik Es melalui DAK dan *Single Cold Storage* ditargetkan 1 (satu) tahun baru bulan Mei 2020 dimanfaatkan/sewa pihak ketiga;
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasi sebesar Rp326.399.000,00 atau 88,45 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp369.017.000,00 hal ini terjadi karena Keterbatasan Kapasitas produksi di Balai Benih Ikan dimana kemampuan produksi benih di Balai Benih Ikan tersebut hanya berkapasitas rata-rata 2.000.000 ekor benih. Selain itu adanya masa pemulihan pada indukan dalam setahun selama dua bulan untuk sebagian indukan atau bisa disebut masa istirahat bagi indukan hal ini difungsikan untuk memperoleh hasil sel telur yang maksimal sehingga produksi benih tetap membaik dan pada saat masa istirahat indukan tersebut juga dimanfaatkan untuk membersihkan lingkungan kolam induk dan pemisahan antara jantan dan betina. selain faktor diatas faktor banjir yang terjadi pada saat musim penghujan mengakibatkan kematian pada produksi benih ikan yang dihasilkan.
6. Retribusi jasa usaha/Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di **Dinas Pariwisata** dengan realisasi sebesar Rp391.651.000,00 atau 78,33 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 hal ini terjadi karena:



- a. adanya penutupan seluruh obyek wisata khususnya penghasil PAD, akibat dari pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kotawaringin Barat di awal tahun 2020 sehingga tidak adanya penerimaan PAD pada bulan April s/d Juli 2020;
 - b. adanya surat Edaran Bupati Nomor 451/526/PEM.2020 tentang protokol kesehatan selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru dalam masa pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berisi tentang penutupan sementara semua obyek wisata terhitung mulai tanggal 22 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021 sehingga berakibat berkurangnya penerimaan PAD.
7. Pada tahun 2020 **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan** mengelola 1 (satu) jenis pendapatan, yaitu Retribusi Daerah, akan tetapi pendapatan tersebut tidak mencapai target yakni retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp45.000.000,00 atau 75,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 hal ini terjadi karena adanya:
- a. hasil panen pada Musim Tanam April – September 2020 tidak optimal disebabkan pada saat panen terjadi banjir yang menyebabkan hasil panen menurun dan mutu benih padi yang dihasilkan kualitasnya rendah untuk dijadikan benih. Dan juga disebabkan adanya serangan hama dan penyakit tanaman seperti hama burung yang susah dikendalikan;
 - b. dampak bencana banjir pertanian musim tanam Oktober - Maret lahan di Balai Benih Tanaman Pangan Tanjung Terantang sampai saat ini belum dapat dimulai karena kondisi lahan yg tidak memungkinkan;
 - c. lahan pertanian di Balai Benih Tanaman Pangan Tanjung Terantang merupakan lahan gambut dengan segala aspek permasalahannya diantaranya produktivitas tanah yang rendah sehingga memerlukan budidaya tanaman dengan perlakuan yang khusus (spesifik) salah satu teknik budidaya spesifik yaitu memerlukan input pupuk organik dan kapur yang cukup tinggi dalam memperbaiki sifat kimia tanah yang asam tersebut.
8. **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
- a. Retribusi rumah potong hewan realisasi sebesar Rp100.050.000,00 atau 76.96 persen dan target anggaran sebesar Rp130.000.000,00, hal ini karena:
 - pada saat pandemi *Covid-19* terjadi penurunan jumlah pemotongan sapi;
 - masih terdapat beberapa pengusaha pemotong sapi (Jagal) melakukan pemotongan sapi diluar RPHR.
 - b. Retribusi penjualan hasil usaha daerah berupa Penjualan hasil *breeding farm* dengan realisasi sebesar Rp86.789.000,00 atau 71.74 persen dan target anggaran sebesar Rp120.983.000,00, hal ini dikarenakan:
 - pakan tidak tercukupi dari anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 10 bulan sehingga produksi tidak maksimal;
 - rasionalisasi anggaran (dampak *Covid-19*).



9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB di **Kecamatan Arut Selatan** realisasi sebesar Rp17.920.350,00 atau 11,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 hal ini terjadi karena adanya pembatasan kewenangan penerbitan IMB sesuai dengan Perbub Kobar No. 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat untuk melaksanakan penerbitan IMB dibawah 100 M dan tidak bertingkat selain itu dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi perekonomian masyarakat.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB di **Kecamatan Kumai** realisasi sebesar Rp1.709.400,00 atau 8,54 persen dari target anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 hal ini terjadi karena tahun 2020 terjadi penurunan tingkat perekonomian masyarakat karena adanya virus *Covid-19* sehingga kemampuan masyarakat untuk membangun perumahan dan mengurus IMB menurun dibandingkan Tahun 2019, ditambah lagi adanya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Penerbitan IMB di bawah 100m².
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB di **Kecamatan Kotawaringin Lama** realisasi sebesar Rp2.809.523,00 atau 28,09 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 hal ini terjadi karena tahun 2020 terjadi penurunan tingkat perekonomian masyarakat karena adanya virus *Covid-19* sehingga kemampuan masyarakat untuk membangun perumahan dan mengurus IMB menurun dibandingkan Tahun 2019, ditambah lagi adanya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Penerbitan IMB di bawah 100m².
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** realisasi sebesar Rp24.250.000,00 atau 25,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp93.500.400,00 hal ini terjadi karena:
 - a. tarif pendapatan (dalam hal ini retribusi pemakaian kekayaan daerah) belum ada penyesuaian kembali;
 - b. penyewaan Aula Bappeda bukan bertujuan untuk komersil. Penggunaan Aula lebih diutamakan untuk keperluan lingkup Bappeda dan keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga SKPD yang menggunakan Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat yang dalam DPA SKPD nya tidak dianggarkan Biaya Sewa Aula tidak dikenakan tarif sewa (tidak dipungut biaya sewa);
 - c. pihak swasta hanya diperbolehkan menggunakan/menyewa Aula Bappeda Kabupten Kotawaringin Barat diluar jam kerja/hari libur;
 - d. adanya larangan/pembatasan berkumpul/mengumpulkan orang banyak pada masa Pandemi *Covid-19*.



13. Badan Pendapatan Daerah

- a. Pajak Hotel realisasi sebesar Rp3.198.021.869,65 atau 94,06 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.400.000.000,00. Tidak tercapainya target ini karena masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Permasalahan pada pajak hotel adalah para pengelola hotel kurang cermat dalam melaporkan tingkat hunian sehingga yang dilaporkan dan dibayarkan pajaknya tidak sama persis dengan kondisi riil sebenarnya dan adanya dampak pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap kuantitas pengunjung tamu hotel, hasil yang dicapai sudah signifikan dengan upaya yang telah dilakukan;
- b. Pajak Hiburan realisasi sebesar Rp222.547.437,45 atau 63,58 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 karena tidak ada kegiatan hiburan, konser, dll disebabkan pandemi *Covid-19* sehingga adanya pelarangan kegiatan berkumpul/mengumpulkan massa Pandemi *Covid* berdampak pada jumlah pengunjung dan banyak tempat hiburan melakukan penutupan usahanya, dan juga perlu diupayakan/ditingkatkan kesadaran wajib pajak hiburan untuk melakukan penyetoran pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- c. Pajak Reklame realisasi sebesar Rp893.190.606,08 atau 38,83 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.300.000.000,00 karena beberapa data wajib pajak terjadi perubahan tanpa melaporkan ke Bapenda sehingga sulit untuk di tagih salah satunya adalah penggantian penyelenggara reklame/vendor /biro iklan dan juga beberapa potensi pajak reklame dari iklan rokok secara kwitansi mengalami penurunan objek data wajib pajak karena adanya regulasi pembatasan iklan rokok disamping itu Banyak potensi reklame terbuat dari kain/tidak permanen. Sehingga data hasil pendataan tidak dapat dilakukan penagihan karena bersifat tidak permanen dan pemilik reklame memilih untuk melepasnya daripada harus membayar pajak;
- d. Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp20.514.407.429,82 atau 93,25 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000.000,00 Karena adanya kendala yang dihadapi dari pemungutan penerimaan pajak penerangan jalan Non PLN dimana sesuai data yang ada bahwa sebagian wajib pajak belum menyampaikan laporan penggunaan listrik sebagai dasar di terbitkannya ketetapan pajak, juga adanya kebijakan pemerintah untuk stimulus pandemik *Covid- 19*;
- e. Pajak Parkir realisasi sebesar Rp159.238.200,00 atau 53,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Karena permasalahan target tidak tercapai karena terjadi penurunan pengunjung salah satu objek pajak berpengaruh pada besarnya pembayaran pajak parkir. Objek pajak parkir masih 3 lokasi yaitu Toserba Pelangi, KFC dan Hypermart. Adanya pandemi *Covid-19* ini membuat kunjungan parkir semakin berkurang. Untuk penambahan lokasi pajak parkir seperti di perbankan baru mulai berjalan di bulan November dan Desember;
- f. Pajak Air Tanah realisasi sebesar Rp34.645.723,00 atau 69,29 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Karena Potensi pajak air tanah mengalami penurunan karena banyak wajib pajak air tanah yang beralih



menggunakan air permukaan dan PDAM. Ketidakcermatan pengelola air tanah dalam melaporkan pajak air tanah yang harus dibayar, dan juga tidak adanya alat ukur debit air yang dipasang untuk mengetahui berapa banyak penggunaan air sehingga penggunaan air belum terawasi secara optimal. Perolehan dari sumber ini berdasarkan kesesuaian penggunaan dan perizinan yang diajukan oleh industri/perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga diperlukan pemuktahiran data potensial wajib pajak Air tanah;

- g. Pajak Sarang Burung Walet realisasi sebesar Rp1.267.236.400,00 atau 63,36 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Karena kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengidentifikasi keberadaan wajib pajak, pada saat transaksi jual beli, termasuk untuk mengetahui nilai transaksi serta rendahnya kesadaran pelaporan pembayaran pajak dari pengusaha walet;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp3.710.200.792,47,00 atau 74,20 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Hal ini dipengaruhi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana provinsi mengambil alih izin usaha pertambangan (IUP) dari kewenangan kabupaten, sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pemungutan pajaknya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wajib pajak menyatakan kesanggupannya membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan syarat perizinan mereka segera dapat diselesaikan. Penyebab lain adalah Zirkon berkurang perusahaannya dari awalnya 4 perusahaan, kini sisa 1 perusahaan.

Terdapat pula beberapa pendapatan yang **pencapaiannya melebihi 105 persen** dari target yang dianggarkan, antara lain yaitu:

1. Pada Tahun Anggaran 2020 **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** mengelola 1 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan mempunyai target pendapatan sebesar Rp208.906.600,00 dan realisasi sebesar Rp261.567.696,00 atau 125,20 persen, hal tersebut dikarenakan pendirian/beroperasinya menara telekomunikasi baru sebesar Rp1.892.308,00 serta pembayaran piutang tahun 2019 sebesar Rp45.317.262,00;
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di **Sekretariat Daerah** realisasi sebesar Rp86.000.000,00 atau 114,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 hal ini terjadi karena adanya pendataan ulang terhadap penghuni rumah dinas yang tercatat dalam KIB Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat;
3. Pada tahun 2020 Kantor **Kecamatan Pangkalan Lada** mengelola 1 jenis pendapatan dan realisasi baru mencapai 107,89 persen , antara lain : yaitu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan realisasi melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar Rp13.265.000,00. Hal ini tercapai berkat upaya Sosialisasi yang sinergi yang dilakukan pemerintah desa dan Kecamatan;



4. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan di **Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD)** terealisasi sebesar Rp434.412.438,00 atau 173,76 persen dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dari hasil penjualan aset daerah berupa penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat serta penjualan bahan-bahan bekas bangunan;
5. Pendapatan dari Pengembalian di **BPKAD** tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.991.700.705,53 atau 126,46 persen dari anggaran. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengembalian kelebihan belanja tahun 2019 yang dilakukan oleh SKPD dan baru disetorkan pada tahun 2020 dan adanya Restitusi atas kelebihan Setoran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
6. Pajak Restoran di **Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)** realisasi sebesar Rp2.661.000.389,70 atau 106,44 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 karena adanya penerimaan atas Piutang;
7. Pendapatan Denda Pajak di **Bapenda** realisasi sebesar Rp58.799.162,63 atau 125,30 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp46.925.000,00. Karena banyaknya transaksi penerimaan piutang sehingga berpengaruh terhadap Penerimaan Denda Pajak.

3.2.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target belanja

Jika dilihat lebih rinci terdapat belanja dari program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan (**pencapaian kurang dari 95 persen**), antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah terealisasi Rp1.227.496.000,00 atau 87,78 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.398.411.200,00 hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan berupa pembangunan perpustakaan SDN 1 Gandis;
- b. Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir terealisasi sebesar Rp124.679.500,00 atau 61,96 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp201.218.865,00 hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan penimbunan halaman SMPN 4 Arut selatan akibat banjir di mendawai seberang (*force majuer*);
- c. Hampir sebagian besar kegiatan yang kurang terealisasi 95 persen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebabkan oleh adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan bahkan sampai dibatalkan pelaksanaan kegiatannya akibat pandemi *Covid-19* dan karena Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam kategori zona merah penyebaran virus *Covid-19*.



2. Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan realisasi sebesar Rp332.515.210,00 atau sebesar 78,70 persen dari target anggaran sebesar Rp422.527.000,00 karena pembatasan mobilitas, Puskesmas mengambil obat dan bahan medis habis pakai sendiri bersamaan dengan logistik *Covid-19*;
- b. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi, Bimbingan teknis sarana prasarana kesehatan swasta realisasi sebesar Rp38.075.000,00 atau 47,10 persen dari target anggaran sebesar Rp80.839.000,00 karena Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan zona merah pandemi *Covid-19* sehingga tidak memungkinkan mengumpulkan orang banyak di satu tempat dan juga pengawasan fasilitas kesehatan ke lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan;
- c. Kegiatan Peningkatan Imunisasi realisasi sebesar Rp742.500.000,00 atau sebesar 78,19 persen dari target anggaran sebesar Rp949.660.750,00 karena semua kegiatan selalu kontak langsung dan sebagian masyarakat juga masih enggan datang ke posyandu walaupun sudah menggunakan protokol kesehatan dimasa pandemi sehingga target tidak bisa dicapai;
- d. Kegiatan Pembinaan UKBM realisasi sebesar Rp13.650.000,00 atau sebesar 53,15 persen dari target anggaran sebesar Rp25.680.000,00 disebabkan adanya anggaran DID tambahan pada akhir tahun pada saat terjadi kenaikan kasus *Covid-19* sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
- e. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat realisasi sebesar Rp167.540.950,00 atau sebesar 83,20 persen dari target anggaran sebesar Rp201.359.750,00 karena tidak ada keberangkatan Jemaah Haji sehingga belanja obat-obatan tidak dapat diserap, kebugaran anak sekolah tidak dapat dikerjakan terkendala *Covid-19* (sekolah libur).

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin

- a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang hanya mampu terealisasi sebesar Rp678.298.683,00 atau 65,98 persen dari total pagu sebesar Rp1.028.000.000,00 hal ini disebabkan oleh komposisi anggaran tersedia disiapkan untuk obat-obatan pasien kemitraan dan pelayanan kesehatan. Pada pelaksanaannya selama pandemi *Covid-19* lebih dibutuhkan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan, sementara anggaran untuk obat-obatan pasien kemitraan belum terserap seluruhnya.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan, realisasi sebesar Rp58.358.693,00 atau 75,79 persen dari anggaran sebesar Rp77.000.000,00 karena adanya penyebaran pandemi *Covid-19*, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan;
- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, realisasi sebesar Rp750.000,00 atau 75,00 persen dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00 karena adanya



penyebaran pandemi *Covid-19*, sehingga ada pembatasan personil yang melakukan perjalanan dinas.

5. Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat

- a. Kegiatan Pembangunan dan pengembangan prasarana dasar dan lingkungan kawasan permukiman realisasi sebesar Rp1.620.014.700,00 atau 94,12 persen dari target anggaran sebesar Rp1.721.254.208,00, hal ini dikarenakan pada kegiatan ini terdapat 1 paket pembangunan pagar makam yaitu pembangunan pagar makam Giri loyo yang tidak dilaksanakan karena masih berproses surat hibah dengan warga tanah, sehingga kegiatan fisik dan pengawasan tidak dapat dilanjutkan/dilaksanakan;
- b. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp19.329.000,00 atau 77,32 persen dari target anggaran sebesar Rp19.329.000,00 karena kondisi pandemi *Covid-19* mengakibatkan kegiatan bimtek perencanaan terkait SIPD dan P90 di Bandung untuk 1 orang tidak dapat dilaksanakan.

6. Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk:

- a. belanja modal pengadaan pompa pemadam kebakaran realisasi sebesar Rp2.245.000.000,00 atau 77,63% dari target sebesar Rp2.891.925.000,00 karena pada saat realisasi belanja Spesifikasi barang dan harga yang sesuai di DPA sudah tidak tersedia lagi barangnya, sehingga membeli barang dengan spesifikasi yang setara tetapi dengan harga yang lebih rendah (efisien);
- b. belanja modal pengadaan alat pemukul api realisasi sebesar Rp60.500.000 atau 76,83% dari target sebesar Rp78.750.000 karena adanya penawaran harga terendah dari penyedia barang dengan spesifikasi yang sama.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial di kalangan masyarakat realisasi anggaran di bawah target, realisasi Rp145.364.243,00 atau 83,37 persen dari target anggaran sebesar Rp174.370.000,00 terdapat pada belanja perjalanan dinas luar daerah dan realisasi Rp111.994.243,00 atau 79,43 persen dari target anggaran sebesar Rp141.000.000,00 karena dalam rangka kaji banding anggota FPK ke Jawa Timur tidak semua tokoh atau anggota FPK mengikuti kaji banding tersebut dari yang direncanakan.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun realisasi sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00 karena dampak dari pandemi *Covid-19* maka pegawai pensiun yang direncanakan pulang ke daerahnya di NTT tidak terlaksana;
- b. Kegiatan Kampanye Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Sekolah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggaran sebesar



Rp79.125.000,00 karena sasaran kegiatan adalah siswa/siswi sekolah dimana saat pandemi kegiatan tatap muka belajar mengajar ditiadakan;

- c. Kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan realisasi sebesar Rp793.598.000,00 atau 87,89 persen dari anggaran sebesar Rp902.846.400,00 karena turunnya kasus kebakaran hutan dan lahan selama Tahun 2020, intensitas curah hujan cukup tinggi untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan prosentase mencapai 92,55 persen;
- d. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja realisasi sebesar Rp39.938.300,00 atau 14,44 persen dari anggaran sebesar Rp276.500.000,00 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* kegiatan rapat dan perjalanan dinas dibatasi dan kegiatan diganti dengan sistem *virtual zoom meeting*.

9. Dinas Sosial

- a. Kegiatan Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial realisasi sebesar Rp85.924.000,00 atau 82,78 persen dari anggaran sebesar Rp103.787.500,00. Anggaran pada kegiatan ini disediakan dalam rangka peringatan HUT Kotawaringin barat dan Hari Pahlawan. Realisasi keuangan tidak mencapai target disebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya *Covid 19* antara lain Upacara Hari Pahlawan yang mana pada kegiatan ini telah dianggarkan untuk honorarium Komandan Upacara, Pembawa Acara dan Pengibar bendera serta kegiatan lainnya Pagelaran Musik, Snack pertemuan dan lainnya;
- b. Kegiatan Penanganan Masalah - masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Alam realisasi sebesar Rp20.599.700,00 atau 59,70 persen dari anggaran sebesar Rp34.500.000,000. Anggaran pada kegiatan ini dianggarkan untuk kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana, pengambilan bahan barang Bansos ke Palangka Raya serta pengantaran barang Bansos ke Daerah Bencana serta kegiatan Tagana dalam rangka mengikuti Jambore. Persentase capaian kegiatan ini dipengaruhi oleh Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Tagana mengikuti Jambore ke Palangka Raya yang tidak terlaksana karena kegiatan di provinsi tidak dilaksanakan dengan adanya *Covid 19*.

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Kegiatan Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial realisasi sebesar Rp21.728.700,00 atau 53,86 persen dari anggaran sebesar Rp40.339.050,00 karena pada tahun 2020 tidak ada perselisihan HI yang perlu dimediasi oleh Propinsi. Kasus yang ditangani melalui Tripartit Cukup/selesai di Dinas, dan anggaran ini dimaksudkan bilamana kasus/PHI pengaduan tidak harus diselesaikan dan harus mendatangkan mediator dari Provinsi.



11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Kegiatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi pada Keluarga Miskin terealisasi sebesar Rp95.308.000,00 atau 51,88 persen dari target anggaran sebesar Rp183.724.000,00 realisasi ini disebabkan pendistribusian alokon KB tidak dapat dilaksanakan maksimal karena ketersediaan Alokon KB pada Faskes KB dan mitra kerja *stock* cukup sampai akhir tahun serta biaya komponen belanja pada kegiatan ini adalah belanja sewa mobil, sedangkan lokasi faskes dan mitra kerja berada di dalam kota Pangkalan Bun sehingga belanja sewa mobil tidak direalisasikan;
- b. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu realisasi sebesar Rp00,00 terealisasi sebesar 00,00 persen dari target anggaran sebesar Rp16.868.800,00, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena sasaran kegiatan adalah pelajar, sedangkan selama pandemi semua siswa belajar di rumah secara daring untuk mencegah penularan *Covid-19* selama pandemi, apabila kegiatan pelatihan dilaksanakan secara virtual dinilai kurang efektif dan anggaranpun tidak dapat terserap karena komponen belanja yang tersedia adalah transport peserta dan makan minum;
- c. Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB anggaran Rp16.517.000,00 terealisasi Rp22.717.000,00 atau 72,71 persen saja hal ini dikarenakan dari target pertemuan kelompok kerja di 19 kampung KB baru dapat dilaksanakan 14 kampung KB, karena kendala *Covid-19* dan bencana banjir di Kecamatan Arut Utara;
- d. Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Penyuluhan KB anggaran Rp202.480.000,00 terealisasi Rp30.011.650,00 atau 24,70 persen saja hal ini dikarenakan dari target pertemuan kelompok kerja kampung KB 30 kali kegiatan hanya terlaksana 16 kali kegiatan. Selain hal tersebut kegiatan advokasi ini membentuk pertemuan dan harus mengumpulkan orang banyak sehingga sulit dilaksanakan karena pandemi *Covid-19* dan Kobar masuk dalam Zona Merah;
- e. Kegiatan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana anggaran Rp230.800.000,00 terealisasi Rp273.475.000,00 atau 84,40 persen saja hal ini dikarenakan dari target pertemuan kelompok kerja kampung KB 4 kali kegiatan hanya dilaksanakan 2 kali kegiatan karena pandemi *Covid-19*.

12. Dinas Ketahanan Pangan

- a. Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah realisasi sebesar Rp10.500.000,00 atau 57,53 persen dari target anggaran sebesar Rp18.250.000,00, disebabkan over kapasitas gudang BULOG serta belum ada intruksi dari Pemerintah Daerah untuk menyalurkan stok beras cadangan pangan daerah, masih dari SKPD lain yang menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak wabah *Covid-19*;



- b. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi Rp9.763.000,00 atau 34,26 persen dari target anggaran sebesar Rp25.500.000,00. Hal ini disebabkan oleh pembatalan penyelenggaraan kegiatan Bimtek oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* sehingga anggaran tidak terealisasi;
- c. Kegiatan diversifikasi pangan dan pengembangan pangan pokok lokal realisasi sebesar Rp728.759.238,00 atau 92,87 persen dari target anggaran sebesar Rp784.671.800,00 karena efisiensi (nilai pesanan dan kontrak) pengadaan dan ada beberapa bibit tanaman yang tidak memenuhi syarat siap salur (terlalu kecil dan tidak sehat).

13. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan Penanganan Pengaduan Kasus Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp2.123.000,00 atau 55,14 persen dari target anggaran sebesar Rp3.850.000,00 karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membiayai pengambilan dan pengujian sampel dibandingkan kasus pengaduan yang ditangani;
- b. Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan realisasi sebesar Rp363.671.000,00 atau 71,00 persen dari target anggaran sebesar Rp512.239.000,00 karena kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah tidak terlaksana;
- c. Kegiatan Perencanaan Strategi Dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan realisasi sebesar Rp282.810.000,00 atau 94,27 persen dari target anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dikarenakan dalam proses seleksi jasa konsultasi perencanaan, peserta seleksi menawarkan paket pekerjaan tersebut lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp17.190.000,00.

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kegiatan Pengembangan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu realisasi sebesar Rp120.585.800,00 atau 94,54 persen dari anggaran sebesar Rp127.543.000,00 karena biaya honorarium tenaga honorer/tidak tetap yang tidak dapat direalisasikan berhubung adanya 1 (satu) orang tenaga honorer bersangkutan cuti bersalin;
- b. Kegiatan Kerjasama dan Pameran Pembangunan Bidang Kependudukan realisasi sebesar Rp68.185.000,00 atau 80,55 persen dari anggaran sebesar Rp84.647.904,00 karena adanya biaya perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan berhubung rekening belanja yang digunakan adalah belanja perjalanan dinas luar daerah tetapi pelaksanaannya/pekerjaannya menggunakan perjalanan dinas dalam daerah.



15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Desa realisasi sebesar Rp17.765.000,00 atau 71,09 persen dari anggaran sebesar Rp24.990.000,00 kurangnya maksimal penyerapan Anggaran karena kebijakan untuk mencegah meningkatnya *Covid-19* sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan melalui rapat - rapat tatap muka dirubah menjadi rapat melalui *virtual* dan *zoom meeting*;
- b. Kegiatan Pendataan Indeks Desa Membangun realisasi sebesar Rp86.235.850,00 atau 85,00 persen dari anggaran sebesar Rp101.459.900,00 karena adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi IDM untuk belanja makan minum sosialisasi dan pemberian bantuan transportasi untuk PLD, PDP dan PDIT diberikan sesuai dengan cluster kegiatan berdasarkan desa dan kecamatan, sedangkan Honorarium Narasumber Esselon II tidak diserap karena adanya tugas luar daerah;
- c. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga realisasi sebesar Rp472.713.939,00 atau 93,22 persen dari anggaran sebesar Rp507.114.682,00 karena terdapat anggaran belanja cetak yang tidak terealisasi. Program Kegiatan yang terjadwal dibatalkan mengingat meningkatnya Pandemi *Covid-19*, juga disebabkan keluarnya Surat Edaran Bupati tentang pembatasan perjalanan dinas karena meningkatnya *Covid-19*.

16. Dinas Perhubungan

- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional realisasi sebesar Rp186.247.723,00 atau 68,20 persen dari anggaran sebesar Rp273.100.000,00 karena untuk kendaraan operasional bus sekolah tidak beroperasi karena adanya pandemi *Covid-19* anak-anak sekolah belajar di rumah dan untuk pemeliharaan AC, genset dan mesin potong rumput menyesuaikan kebutuhan;
- b. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp17.572.329,00 atau 75,74 persen dari anggaran sebesar Rp23.200.000,00 karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan bimtek tidak dilaksanakan;
- c. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan realisasi sebesar Rp185.045.000,00 atau 85,87 persen dari anggaran sebesar Rp215.500.000,00 karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan penertiban (razia kendaraan bermotor) dikurangi.

17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- a. Belanja Hosting pada Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp4.869.100,00 atau 0,00 persen, merupakan belanja sewa hosting untuk nama domain *kotawaringinbaratkab.go.id* tidak



terrealisasi karena telah dialihkan ke pusat data nasional yang dikelola oleh Kementerian Kominfo RI pada 25 Desember 2020 dimana sebelumnya berada di hosting pihak ketiga (swasta) dan masih menggunakan IP luar negeri. Sesuai ketentuan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015, maka semua hosting aplikasi Pemerintah harus menggunakan IP dalam negeri. Selain itu, pemindahan hosting domain ke Pusat Data Nasional juga merupakan upaya meningkatkan jaminan pengamanan keamanan data hosting dari aksi *deface*/penyusupan yang sering terjadi ketika menggunakan hosting pihak ketiga;

- b. Belanja Jasa Lisensi di Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp43.000.000,00 atau 0,00 persen karena server dedicated yang akan diinstall lisensi telah terisi aplikasi-aplikasi terbaru yang dibangun oleh tim developer dan juga aplikasi milik OPD lain yang mulai digunakan tahun 2020. Belanja Lisensi terdiri dari lisensi *web builder* dan lisensi *web host* manajemen yang hanya dapat diinstall pada server *production* dalam kondisi fresh instalasi (server kosong dan belum terisi aplikasi-aplikasi berbasis web).

18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kegiatan peningkatan kelembagaan koperasi realisasi sebesar Rp31.418.100,00 atau 79,52 persen dari target anggaran sebesar Rp39.509.500,00. Hal ini dikarenakan adanya biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak terealisasi seluruhnya karena adanya pembatalan perjalanan dinas dalam rangka perekrutan narasumber ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, serta terjadinya peningkatan pandemi *Covid-19* di Jakarta, pemberlakuan PSBB dan WFH di Jakarta;
- b. Kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah realisasi sebesar Rp356.016.400,00 atau 85,30 persen dari target anggaran sebesar Rp417.358.000,00. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen UMKM angkatan III dan IV yang seharusnya dilaksanakan di Aula Hotel dialihkan ke Aula Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga adanya penghematan biaya sewa aula;
- c. Kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan tera/tera ulang unit metrologi legal realisasi sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari target anggaran sebesar Rp855.115.000,00. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dan pengadaan alat ukur tera tidak dapat dilakukan. Pengadaan terkendala Surat dari Kementerian Keuangan No. S-128/PK/2020 tentang Penghentian Proses pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA. 2020 tanggal 27 Maret 2020 dimana batas akhir input kontrak pada aplikasi Omspam pada tanggal 28 Maret 2020 sedangkan alokasi DAK Perubahan 2020 Bidang Pasar baru diterbitkan pada tanggal 16 April 2020 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.



19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal dan pemberian insentif investasi untuk belanja Sewa Rumah/Gedung dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 dikarenakan untuk sewa Gedung tidak digunakan dari pihak ketiga, akan tetapi memanfaatkan gedung pemerintah. Belanja Transportasi/Akomodasi pihak ketiga dengan realisasi sebesar Rp3.882.300,00 atau 72,97 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.320.000,00 dikarenakan biaya narasumber hanya dipergunakan 1 hari dari anggaran yang tersedia untuk 2 hari sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp1.437.700,00;
- b. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan BUMD dengan realisasi sebesar Rp14.358.649,00 atau 26,1 persen dari target yang dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00 dikarenakan pelaksanaan kegiatan evaluasi keuangan terhadap PD Agrotama Mandiri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah baru terlaksana pada bulan Desember 2020 dan jumlah anggota Tim yang semula dianggarkan berjumlah 7 Orang, tetapi Surat Tugas dari BPKP hanya 2 Orang (1 Ketua Tim dan 1 Anggota), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp40.641.351,00.

20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pembinaan organisasi lembaga kepemudaan realisasi Rp1.800.000,00 atau 7,63 persen dari anggaran sebesar Rp23.600.000,00 akibat tidak adanya legalitas ketetapan kepengurusan KNPI terpilih yang belum dilantik sampai sekarang. Sehingga SK staff sekretariat tidak bisa dikeluarkan dan menyebabkan tidak adanya staff kepengurusan KNPI maka upah kerja pada kegiatan organisasi lembaga kepemudaan tidak bisa dicairkan;
- b. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (*Fun Bike*) realisasi Rp96.960.000,00 atau 85,65 persen dari anggaran sebesar Rp113.210.065,00 karena keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga kegiatan pada (*Fun Bike*) belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak bisa semua terlaksana dan terserap dikarenakan wabah *Covid-19*;
- c. Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat Daerah realisasi Rp1.138.424.876,00 atau 90,58 persen dari anggaran sebesar Rp1.300.934.925,00 karena anggaran yang sudah dialokasikan untuk mengikuti event di tingkat daerah tahun 2020 batal diselenggarakan karena wabah *Covid-19* berdasarkan surat edaran dari Kemenpora RI untuk membatalkan seluruh agenda olahraga tahun 2020.

21. Dinas Perpustakaan

- a. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi sebesar Rp1.875.000,00 atau 62,50 persen dari target anggaran Rp3.000.000,00 dikarenakan sesuai dengan musim pandemi *corona* yang tidak boleh mengumpulkan orang banyak/kerumunan.



22. Dinas Perikanan

- a. Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah realisasi sebesar Rp97.298.338,00 atau 66,91 persen dari anggaran sebesar Rp145.400.000,00 karena adanya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat perihal tidak diperkenankannya untuk melakukan kegiatan keluar Pangkalan Bun akibat meningkatnya dampak pandemi *Covid-19* dan undangan kegiatan rapat koordinasi di luar Pangkalan Bun menggunakan *virtual zoom*.

23. Dinas Pariwisata

- a. Kegiatan Pembinaan Event Kreativitas realisasi sebesar Rp440.305.000,00 atau 78,43 persen dari anggaran sebesar Rp561.389.200,00 hal tersebut karena kegiatan Festival Teluk Kumai dengan nilai Rp100.000.000,00 dan kegiatan Festival Kelapa Sabuai dengan nilai Rp19.667.200,00 yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020 tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk dilaksanakan dari Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Kotawaringin Barat melalui surat Nomor 440/543/Pem.2020 tanggal 11 Desember 2020, mengacu pada Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan pada masa pademi *Covid-19*;
- b. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata realisasi sebesar Rp43.255.000,00 atau 85,34 persen dari anggaran sebesar Rp50.680.000,00 hal tersebut karena sulitnya menyesuaikan jadwal anggota Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi tempat usaha wisata aman *Covid-19* lintas dinas di bulan Desember 2020 sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena beberapa anggota tim dari dinas lain tidak bisa hadir (berbenturan dengan jadwal kegiatan pada dinas masing-masing).

24. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- a. Program Peningkatan Produksi Tanaman pangan, pada Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan terealisasi sebesar Rp245.956.500,00 atau 92,65 persen dari target anggaran sebesar Rp265.467.500,00 dikarenakan pada lahan penangkaran benih padi di Balai Benih Tanaman Pangan Tanjung Terantang terjadi kebanjiran seluas 3 ha, sehingga belanja upah kerja pada kegiatan pemeliharaan padi, panen, penjemuran dan packing benih tidak direalisasikan;
- b. Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hortikultura terealisasi sebesar Rp26.250.000,0 atau 47,89 persen dari target anggaran sebesar Rp54.804.500,0 dikarenakan pada kegiatan demplot penangkaran Bawang Merah tidak dilaksanakan dan sudah terakomodir di kegiatan APBN tambahan langsung dari Dirjen Horti yaitu budidaya Bawang Merah dengan biji (TSS) dimana model seperti ini sama dengan penangkaran serta pendampingan dilakukan oleh produsen benih dan petugas BPSB Provinsi.



25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak realisasi sebesar Rp141.361.810,00 atau 85,26 persen dari target anggaran sebesar Rp165.806.800,00. Sehubungan dengan pandemi *Covid-19* keterbatasan mobilitas, balai veteriner Banjarbaru melimpahkan kegiatan pengambilan sampel/*specimen* untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Uji Laboratorium terhadap sampel/*specimen* tersebut dilakukan dibalai veteriner Banjarbaru dan hasilnya akan diinformasikan dan biaya pengiriman ditanggung oleh balai *veteriner* Banjarbaru sehingga Dinas tidak perlu mengeluarkan biaya untuk uji dan pengiriman sampel tersebut;
- b. Kegiatan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan realisasi sebesar Rp84.424.750,00 atau 89,18 persen dari target anggaran sebesar Rp94.664.500,00 karena kejadian pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan status tanggap darurat bencana non alam pandemi *Covid-19* berdampak terhadap pembatasan kegiatan pengambilan sampel/*specimen* bahan asal ternak karena kegiatan tersebut dilakukan ditempat-tempat umum/pasar;
- c. Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia realisasi sebesar Rp690.731.850,00 atau 86,92 persen dari target anggaran sebesar Rp794.717.750,00 karena kegiatan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga mengalami perubahan jumlah sasaran kelompok penerima, hibah pengembangan ayam, atas dasar pertimbangan kegagalan proses LPSE tahap I dan II, jangka waktu pelaksanaan tersisa kurang lebih 1 bulan efektif, lokasi titik bagi yang tersebar dan jauh jangkauannya, berkas administrasi kelompok yang belum melengkapi persyaratan hibah;
- d. Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong dan Komoditas Unggulan Peternakan realisasi sebesar Rp41.913.628,00 atau 80,68 persen dari target anggaran sebesar Rp51.950.000,00 karena efisiensi keuangan dan merupakan barang import dimana harga mengalami kenaikan dan mengikuti harga dolar serta adanya pandemi *Covid-19* perjalanan dinas terbatas dilaksanakan terlebih lagi saat personil DPKH terkonfirmasi positif *Covid-19* sehingga mengurangi kontak dengan masyarakat dan sebagian tidak direalisasikan.

26. Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD realisasi sebesar Rp40.136.870,00 atau 50,17 persen dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00 hal ini dikarenakan sampai dengan bulan Desember 2020, Bupati Kotawaringin Barat tidak mengagendakan jadwal untuk melakukan *medical check up*;
- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan realisasi sebesar Rp27.737.786,00 atau 93,79 persen dari anggaran sebesar Rp29.573.200,00 disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan rapat oleh



Provinsi Kalteng, sehingga kegiatan rekonsiliasi data TEPRa dengan Provinsi dilakukan melalui daring. Hal tersebut menyebabkan anggaran perjalanan dinas tidak terserap sesuai dengan rencana;

- c. Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat realisasi sebesar Rp360.885.000,00 atau 68,21 persen dari anggaran sebesar Rp529.104.000,00 karena dengan adanya penyesuaian kegiatan secara selektif oleh pimpinan, sehingga kegiatan rutin pada bulan puasa dan lebaran tidak dapat dilaksanakan dalam masa pandemi *Covid-19*;
- d. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri realisasi sebesar Rp66.147.700,00 atau 88,22 persen dari anggaran sebesar Rp74.979.000,00 hal ini dikarenakan minimnya penerimaan kunjungan tamu daerah dalam kondisi *Covid-19*;
- e. Kegiatan Pelayanan, Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan realisasi sebesar Rp1.992.236.007,00 atau 90,96 persen dari anggaran sebesar Rp2.190.143.750,00 karena terdapat belanja uang kontribusi MTQ disetor kembali akibat batalnya kegiatan MTQ Tingkat Provinsi senilai Rp150.000.000,00;
- f. Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah realisasi sebesar Rp59.987.036,00 atau 90,22 persen dari anggaran sebesar Rp66.489.606,00 karena kegiatan sosialisasi kebijakan Sakip Tahun Anggaran 2020 secara tatap muka tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi *Covid-19*, dan kegiatan melalui *zoom meeting* masih belum memperoleh jadwal dari narasumber Kemenpan RB.

27. Sekretariat Dewan

- a. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Realisasi Rp130.957.650,00 atau 61,7 persen dari target anggaran Rp212.245.000,00 karena pelaksanaan kegiatan rapat-rapat lebih banyak dilaksanakan secara *virtual* demi meminimalisir menyebarnya virus *Covid-19*;
- b. Kegiatan Reses Realisasi Rp250.959.526,00 atau 75,08 persen dari target anggaran Rp334.250.000,00 karena kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak tidak dapat dilaksanakan sehubungan merebaknya wabah *Covid-19* untuk meminimalisir menyebarnya virus *Covid-19*;
- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD realisasi sebesar Rp3.410.578.690,00 atau 73,35 persen dari target anggaran Rp4.650.000.000,00 karena adanya wabah *Covid-19* dan sebagian besar daerah di luar kota memberlakukan aturan PSBB sehingga membatasi wilayah kunjung pelaksanaan kegiatan.

28. Inspektorat

- a. Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada Wilayah I realisasi Rp25.682.200,00 atau 69,75 persen dari anggaran sebesar



- Rp36.822.250,00 karena pada tahun 2020 ada 5 (lima) SKPD yang semula akan didampingi dan dievaluasi akan tetapi karena faktor penugasan dan karena kondisi alam, Kecamatan Kotawaringin Lama tidak menjadi sample;
- b. Kegiatan penanganan kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya pada Wilayah I realisasi Rp38.700.000,00 atau 78,90 persen dari anggaran sebesar Rp49.050.000,00 karena anggaran untuk pemberian keterangan saksi ahli tidak terealisasi karena tidak ada permintaan dari APH (Sidang biasanya dilakukan di Palangka Raya);
 - c. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada Wil. I realisasi sebesar Rp344.935.000,00 atau 82,64 persen dari anggaran sebesar Rp417.400.000,00 karena pengurangan jumlah jabatan fungsional pengawasan untuk penugasan-penugasan lain sehubungan adanya pandemi *Covid-19* kegiatan mandatory terhadap APIP dan permintaan pelaksanaan pengawasan koordinasi dengan APH sehubungan mandatori perjanjian PEMDA dengan APH terkait;
 - d. Kegiatan pengendalian Manajemen pelaksanaan kegiatan KDH pada Wil. III realisasi sebesar Rp60.778.299,00 atau 52,54 persen dari anggaran sebesar Rp115.670.000,00 karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga FGD yang direncanakan pada bulan April 2020 baru dilaksanakan di akhir November 2020. Pelaksanaan FGD di akhir tahun menyebabkan pendampingan penyusunan *risk register* tidak dapat diselesaikan, karena adanya kerjasama dengan bidang pengawasan tata kelola pemerintah daerah dengan BPKP Pusat maka beban biaya kegiatan ditanggung bersama.
 - e. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada Wil. IV realisasi sebesar Rp247.878.500,00 atau 93,83 persen dari anggaran sebesar Rp264.183.500,00 dikarenakan permintaan untuk dilakukan audit untuk anggaran BTT masuk pada akhir desember 2020 sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan audit tersebut pada tahun 2020 mengingat jangka waktu pelaksanaan yang pendek;
 - f. Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan realisasi sebesar Rp82.806.123,00 atau 47,75 persen dari anggaran sebesar Rp173.399.950,00. Kegiatan ini tidak terserap sepenuhnya karena kondisi pandemi *Covid-19* tetapi tetap dilaksanakan via zoom meeting. Anggaran tetap dialokasikan tetapi sampai dengan akhir 2020 kepastian kegiatan Rakernas dan Rakordal dari penyelenggara (BPK RI dan Irjen Kemendagri) belum diperoleh.

29. Kecamatan Arut Selatan

- a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) realisasi belanja sebesar Rp3.799.500,00 atau 75,99 persen dari target anggaran sebesar Rp5.000.000,00 karena Pembatasan dan penundaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama masa pandemi *Covid-19* untuk menekan penyebaran virus selain itu selama pandemi *Covid-19* kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi lebih banyak menggunakan *video conference*;



- b. Sarana dan prasarana Kelurahan realisasi belanja sebesar Rp3.732.924.549,00 atau 82,68 persen dari target anggaran sebesar Rp4.514.653.300,00 karena terjadi permasalahan nonteknis seperti faktor alam (banjir di Kelurahan Raja Seberang dan Mendawai Seberang) sehingga menghambat sarana dan prasarana di Kelurahan.

30. Kecamatan Arut Utara

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik realisasinya sebesar Rp35.721.087,00 atau 90,07 persen dari target yang dianggarkan sebesar Rp39.660.000,00 hal ini menyesuaikan dengan tagihan rekening pembayaran setiap bulannya;
- b. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional realisasinya sebesar Rp2.333.800,00 atau 66,68 persen dari target Rp3.500.000,00 hal ini menyesuaikan dengan Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor.

31. Kecamatan Kumai

- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi realisasi sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari target anggaran sebesar Rp125.000.000,00 karena belum dicapainya kesepakatan antara Pihak Kumai Hulu dengan Kelompok Masyarakat, serta waktu pengerjaan dan kondisi cuaca yang tidak menentu (sering hujan) sehingga mengakibatkan anggaran tidak dapat terserap;
- b. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa realisasi sebesar Rp3.900.000,00 atau 15,86 persen dari target anggaran sebesar Rp24.587.000,00 karena untuk menghindari dan mencegah penyebaran *Covid-19*, maka segala bentuk kegiatan Pelatihan/Sosialisasi yang pada umumnya mengumpulkan orang banyak dibatasi;
- c. Hampir semua kegiatan yang terealisasi kurang dari 95 persen pada Kecamatan Kumai disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan untuk menghindari dan mencegah penyebaran virus *Covid-19*.

32. Kecamatan Kotawaringin Lama

- a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi sebesar Rp7.720.000,00 atau 77,27 persen dari anggaran sebesar Rp9.990.000,00 hal ini di sebabkan oleh wabah pandemi *Covid-19*, yang membatasi ruang gerak dalam melaksanakan pembinaan secara langsung ke desa-desa, sehingga anggaran perjalanan dinas tidak terserap maksimal;
- b. Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan realisasi sebesar Rp294.370.000,00 atau 93,63 persen dari anggaran sebesar Rp314.385.000,00, hal ini dikarenakan pada beberapa pos belanja yakni pengadaan perlengkapan Gedung PAUD Kelurahan Kotawaringin Hilir dapat dilaksanakan efisiensi pengadaan dengan mengadakan



barang tetap sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan, namun dengan harga satuan yang lebih rendah dari yang dianggarkan.

33. Kecamatan Pangkalan Lada

- a. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Alokasi Pagu anggaran sebesar R72.650.000,00. Kegiatan berupa Belanja Makan Minum Rapat, Pendampingan kegiatan Musrenbang Desa, Pembinaan Penyusunan APBDes serta Fasilitasi Lomba Lomba, dengan realisasi sebesar Rp65.400.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar 90,02 persen, karena kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan serta beberapa kegiatan lomba ditunda karena adanya Pandemi *Covid-19*;
- b. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat dengan Pagu Alokasi anggaran 2020 sebesar Rp23.700.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp21.200.000,00 atau 89,45 persen, hal ini terjadi karena beberapa kegiatan tidak terserap untuk belanja perjalanan dinas karena tidak terlaksananya kegiatan, antara lain kegiatan Pawai Nasi Adab, Peringatan HUT Kotawaringin Barat.

34. Kecamatan Pangkalan Banteng

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik realisasi sebesar Rp56.117.894,00 atau 86,44 persen dari target anggaran sebesar Rp64.920.000,00 karena realisasi menyesuaikan dari tagihan yang ada;
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional realisasi sebesar Rp2.065.000,00 atau 75,57 persen dari target anggaran sebesar Rp2.732.680,00 dikarenakan realisasi menyesuaikan dari tagihan jumlah pembayaran Pajak STNK.

35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah realisasi sebesar Rp67.608.900,00 atau 92,49 persen dari anggaran sebesar Rp73.095.500,00 karena pada belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat direalisasikan secara maksimal sehubungan dengan adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan untuk membatasi jumlah peserta pertemuan/rapat tatap muka serta pada belanja uang lembur Non PNS tidak terserap secara maksimal dikarenakan adanya salah satu pegawai Non PNS tidak dapat melaksanakan lembur dikarenakan cuti melahirkan;
- b. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata realisasi sebesar Rp37.291.250,00 atau 91,09 persen dari anggaran sebesar Rp40.937.150,00 karena pada belanja makanan dan minuman rapat pada masa pandemi *Covid-19* dilaksakan secara virtual demikian juga koordinasi ke Provinsi dilakukan secara virtual sehingga penyerapan anggaran belanja perjalanan dinas tidak maksimal.

36. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



- a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah hanya terealisasi sebesar Rp197.298.177,00 atau 43,01 persen dari yang dianggarkan dikarenakan belanja pensertifikatan tanah yang tidak terserap, karena keterbatasan personil tenaga ukur pada BPN. Usulan sudah diajukan tetapi belum dapat dilakukan pengukuran;
- b. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah hanya terserap sebesar Rp213.333.427,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan karena honorarium tidak terserap karena setiap pekerjaan sudah dibebankan pada TPP. Selain itu untuk belanja makan dan minum dan untuk honorarium tenaga ahli eselon III dari Kabupaten hanya hanya menghadirkan 1 orang;
- c. Monitoring dan Evaluasi Aset/Barang Milik Daerah hanya terserap sebesar Rp20.115.032,00 atau 67,05 persen dari yang dianggarkan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan inventarisasi BMD karena keterbatasan waktu dan personil.

37. Badan Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak Daerah realisasi sebesar Rp125.194.400,00 atau 82,06 persen dari target sebesar Rp153.790.000,00 karena:
 - anggaran untuk Honorarium Tenaga Kontrak tidak terealisasi 1 bulan karena ada 1 tenaga kontrak yang cuti melahirkan;
 - anggaran untuk belanja sewa Gedung kantor/tempat sebesar Rp23.760.000,00 belum terealisasi karena sampai saat ini belum ada keputusan dari pihak unit penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Iskandar dan pihak Pangkalan TNI AU Iskandar dimana masing-masing pihak mengenakan sewa sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan berdasarkan hasil Konsultasi dengan BPK di Palangka Raya sewa hanya boleh dibayarkan untuk 1 (satu) pihak saja.
- b. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Lainnya realisasi sebesar Rp231.449.400,00 atau 86,87 persen dari target anggaran sebesar Rp266.430.900,00 karena Anggaran untuk Honorarium *Tim legal Konsulting* sebesar Rp33.900.000,00 tidak direalisasikan karena dalam pelaksanaan penagihan tidak ada kendala sehingga tidak perlu melibatkan *Tim Legal Consulting*;
- c. Kegiatan Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah realisasi sebesar Rp245.338.100,00 atau 87,13 persen dari target anggaran sebesar Rp281.593.000,00 karena:
 - upah kerja petugas Pembuatan Peta Digital Desa hanya terealisasi 50,32 persen dikarenakan kurang maksimalnya pempdampingan petugas di lapangan karena adanya pandemi *Covid-19* yang membuat petugas desa membatasi pertemuan pemutakhiran data dengan warga;
 - hasil pengembangan persil pembuatan peta digital merupakan data valid dan akurat yang ada di lapangan dan realisasi keuangan mengikuti jumlah objek pajak yang ada di lapangan;



- belanja bahan pelatihan/sosialisasi terealisasi sebesar 40 persen dikarenakan adanya kebijakan pembatasan kegiatan sosialisasi dan juga pembatasan jumlah peserta sosialisasi;
- belanja makanan dan minuman rapat terealisasi hanya sebesar 44 persen dikarenakan adanya kebijakan pembatasan kegiatan rapat-rapat dan juga pembatasan jumlah peserta rapat karena *Covid-19*.

38. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Penjurangan Karir

- Anggaran terealisasi 91,36 persen dikarenakan anggaran untuk honorarium Non PNS dan tenaga ahli PNS dianggarkan Rp1.500.000,00 untuk semua panitia (karena belum diketahui apakah panitia berasal dari honorarium non PNS atau tenaga ahli) akan tetapi dalam proses pembayaran menyesuaikan dengan yang tertuang pada SK;
- Rencana kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural yang seharusnya direncanakan/diadakan pada akhir bulan Desember tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Pandemi *Covid-19* yang semakin parah dan tidak bisa dikendalikan.

b. Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat

Anggaran terealisasi 83,86 persen dikarenakan bahwa sebagian besar porsi anggaran pada kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat adalah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, yang mana anggaran tersebut diperuntukan untuk pengurusan proses usul kenaikan pangkat PNS, peningkatan pendidikan/pencantuman gelar dan penyesuaian masa kerja PNS. Dikarenakan adanya penyebaran kasus *Covid-19* yang cenderung meningkat sampai dengan akhir tahun sehingga berakibat pada diterapkannya pembatasan aktivitas fisik (*Physical Distancing*) dalam pelayanan publik/tatap muka di instansi yang mengelola kepegawaian, sehingga pelayanan pengurusan kepegawaian hanya dilayani melalui jaringan telepon/zoom dan penyampaian berkas dilakukan menggunakan jasa pengiriman;

c. Pemberian Penghargaan Bagi ASN Berprestasi

Anggaran tidak terealisasi 0,00 persen dikarenakan untuk tahun 2020 pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi diberikan terhadap PNS yang telah mengabdikan dalam jangka waktu tertentu yaitu berupa pemberian piagam Satyalencana kepada 103 orang PNS, akan tetapi sampai dengan akhir Desember 2020 belum terbit Keputusan Presiden tentang Pemberian Satyalencana bagi PNS Kotawaringin Barat;

d. Kegiatan Seleksi Penetapan Tugas Belajar/ Ijin Belajar dan Kerjasama Aparatur Seleksi penetapan Tugas Belajar/Ijin Belajar dan Kerjasama Aparatur realisasi 90,42 persen dikarenakan anggaran untuk bantuan penelitian bagi PNS Tugas Belajar tidak bisa diserap karena adanya Pandemi *Covid-19*, sehingga belum bisa



melaksanakan penelitian dan bantuan biaya wisuda yang telah dianggarkan tidak dapat diserap maksimal dikarenakan wisuda dilaksanakan secara online.

39. PPKD

a. Belanja Hibah

- Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dari alokasi anggaran sebesar Rp1.375.000.000,00 terealisasi sebesar Rp773.500.000,00 atau 56,25 persen, dikarenakan beberapa badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 tidak mengajukan permohonan pencairan serta beberapa tidak menyampaikan pertanggungjawaban penyaluran hibah tahap sebelumnya sehingga hibah tahap selanjutnya tidak dapat disalurkan;
- Belanja Hibah BOP PAUD dari alokasi anggaran sebesar Rp5.268.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.705.800.000,00 atau 89,32 persen. Belanja hibah BOP PAUD merupakan pengalokasian belanja bantuan pendidikan anak usia dini untuk satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD. Penyaluran hibah BOP PAUD berdasarkan atas jumlah peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas untuk masing-masing satuan PAUD yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahap I (Periode Januari s.d. Juni 2020) Tahun Anggaran 2020 serta Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahap II (Periode Juli s.d Desember 2020) Tahun Anggaran 2020.

b. Belanja Bantuan Sosial

Dari total alokasi anggaran belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.225.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.093.000.000,00 atau 73,21 persen, hal tersebut dipengaruhi oleh akumulasi realisasi belanja pada:

- Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat untuk program PAMSIMAS dari alokasi anggaran sebesar Rp245.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.245.000.000,00 atau 100%;
- Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat dari alokasi anggaran sebesar Rp3.980.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.848.000.000,00 atau 71,56 persen. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat merupakan pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial untuk:
 - 1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebesar Rp455.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp127.000.000,00 atau 27,91 persen. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya merupakan penyediaan anggaran untuk kebutuhan akibat resiko sosial



yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar, sehingga realisasi tergantung dari permohonan masyarakat;

- 2) Bantuan Sosial untuk Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi sebesar Rp750.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp504.000.000,00 atau sebesar 67,20 persen. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Strata Satu (S1) Tidak Mampu Yang Berprestasi Tahun 2020 hanya terdapat 224 (dua ratus dua puluh empat) mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Mahasiswa Strata Satu (S1) Tidak Mampu Yang Berprestasi Tahun 2020 melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Strata Satu (S1) Tidak Mampu yang Berprestasi Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Yang Berprestasi bahwa besaran bantuan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi sebesar Rp2.250.000,00 untuk masing-masing penerima;
 - 3) Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat terdampak Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 yang bersumber dari DID Tambahan Periode I sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.632.000.000,00 atau 90,67 persen;
 - 4) Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 yang bersumber dari DID Tambahan Periode II sebesar Rp975.000.000,00 terealisasi sebesar Rp585.000.000,00 atau 60 persen.
- c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Dari total alokasi anggaran belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.989.815.000,00 terealisasi sebesar Rp7.740.424.700,00 atau 86,10 persen, hal tersebut dipengaruhi oleh:

- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp7.359.367.000,00 terealisasi sebesar Rp6.502.448.300,00 atau 88,36 persen;
- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.630.448.000,00 terealisasi sebesar Rp1.237.976.400,00 atau 75,93 persen.

Hal tersebut dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa, bahwa penyaluran Dana Bagi



Hasil Pajak dan Retribusi Daerah triwulan IV berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa triwulan IV menggunakan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 14 Desember 2020. Dimana jika terdapat penerimaan pajak dan retribusi Daerah setelah tanggal tersebut akan diperhitungkan sebagai kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang akan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Dari total alokasi anggaran belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp151.644.301.200,00 terealisasi sebesar Rp7.740.424.700,00 atau 98,63 persen.

e. Belanja Tidak Terduga

Dari total alokasi anggaran belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp65.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp49.260.669.634,36 atau 75,79 persen, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga sangat dipengaruhi oleh kejadian atau keadaan darurat dan mendesak serta ada atau tidaknya pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2020.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Perubahan Kebijakan Akuntansi tersebut meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi Investasi
- b. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- c. Kebijakan Akuntansi Penyusutan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi di Pemerintah Daerah disebut SKPD dan yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing - masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal



ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

4.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan - laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 meliputi 41 (empat puluh satu) SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni: 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 1 DPRD, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 PPKD, 6 Badan, 21 Dinas, 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 6 Kecamatan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11. Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan ini.



Proses penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan Laporan Keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian (*adjustment*) yang perlu dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian**”.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi artinya, ada aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*);
- c. Pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh Pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah



penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. diterbitkan SP2D LS;
- b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset diukur pada saat:

- a. kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.



Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- b. PD Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahtera
- c. PT Bank Kalteng
- d. PT Jamkrida

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.



Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

4.3.7 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.



a. Klasifikasi Penyajian

Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk.

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

2) Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya; dan (c) Penyertaan Modal.

3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Penerimaan Pinjaman; (b) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (c) Penerimaan Kembali Pinjaman.

Arus keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman.

4) Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan



Pembiayaan Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Kiriman/Transfer Uang.

PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

b. Metode Penyajian

Entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan cara:

1) Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.

2) Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset NonKeuangan dan Pembiayaan.

Terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempergunakan **metode langsung** dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan metode langsung ini:

- menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi Arus Kas di masa yang akan datang;
- lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:



a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

1) Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

2) Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%



3) Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%

4) Piutang Karena Perikatan Perjanjian

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

c. *Pengakuan Belanja Modal*

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

d. *Pengakuan Belanja Pemeliharaan*

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan;
- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang);
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
- Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*.



Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*).

e. *Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap*

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti: teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll;
- d. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

f. *Penyusutan Aset Tetap*

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$



Pengakuan Peyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2015 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual, proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya. Sedangkan untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2015 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

g. *Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi*

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Penjelasan lebih rinci mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.458.882.254.748,00	1.449.011.596.895,94	1.357.377.147.401,90

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.449.011.596.895,94 atau tercapai 99,32% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.458.882.254.748,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp1.357.377.147.401,90.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
218.652.378.511,00	224.651.929.841,28	170.185.828.808,34

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp224.651.929.841,28 atau tercapai 102,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp218.652.378.511,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp170.185.828.808,34.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

dasar hukum dari pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
69.400.000.000,00	64.838.822.752,80	51.527.738.156,10

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp64.838.822.752,80 atau tercapai 93,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp69.400.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp51.527.738.156,10. Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain:

Tabel 5.1
Rincian Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Pajak Hotel	3.400.000.000,00	3.198.021.869,65	1.746.031.352,05
2	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.661.000.389,70	3.583.169.641,72
3	Pajak Hiburan	350.000.000,00	222.547.437,45	491.097.987,36
4	Pajak Reklame	2.300.000.000,00	893.190.606,08	975.260.740,57
5	Pajak Penerangan Jalan	22.000.000.000,00	20.514.407.429,82	18.968.134.783,00
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	159.238.200,00	170.350.800,00
7	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	34.645.723,00	42.071.293,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000.000,00	1.267.236.400,00	1.033.186.750,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	3.710.200.792,47	3.553.339.175,40
10	Pajak Bumi dan Bangunan	10.500.000.000,00	10.343.460.735,63	7.408.549.023,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21.000.000.000,00	21.834.873.169,00	13.556.546.610,00
Jumlah		69.400.000.000,00	64.838.822.752,80	51.527.738.156,10



2) Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
15.042.143.800,00	13.208.556.926,00	13.532.547.717,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.208.556.926,00 atau tercapai 87,81% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.042.143.800,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp13.532.547.717,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Dinas Kesehatan	3.394.718.000,00	3.895.206.633,00	4.176.370.571,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.359.088.000,00	3.694.176.633,00	4.176.370.571,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.630.000,00	201.030.000,00	-
2	RSUD Sultan Imanuddin	-	-	79.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	79.200.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.800.000.000,00	1.262.808.450,00	1.959.781.350,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000.000,00	1.262.808.450,00	1.959.781.350,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	216.000.000,00	358.230.000,00	-
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	216.000.000,00	358.230.000,00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	160.000.000,00	183.077.566,00	190.146.500,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	90.000.000,00	101.419.066,00	116.461.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	81.658.500,00	73.685.500,00
6	Dinas Perhubungan	3.354.000.000,00	2.459.747.600,00	2.107.824.050,00
	Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	648.305.000,00	708.630.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	836.809.000,00	637.005.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	650.080.400,00	537.500.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	350.000.000,00	324.253.200,00	223.939.050,00
	Retribusi Izin Trayek	4.000.000,00	300.000,00	750.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.134.417.000,00	1.713.484.150,00	2.394.858.975,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	2.100.000.000,00	1.664.492.950,00	2.342.508.225,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	34.417.000,00	48.991.200,00	52.350.750,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.000.000.000,00	1.797.727.848,00	1.248.703.187,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.797.727.848,00	1.238.143.187,00
	Retribusi Izin Gangguan	-	-	10.560.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
9	Dinas Perikanan	511.317.000,00	434.199.000,00	290.212.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	140.800.000,00	106.300.000,00	106.450.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	369.017.000,00	326.399.000,00	180.462.000,00
	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.500.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00
10	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	391.651.000,00	442.382.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000.000,00	391.651.000,00	442.382.000,00
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	60.000.000,00	45.000.000,00	70.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	60.000.000,00	45.000.000,00	70.000.000,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	250.983.000,00	186.839.000,00	168.092.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	130.000.000,00	100.050.000,00	121.850.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	120.983.000,00	86.789.000,00	46.242.000,00
13	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	86.000.000,00	98.275.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	86.000.000,00	98.275.000,00
14	Kecamatan Arut Selatan	150.000.000,00	17.920.350,00	42.822.815,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	17.920.350,00	42.822.815,00
15	Kecamatan Arut Utara	1.000.000,00	1.029.620,00	1.511.536,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	1.029.620,00	1.511.536,00
16	Kecamatan Kumai	20.000.000,00	1.709.400,00	24.024.840,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	1.709.400,00	24.024.840,00
17	Kecamatan Kotawaringin Lama	10.000.000,00	2.809.523,00	6.324.550,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	2.809.523,00	6.324.550,00
18	Kecamatan Pangkalan Lada	13.265.000,00	14.312.670,00	12.753.160,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	13.265.000,00	14.312.670,00	12.753.160,00
19	Kecamatan Pangkalan Banteng	31.536.800,00	31.186.420,00	10.983.350,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	21.750.000,00	10.983.350,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	31.536.800,00	9.436.420,00	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	93.500.400,00	24.250.000,00	65.192.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	93.500.400,00	24.250.000,00	65.192.500,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.500.000,00	5.700.000,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000,00	5.700.000,00	-
22	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	208.906.600,00	261.567.696,00	126.689.333,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	208.906.600,00	261.567.696,00	126.689.333,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	50.000.000,00	34.100.000,00	16.400.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	34.100.000,00	16.400.000,00
Jumlah		15.042.143.800,00	13.208.556.926,00	13.532.547.717,00



3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
9.804.364.000,00	9.804.364.851,00	8.941.166.757,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.804.364.851,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.804.364.000,00. Pendapatan ini berasal dari bagian laba Tahun 2020 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp9.327.140.787,00 dan PD BPR Marunting Sejahtera sebesar Rp477.224.064,00.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
124.405.870.711,00	136.800.185.311,48	96.184.376.178,24

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp136.800.185.311,48 atau tercapai 109,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp124.405.870.711,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp96.184.376.178,24. Rincian Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Dinas Kesehatan	7.296.149.400,00	7.007.136.500,00	7.071.951.951,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.296.149.400,00	6.993.686.500,00	7.071.951.951,00
	Pendapatan Lainnya	-	250.000,00	-
	Pendapatan Hasil Sewa BMD	-	13.200.000,00	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	112.131.085.680,00	121.455.203.754,25	79.691.880.765,43
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	110.000.000.000,00	121.036.356.911,25	79.533.219.173,43
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.131.085.680,00	214.338.343,00	158.661.592,00
	Pendapatan Hasil Sewa BMD	-	204.508.500,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	2.338.000,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	2.338.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
4	Dinas Ketahanan Pangan	31.912.000,00	47.995.500,00	18.115.963,00
	Penjualan Pasar Pangan Murah	-	-	18.115.963,00
	(PAD Lainnya)	31.912.000,00	47.995.500,00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	69.000,00	337.488,00	76.680,00
	Pendapatan Denda Retribusi	69.000,00	337.488,00	20.680,00
	Pendapatan Lainnya	-	-	56.000,00
6	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	115.800.000,00	469.700,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.000.000,00	900.000,00	469.700,00
	Pendapatan Lainnya	-	101.400.000,00	-
	Pendapatan Hasil Sewa BMD	-	13.500.000,00	-
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.202.000,00	1.398.468,00	4.014.573,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	4.202.000,00	1.398.468,00	4.014.573,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.000.000,00	10.141.587,96	24.452.938,52
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000,00	10.141.587,96	24.452.938,52
9	Kecamatan Arut Selatan	-	-	254.202,00
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	201.302,00
	Pendapatan Lainnya	-	-	52.900,00
10	Kecamatan Kumai	-	-	201.398,40
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	201.398,40
11	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	510.180,00
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	510.180,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.873.527.631,00	7.813.589.762,27	9.257.572.822,65
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	434.412.438,00	615.716.595,00
	Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.378.998.594,01	2.648.420.916,00
	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	2.617.547.707,00	4.516.116.452,00
	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	11.354.000,00	14.605.252,50	-
	Denda Bidang Lainnya	37.226.000,00	330.892.616,23	185.723.963,55
	Pendapatan dari Pengembalian	1.574.947.631,00	1.991.700.705,53	1.234.431.498,59
	Pendapatan Lainnya	-	45.432.449,00	49.424.397,51
Hasil Sewa Barang Milik Daerah	-	-	7.739.000,00	
13	Badan Pendapatan Daerah	46.925.000,00	348.582.251,00	112.537.004,24
	Pendapatan Denda Pajak	46.925.000,00	348.559.871,00	112.467.004,24
	Pendapatan Lainnya	-	22.380,00	70.000,00
Jumlah		124.405.870.711,00	136.800.185.311,48	96.184.376.178,24



5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.193.659.476.237,00	1.186.742.690.871,07	1.149.743.873.849,22

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.186.742.690.871,07 atau tercapai 99,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.193.659.476.237,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp1.149.743.873.849,22. Rincian Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Transfer

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	PENDAPATAN TRANSFER - DANA PERIMBANGAN	970.418.165.237,00	958.924.263.043,00	961.791.162.166,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	40.858.610.000,00	29.764.009.462,00	57.921.302.247,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	30.417.965.000,00	34.619.424.857,00	38.813.631.459,00
	Dana Alokasi Umum	604.341.284.000,00	602.446.484.000,00	670.997.942.000,00
	Dana Alokasi Khusus	294.800.306.237,00	292.094.344.724,00	194.058.286.460,00
2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	163.349.329.000,00	163.174.967.600,00	106.059.541.400,00
	Dana Penyesuaian	163.349.329.000,00	163.174.967.600,00	106.059.541.400,00
3	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	59.491.982.000,00	64.243.460.228,07	81.343.170.283,22
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.491.982.000,00	64.243.460.228,07	81.343.170.283,22
4	BANTUAN KEUANGAN	400.000.000,00	400.000.000,00	550.000.000,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	550.000.000,00
Jumlah		1.193.659.476.237,00	1.186.742.690.871,07	1.149.743.873.849,22

1) Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
970.418.165.237,00	958.924.263.043,00	961.791.162.166,00

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp958.924.263.043,00 atau tercapai 98,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp970.418.165.237,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp961.791.162.166,00.



a. Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
40.858.610.000,00	29.764.009.462,00	57.921.302.247,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp29.764.009.462,00 atau tercapai 72,85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.858.610.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp57.921.302.247,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.5
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020	2020	2019
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	27.953.332.000,00	15.863.455.057,00	49.193.195.373,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21	12.905.278.000,00	13.877.247.354,00	8.279.027.400,00
3	Bagi hasil Pajak Cukai Tembakau	-	23.307.051,00	449.079.474,00
Jumlah		40.858.610.000,00	29.764.009.462,00	57.921.302.247,00

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
30.417.965.000,00	34.619.424.857,00	38.813.631.459,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp34.619.424.857,00 atau tercapai 113,81% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.417.965.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp38.813.631.459,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.6
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020	2020	2019
1	IIUPH-IHPH	-	-	247.200.000,00
2	Provisi Sumber Daya Hutan	8.339.200.000,00	4.976.851.700,00	3.379.131.531,00
3	Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	-	-	172.593.565,00
4	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	34.393.950.213,00
5	Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	590.155.800,00



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
6	Pertambangan Minyak Bumi	1.285.000,00	1.193.800,00	4.457.750,00
7	Pertambangan Gas Bumi	22.949.000,00	22.691.200,00	26.142.600,00
8	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	20.636.170.000,00	28.830.411.868,00	-
Jumlah		30.417.967.020,00	34.619.424.857,00	38.813.633.478,00

c. Dana Alokasi Umum

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
604.341.284.000,00	602.446.484.000,00	670.997.942.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp602.446.484.000,00 atau tercapai 99,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp604.341.284.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp670.997.942.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
294.800.306.237,00	292.094.344.724,00	194.058.286.460,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp292.094.344.724,00 atau tercapai 99,08% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp294.800.306.237,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp194.058.286.460,00.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
163.349.329.000,00	163.174.967.600,00	106.059.541.400,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan penerimaan Dana Penyesuaian sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp163.174.967.600,00 atau tercapai 99,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp163.349.329.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp106.059.541.400,00.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
59.491.982.000,00	64.243.460.228,07	81.343.170.283,22



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp64.243.460.228,07 atau tercapai 107,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp59.491.982.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp81.343.170.283,22.

4) Bantuan Keuangan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
400.000.000,00	400.000.000,00	550.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan merupakan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp400.000.000,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp550.000.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
46.570.400.000,00	37.616.976.183,59	37.447.444.744,34

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan pendapatan selain PAD dan Transfer sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp37.616.976.183,59 atau tercapai 80,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp46.570.400.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp37.447.444.744,34. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Pendapatan Hibah Pemerintah-LRA	3.000.000.000,00	1.999.999.980,00	37.062.444.744,34
	PPKD	3.000.000.000,00	-	3.309.000.000,00
	BLUD	-	1.999.999.980,00	-
2	Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.150.400.000,00	35.161.976.203,59	33.753.444.744,34
3	Sumbangan Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	420.000.000,00	455.000.000,00	385.000.000,00
	Sektor Perindustrian	420.000.000,00	455.000.000,00	385.000.000,00
Jumlah		46.570.400.000,00	37.616.976.183,59	37.447.444.744,34



Pendapatan lainnya terealisasi sebesar Rp455.000.000,00 merupakan pendapatan sektor perindustrian yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari Sumbangan Pihak Ketiga Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri di Tahun 2020.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.371.694.796.548,00	1.285.167.321.840,80	1.231.618.091.575,60

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.285.167.321.840,80 atau tercapai 93,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.371.694.796.548,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp1.231.618.091.575,60. Penjelasan mengenai Belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Belanja Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		2020			2019
1	Belanja Operasi	917.810.205.330,98	858.901.457.730,67	93,58	873.780.401.338,31
2	Belanja Modal	388.884.591.217,02	377.005.194.475,77	96,95	357.837.690.237,29
3	Belanja Tidak Terduga	65.000.000.000,00	49.260.669.634,36	75,79	-
Jumlah		1.371.694.796.548,00	1.285.167.321.840,80	93,69	1.231.618.091.575,60

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membiayai operasional pemerintahan.

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
917.810.205.330,98	858.901.457.730,67	873.780.401.338,31

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp858.901.457.730,67 atau tercapai 93,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp917.810.205.330,98 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp873.780.401.338,31. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel 5.9.



Tabel 5.9
Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2019
		2020			
1	Belanja Pegawai	473.467.818.828,00	441.025.705.448,00	95,29	482.596.403.755,50
2	Belanja Barang dan Jasa	431.601.916.502,98	407.431.358.282,67	92,05	381.938.443.234,81
3	Belanja Bunga	-	-	-	280.000.007,00
4	Belanja Hibah	8.515.470.000,00	7.351.394.000,00	86,33	7.804.054.341,00
5	Belanja Bantuan Sosial	4.225.000.000,00	3.093.000.000,00	73,21	1.161.500.000,00
Jumlah		917.810.205.330,98	858.901.457.730,67	93,58	873.780.401.338,31

1) Belanja Pegawai

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
462.511.455.160,00	441.025.705.448,00	482.596.403.755,50

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp441.025.705.448,00 atau tercapai 95,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp462.511.455.160,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp482.596.403.755,50. Belanja Pegawai tahun 2020 dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta uang lembur, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.10
Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2019
		2020			
1	Gaji dan Tunjangan	340.239.279.350,00	327.430.633.069,00	96,24	331.845.590.105,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	116.159.919.400,00	107.867.945.977,00	92,86	138.670.626.165,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	100,00	4.380.000.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	900.000.000,00	796.570.796,00	88,51	170.425.885,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	290.000.000,00	38.819.606,00	13,39	11.498.468,00
6	Uang Lembur	542.256.410,00	511.736.000,00	94,37	978.404.094,00
7	Belanja Pegawai Lainnya	-	-	-	6.539.859.038,50
Jumlah		462.511.455.160,00	441.025.705.448,00	95,35	482.596.403.755,50



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
442.558.280.170,98	407.431.358.282,67	381.938.443.234,81

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp407.431.358.282,67 atau tercapai 92,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp442.558.280.170,98 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp381.938.443.234,81. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.11
Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2019
		2020			
1	Honorarium PNS	698.050.000,00	606.000.000,00	86,81	1.936.907.500,00
2	Honorarium Non PNS	78.774.416.955,00	75.615.351.046,00	95,99	72.109.023.478,72
3	Belanja Pegawai Lainnya	74.830.086.982,00	70.258.184.814,07	93,89	25.779.083.993,82
4	Belanja Bahan Pakai Habis	28.582.715.399,00	26.608.087.737,12	93,09	23.879.533.616,22
5	Belanja Bahan/Material	4.272.609.650,00	4.052.123.782,00	94,84	8.630.378.558,00
6	Belanja Jasa Kantor	16.946.750.574,00	14.867.150.227,00	87,73	15.595.632.273,67
7	Belanja Premi/luran Asuransi	10.851.452.876,00	10.573.517.827,28	97,44	6.802.569.682,60
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.447.700.950,00	2.142.411.570,00	87,53	1.975.791.790,00
9	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.137.249.421,00	6.515.123.006,00	91,28	12.012.494.720,00
10	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	708.560.000,00	579.395.000,00	81,77	1.604.864.728,00
11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	334.750.000,00	297.876.000,00	88,98	1.444.725.000,00
12	Belanja Sewa Alat Berat	1.505.000.000,00	1.461.021.100,00	97,08	1.637.608.500,00
13	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	302.450.000,00	256.515.000,00	84,81	1.416.777.500,00
14	Belanja Makanan dan Minuman	8.926.670.500,00	7.264.872.400,00	81,38	14.676.927.756,00
15	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	202.720.000,00	189.095.000,00	93,28	1.921.804.450,00
16	Belanja Pakaian Kerja	859.852.000,00	835.102.000,00	97,12	1.027.041.091,00
17	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.192.546.570,00	5.142.831.175,00	99,04	5.341.216.070,00
18	Belanja Perjalanan Dinas	38.440.123.548,00	31.356.823.243,00	81,57	55.913.183.227,00
19	Belanja Pemulangan Pegawai	34.620.000,00	9.620.000,00	27,79	-
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	394.665.000,00	355.885.000,00	90,17	615.679.000,00
21	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.248.097.000,00	1.026.026.218,00	82,21	4.464.589.896,00
22	Belanja Jasa Konsultansi	4.318.806.964,00	3.527.157.120,00	81,67	9.718.627.637,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2019
		2020			
23	Belanja Jasa Profesi	3.166.081.546,00	2.545.107.678,00	80,39	5.824.384.500,00
24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	499.700.000,00	490.200.000,00	98,10	-
25	Belanja Barang yang akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.176.282.144,00	41.072.493.350,00	97,38	-
26	Belanja kontribusi kepada lembaga/asosiasi/organisasi	160.000.000,00	10.000.000,00	6,25	204.700.000,00
27	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.286.205.770,00	5.531.864.980,00	88,00	7.187.472.702,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	53.526.500,00
29	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	135.600.000,00	134.567.900,00	99,24	405.136.050,00
30	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.639.588.387,00	1.499.255.850,00	91,44	1.594.561.490,00
31	Belanja Pemeliharaan Meubelair	-	-	-	52.404.500,00
32	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur	5.300.000,00	5.000.000,00	94,34	12.800.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	71.236.000,00	54.800.000,00	76,93	68.865.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Telekomunikasi	55.450.000,00	55.425.000,00	99,95	20.900.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	249.823.000,00	215.167.500,00	86,13	591.149.900,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	88.750.050,00	47.870.280,00	53,94	-
37	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jalan	4.447.341.333,00	4.444.836.832,50	99,94	6.998.958.944,00
38	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jembatan	721.537.000,00	719.927.000,00	99,78	595.429.500,00
39	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	5.088.907.300,00	5.017.058.100,00	98,59	9.745.102.225,00
40	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	551.000.000,00	550.997.100,00	100,00	983.827.850,00
41	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	67.897.600,00	67.791.100,00	99,84	107.090.400,00
42	Belanja pemeliharaan mesin pembangkit	90.000.000,00	88.957.000,00	98,84	3.095.000,00
43	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan	1.548.398.201,00	1.531.758.147,00	98,93	3.491.712.073,00
44	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	503.500,00
45	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pertanian	59.000.000,00	57.500.000,00	97,46	750.000,00
46	Belanja Barang Operasional	972.685.482,00	926.844.200,00	95,29	1.733.857.860,00
47	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	73.894.738.300,98	66.075.676.046,70	89,42	73.751.754.772,78
48	Belanja Pemeliharaan Peralatan Bengkel	-	-	-	1.500.000,00



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2019
		2020			
49	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	4.500.000,00
50	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat berpenghasilan rendah	2.607.500.000,00	2.607.500.000,00	100,00	-
51	Insentif Bagi Tenaga Kesehatan	10.956.363.668,00	10.131.590.953,00	92,47	-
Jumlah		442.558.280.170,98	407.431.358.282,67	92,06	381.938.443.234,81

3) Belanja Bunga

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
0,00	0,00	280.000.007,00

Tidak terdapat realisasi Belanja Bunga sampai dengan 31 Desember 2020, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp280.000.007,00.

4) Belanja Hibah

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
8.515.470.000,00	7.351.394.000,00	7.804.054.341,00

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.351.394.000,00 atau tercapai 86,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.515.470.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.804.054.341,00. Belanja Hibah tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2019
		2020			
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	113.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi Kemasyarakatan	1.375.000.000,00	773.500.000,00	56,25	2.207.650.000,00
3	Belanja Hibah BOP PAUD	5.268.000.000,00	4.705.524.000,00	89,32	4.710.354.341,00
4	Belanja Hibah BOP Kesetaraan	572.150.000,00	572.050.000,00	99,98	773.050.000,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.300.320.000,00	1.300.320.000,00	100,00	-
Jumlah		8.515.470.000,00	7.351.394.000,00	86,33	7.804.054.341,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

a. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.375.000.000,00	773.500.000,00	2.207.650.000,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan tahun anggaran 2020 mencapai Rp773.500.000,00 atau 56,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.375.000.000,00. Rincian Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.13
Rincian Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

(dalam rupiah)

No.	Penerima	Uraian Belanja	Nilai
1	Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Barat	Program dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020	150.000.000,00
2	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat	Program dan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020	50.000.000,00
3	Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Kotawaringin Barat	Program dan Kegiatan Palang Merah Indonesia Kotawaringin Barat Tahun 2020	297.500.000,00
4	Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin Kabupaten Kotawaringin Barat	Program dan Kegiatan Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020	150.000.000,00
5	Pengurus Musholla Darul Mustaqim Desa Sungai Melawen	Pembangunan Musholla Darul Mustaqim Desa Sungai Melawen	18.000.000,00
6	Pengurus Masjid Al Wahid Desa Sungai Melawen	Pembangunan Masjid Al Wahid Desa Sungai Melawen	27.000.000,00
7	Dewan Pengurus Kesejahteraan Musholla Darul Iman Desa Sungai Melawen	Pembangunan Musholla Darul Iman Desa Sungai Melawen	18.000.000,00
8	Pengurus Musholla Al-Ikhlas Desa Sungai Melawen	Pembangunan Musholla Al-Ikhlas Desa Sungai Melawen	18.000.000,00
9	Dewan Pengurus Kesejahteraan Musholla Hidayatullah Desa Sungai Melawen	Pembangunan Musholla Hidayatullah Desa Sungai Melawen	18.000.000,00
10	Pengurus Masjid Baburroyan Desa Karang Sari	Pembangunan Masjid Baburroyan Desa Karang Sari	27.000.000,00
Jumlah			773.500.000,00

b. Belanja Hibah BOP PAUD

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
5.268.000.000,00	4.705.524.000,00	4.710.354.341,00

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD tahun anggaran 2020 mencapai Rp4.705.524.000,00 atau 89,32% dari anggaran yang



ditetapkan sebesar Rp5.268.000.000,00. Rincian Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang disalurkan ke beberapa sekolah selama tahun 2020 dapat dilihat pada **lampiran 5.1**.

c. Belanja Hibah BOP Kesetaraan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
572.150.000,00	572.050.000,00	773.050.000,00

Realisasi Belanja Hibah BOP Kesetaraan tahun anggaran 2020 mencapai Rp572.050.000,00 atau 99,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp572.150.000,00. Rincian Belanja Hibah BOP Kesetaraan selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14
Rincian Belanja Hibah BOP Kesetaraan

(dalam rupiah)

No.	Penerima	Uraian Belanja	Nilai
1	PKBM. ENTER	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	72.750.000,00
2	PKBM. SABILUR ROSYAD	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	70.800.000,00
3	PKBM. AR RAUDHAH	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	62.850.000,00
4	PKBM. WICAKSANA	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	35.100.000,00
5	PKBM. PERMATA	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	60.050.000,00
6	PKBM. PUTERA PERANTAU	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	135.500.000,00
7	PKBM. NIDAUL FITRAH	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	135.000.000,00
Jumlah			572.050.000,00

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.300.320.000,00	1.300.320.000,00	0,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp1.300.320.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.300.320.000,00. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.15.



Tabel 5.15
Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja	Nilai
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	187.550.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	274.150.000,00
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar	302.480.000,00
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	66.440.000,00
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem	131.570.000,00
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	84.420.000,00
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	76.720.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	61.800.000,00
9	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	65.030.000,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Partai Berkarya	50.160.000,00
Jumlah		1.300.320.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah pada khususnya.

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
4.225.000.000,00	3.093.000.000,00	1.161.500.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.093.000.000,00 atau tercapai 73,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.225.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp1.161.500.000,00. Di bawah ini adalah rincian Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2020:

Tabel 5.16
Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja	Nilai
1	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	245.000.000,00
	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2020	245.000.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2.848.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
	Bantuan Sosial bagi Masyarakat terdampak Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 yang bersumber dari DID Tambahan Periode I sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 455/KEP.KA/DINSOS/2020	1.632.000.000,00



No.	Uraian Belanja	Nilai
	Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam rangka Penanganan Dampak <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 yang bersumber dari DID Tambahan Periode II sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 476/KEP.KA/DINSOS/2020	585.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak ringan	3.500.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak ringan	3.500.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
	Penyaluran Bantuan Sosial untuk Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu Tahun 2020 sebanyak 224 Mahasiswa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2020 a.n. Khairullah, dkk.	504.000.000,00
	Bantuan korban bencana kebakaran rumah rusak hancur	15.000.000,00
Jumlah		3.093.000.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
388.884.591.217,02	377.005.194.475,77	357.837.690.237,29

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp377.005.194.475,77 atau tercapai 96,95% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp388.884.591.217,02 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp357.837.690.237,29.

1) Belanja Modal Tanah

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
676.000.000,00	415.506.760,00	346.517.905,00

Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp415.506.760,00 atau tercapai 61,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp676.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp346.517.905,00. Rincian Belanja Modal Tanah di beberapa SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2019
		2020		
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	147.779.500,00	-
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	210.000.000,00	199.682.000,00	-
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	316.000.000,00	68.045.260,00	346.517.905,00
Jumlah		676.000.000,00	415.506.760,00	346.517.905,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
105.888.795.985,02	97.622.948.332,00	54.893.662.839,22

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp97.622.948.332,00 atau tercapai 92,19% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp105.888.795.985,02 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp54.893.662.839,22. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.18
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.602.902.791,02	21.854.442.735,00	11.767.511.070,56
2	Dinas Kesehatan	26.354.792.147,00	24.189.022.002,00	2.967.397.025,82
3	RSUD Sultan Imanuddin	21.669.895.900,00	21.358.449.964,00	16.126.254.562,84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.056.014.440,00	5.055.496.500,00	474.191.749,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	118.277.000,00	117.788.000,00	13.340.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.767.190.700,00	7.074.290.420,00	296.152.100,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	55.950.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.434.096.900,00	6.327.591.900,00	3.819.503.427,00
9	Dinas Sosial	294.800.000,00	294.605.000,00	246.380.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38.800.000,00	38.800.000,00	96.742.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	990.363.100,00	988.106.100,00	316.577.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	43.500.000,00	42.450.000,00	54.515.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.370.246,00	1.875.025.000,00	554.944.087,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	545.192.100,00	529.202.850,00	449.263.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37.604.600,00	35.425.000,00	25.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	319.772.320,00	310.506.200,00	917.825.765,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	492.903.200,00	492.903.200,00	4.050.507.090,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.665.915.000,00	801.061.000,00	340.559.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	175.831.000,00	175.831.000,00	178.262.850,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	712.353.500,00	695.646.700,00	60.842.100,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	97.863.750,00	96.584.000,00	1.047.735.150,00
22	Dinas Perikanan	-	-	141.260.700,00
23	Dinas Pariwisata	216.402.800,00	213.152.000,00	58.696.000,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	218.664.000,00	217.431.500,00	1.136.243.500,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38.134.600,00	30.613.300,00	146.234.550,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
26	Sekretariat Daerah	318.227.000,00	318.227.000,00	1.809.563.250,00
27	Sekretariat DPRD	768.055.940,00	762.628.000,00	2.182.965.500,00
28	Inspektorat Kabupaten	265.900.000,00	265.550.000,00	193.000.000,00
29	Kecamatan Arut Selatan	1.950.341.025,00	1.713.829.000,00	1.762.542.100,00
30	Kecamatan Arut Utara	42.208.986,00	42.208.986,00	123.600.000,00
31	Kecamatan Kumai	516.965.747,00	503.498.000,00	1.297.126.146,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	507.596.050,00	485.270.000,00	441.310.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	43.986.800,00	43.986.800,00	92.402.000,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	51.500.000,00	51.500.000,00	123.325.500,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	108.180.200,00	105.825.000,00	471.935.366,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	175.006.643,00	172.821.675,00	610.745.750,00
37	Badan Pendapatan Daerah	224.765.000,00	221.090.000,00	275.829.000,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	124.422.500,00	122.089.500,00	167.430.000,00
Jumlah		105.888.795.985,02	97.622.948.332,00	54.893.662.839,22

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
145.668.507.461,00	143.482.401.078,77	132.223.414.395,24

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp143.482.401.078,77 atau tercapai 98,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp145.668.507.461,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terelisasi sebesar Rp132.223.414.395,24. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.325.223.565,00	17.982.936.852,00	25.493.325.519,25
2	Dinas Kesehatan	49.925.098.365,00	49.133.974.039,00	8.588.338.442,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	35.453.383.100,00	35.435.724.106,00	36.943.778.175,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.160.125.094,00	19.157.722.493,92	31.843.240.200,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.112.107.500,00	1.011.531.700,00	647.001.600,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	-	303.485.402,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00	99.300.000,00	228.194.500,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	677.043.950,00	452.265.100,00	2.317.366.695,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020	2020	2019
9	Dinas Sosial	-	-	105.201.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	761.050.000,00	630.919.900,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	238.733.604,00	237.289.100,00	54.526.010,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	25.938.000,00	25.645.000,00	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	269.783.000,00	125.271.000,00	15.100.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.735.100,00	127.038.300,00	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	62.197.950,00
16	Dinas Perhubungan	469.200.000,00	456.751.810,00	3.173.355.674,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14.399.000,00	14.399.000,00	398.431.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.651.419.000,00	6.604.254.000,00	4.569.455.859,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.900.000,00	3.870.000,00	205.758.200,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.190.477.800,00	1.184.413.300,00	248.206.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	99.300.000,00
22	Dinas Perikanan	2.480.580.500,00	2.480.580.500,00	727.349.280,56
23	Dinas Pariwisata	1.142.590.000,00	819.128.200,00	3.688.446.340,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	85.761.000,00	80.000.900,00	1.379.679.000,00
25	Sekretariat Daerah	4.524.850.411,00	4.524.647.000,00	7.290.650.093,86
26	Sekretariat DPRD	456.007.250,00	454.149.134,85	474.236.988,57
27	Inspektorat Kabupaten	-	-	163.359.950,00
28	Kecamatan Arut Selatan	146.159.700,00	133.292.471,00	-
29	Kecamatan Arut Utara	-	-	119.490.000,00
30	Kecamatan Kumai	183.358.472,00	183.184.422,00	9.830.620,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	1.845.783.050,00	1.827.718.250,00	1.510.728.900,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	29.634.541,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	-	185.100.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	800.281.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	205.300.000,00	204.253.000,00	221.201.225,00
36	Badan Pendapatan Daerah	-	-	102.314.630,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	92.500.000,00	92.141.500,00	224.849.600,00
Jumlah		145.668.507.461,00	143.482.401.078,77	132.223.414.395,24

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
126.304.922.625,00	125.882.549.773,00	154.912.088.124,43

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp125.882.549.773,00 atau tercapai 99,67% dari anggaran yang telah ditetapkan



sebesar Rp126.304.922.625,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp154.912.088.124,43. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.20
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	119.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	942.700.000,00	138.227.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	199.580.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.226.430.842,00	121.104.164.827,00	153.001.201.124,43
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	599.656.708,00	599.033.000,00	-
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	342.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	560.000.000,00	553.217.500,00	59.943.400,00
8	Dinas Pariwisata	181.674.000,00	180.990.000,00	-
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
10	Sekretariat Daerah	990.004.025,00	989.054.169,00	792.140.400,00
11	Kecamatan Arut Selatan	762.567.500,00	654.065.029,00	-
12	Kecamatan Arut Utara	501.589.550,00	501.585.760,00	-
13	Kecamatan Kumai	218.000.000,00	92.739.488,00	-
14	Kecamatan Kotawaringin Lama	245.000.000,00	245.000.000,00	242.366.200,00
15	Kecamatan Pangkalan Iada	-	-	17.030.000,00
Jumlah		126.304.922.625,00	125.882.549.773,00	154.912.088.124,43

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
5.389.114.934,00	4.759.374.090,00	10.951.107.223,40

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.759.374.090,00 atau tercapai 88,31% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.389.114.934,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp10.951.107.223,40. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel 5.21.



Tabel 5.21
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.568.237.934,00	3.938.998.090,00	10.672.437.223,40
2	Dinas Kesehatan	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	789.470.000,00	789.470.000,00	-
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	1.750.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.407.000,00	14.406.000,00	206.780.000,00
6	Sekretariat DPRD	-	-	3.895.000,00
7	Kecamatan Arut Selatan	-	-	66.245.000,00
8	Kecamatan Kotawaringin Lama	17.000.000,00	16.500.000,00	-
Jumlah		5.389.114.934,00	4.759.374.090,00	10.951.107.223,40

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
4.957.250.212,00	4.842.414.442,00	4.510.899.750,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.842.414.442,00 atau tercapai 97,68% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.957.250.212,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp4.510.899.750,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	236.824.250,00
2	RSUD Sultan Imanuddin	2.974.579.058,00	2.968.108.000,00	148.170.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.088.380.000,00	1.084.523.000,00	3.014.110.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	147.950.000,00	147.950.000,00	-
5	Dinas Sosial	295.000.000,00	197.850.000,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	148.550.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.647.904,00	61.185.000,00	-



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
8	Dinas Perhubungan	50.000.000,00	49.885.000,00	249.150.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	175.000.000,00	173.965.000,00	505.340.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75.000.000,00	73.480.000,00	-
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.693.250,00	60.693.242,00	93.000.000,00
12	Dinas perpustakaan dan kearsipan	-	-	15.510.000,00
13	Inspektorat Kabupaten	-	-	19.965.000,00
14	Kecamatan Arut Selatan	15.000.000,00	14.775.200,00	-
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	49.780.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	-	-	30.500.000,00
Jumlah		4.957.250.212,00	4.842.414.442,00	4.510.899.750,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
65.000.000.000,00	49.260.669.634,36	0,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penanganan dampak pandemi *COVID-19* sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp49.260.669.634,36 atau tercapai 75,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp65.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 tidak ada realisasi Belanja Tidak Terduga.

5.1.2.4 Transfer

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
160.634.116.200,00	157.306.696.000,00	160.070.699.984,00

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp157.306.696.000,00 atau tercapai 97,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp160.634.116.200,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp160.070.699.984,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Rincian Transfer sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel 5.23.



Tabel 5.23
Rincian Transfer

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	TRANSFER/ BAGI HASIL PENDAPATAN	8.989.815.000,00	7.740.424.700,00	6.423.330.300,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.359.367.000,00	6.502.448.300,00	5.118.744.700,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.630.448.000,00	1.237.976.400,00	1.304.585.600,00
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	151.644.301.200,00	149.566.271.300,00	153.647.369.684,00
	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	151.644.301.200,00	149.566.271.300,00	245.000.000,00
	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	-	-	152.489.116.430,00
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-	913.253.254,00
Jumlah		160.634.116.200,00	157.306.696.000,00	160.070.699.984,00

1) Transfer/Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
8.989.815.000,00	7.740.424.700,00	6.423.330.300,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 merupakan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp6.502.448.300,00 atau tercapai 88,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.359.367.000,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.237.976.400,00 atau tercapai 75,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.630.448.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 Transfer/Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp6.423.330.300,00.

2) Transfer/Bantuan Keuangan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
151.644.301.200,00	149.566.271.300,00	153.647.369.684,00

Realisasi Transfer/Bantuan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 merupakan Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp149.566.271.300,00 atau tercapai 98,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp151.644.301.200,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp153.647.369.684,00.



5.1.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
73.446.658.000,00	90.993.771.371,23	93.826.890.811,61

Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp90.993.771.371,23 atau tercapai 123,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.446.658.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp93.826.890.811,61 dengan perhitungan sebagai berikut:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
80.946.658.000,00	95.493.771.371,23	120.826.890.811,61

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp95.493.771.371,23 atau tercapai 117,97% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.946.658.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp120.826.890.811,61. Rincian Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.24
Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020		2019
1	Penerimaan Pembiayaan	80.946.658.000,00	95.493.771.371,23	120.826.890.811,61
	Penggunaan SiLPA	44.946.658.000,00	59.479.771.371,23	120.684.471.011,61
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	-
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	14.000.000,00	142.419.800,00

a) Penggunaan SiLPA

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
44.946.658.000,00	59.479.771.371,23	120.684.471.011,61

Penggunaan SiLPA merupakan penggunaan atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA. 2019 yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp59.479.771.371,23



atau tercapai 132,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp44.946.658.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp120.684.471.011,61.

b) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	0,00

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.000.000.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 tidak ada realisasi Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank.

c) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
0,00	14.000.000,00	142.419.800,00

Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp14.000.000,00 merupakan penerimaan kembali Investasi Non Permanen Dana Bergulir dari Petani Jagung, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp142.419.800,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
7.500.000.000,00	4.500.000.000,00	27.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 atau tercapai 60,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp27.000.000.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel 5.25.

Tabel 5.25
Rincian Pengeluaran Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		2020	2020	2019
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	4.500.000.000,00	27.000.000.000,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	4.500.000.000,00	7.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	20.000.000.000,00



a) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
7.500.000.000,00	4.500.000.000,00	7.000.000.000,00

Realisasi penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 atau tercapai 60,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp7.000.000.000,00.

b) Pembayaran Pokok Utang

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
0,00	0,00	20.000.000.000,00

Tidak terdapat realisasi Pembayaran Pokok Utang sampai dengan 31 Desember 2020, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
0,00	97.531.350.426,37	59.515.246.653,91

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp97.531.350.426,37 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.515.246.653,91.



5.2 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020:

Tabel 5.26
Rincian Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	59.479.771.371,23	120.684.471.011,61
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(59.479.771.371,23)	(120.684.471.011,61)
3	Subtotal (1 + 2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	97.590.424.926,37	59.515.246.653,91
5	Subtotal (3 + 4)	97.590.424.926,37	59.515.246.653,91
6	Lain-lain	(59.074.500,00)	(35.475.282,68)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	97.531.350.426,37	59.479.771.371,23

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp59.479.771.371,23 dimana dipergunakan seluruhnya sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2020. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp97.590.424.926,37 berbeda dengan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, dikarenakan adanya Lain-lain koreksi yang mengurangi SiLPA di Tahun Anggaran berjalan. Lain-lain koreksi dimaksud sebesar Rp59.074.500,00 terdiri dari:

- SP2D yang belum dicairkan senilai Rp59.000.000,00
- PFK Taperum yang belum dibayarkan senilai Rp74.000,00
- kurang debet SPM BLUD TA. 2019 senilai Rp500,00

Sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp97.531.350.426,37 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.051.579.055,14 atau 63,97% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019.



5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1 Aset	3.085.962.251.752,52	2.725.432.346.294,78

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Aset bersih per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.085.962.251.752,52 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.725.432.346.294,78.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1 Aset Lancar	256.086.685.262,33	78.095.116.263,26

Aset Lancar bersih per 31 Desember 2020 sebesar Rp256.086.685.262,33 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.095.116.263,26.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kas di Kas Daerah	44.402.895.610,80	3.074.805.820,73

Kas Di Kas Daerah adalah saldo Kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 44.402.895.610,80 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.074.805.820,73 yang disimpan pada rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK), BNI dan BRI Cabang Pangkalan Bun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Bank Kalteng		
	Kas Daerah No. 4000101000002	32.600.158.464,12	10.265.536.970,61
2	BNI		
	Rekening No. 008 142 6262	962.917.451,00	503.047.248,00
3	BRI		
	Rek. Pendapatan No. 0282 01 000447-30-3	-	-
	Kas Daerah No. 000278-30-6	43.053.378.505,48	36.422.360.376,92
Jumlah		76.616.454.420,60	47.190.944.595,53



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp44.402.895.610,80 berbeda dengan saldo pada Rekening Kas Daerah sebesar Rp76.616.454.420,60 karena di dalamnya termasuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Saldo Kas di Kas Daerah belum termasuk saldo per 31 Desember 2019 yang ada di rekening-rekening sekolah (SDN, SMPN) dan penyelenggara kegiatan Dinas karena sampai dengan tanggal pelaporan belum merupakan rekening milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap rekening-rekening dimaksud (**lampiran 5.2**), terdapat total saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp263.763.273,57 yang akan ditindaklanjuti dengan proses penyetoran kembali ke Kas Daerah dan penetapan sebagai rekening milik Pemerintah Daerah atau penutupan rekening tersebut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	3.367.123,00	1.150.000,00

Kas Di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2020 total sebesar Rp3.367.123,00 terdapat pada:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp250.000,00 penyetoran ke Kasda tanggal 5 Januari 2021
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp900,00 penyetoran ke Kasda tanggal 13 Januari 2021
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp255.000,00 penyetoran ke Kasda tanggal 25 Januari 2021
- PPKD Rp2.861.223,00 penyetoran ke Kasda tanggal 15 dan 18 Januari 2021

sedangkan per 31 Desember 2019 saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.150.000,00 juga telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Kas di Bendahara Penerimaan	7.835.000,00	2.705.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di tangan Bendahara Penerimaan atas pendapatan tahun berjalan tetapi saat tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah, dimana per 31 Desember 2020 saldonya sebesar Rp7.835.000,00 yang terdapat pada:

- Dinas Kesehatan Rp6.685.000,00 penyetoran ke Kasda tanggal 4 dan 11 Januari 2021
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.150.000,00 penyetoran ke Kasda tanggal 25 Januari 2021

sedangkan per 31 Desember 2019 saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.705.000,00 juga telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah.



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Kas JKN	388.439.034,00	242.046.946,00

Saldo Kas JKN per 31 Desember 2020 sebesar Rp388.439.034,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp242.046.946,00 merupakan saldo atas pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terdapat pada Puskesmas sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.28
Rincian Kas JKN

(dalam Rupiah)

No.	Puskesmas	31 Desember 2019	31 Desember 2019
1.	Arut Selatan	7.807.485,00	93.255,00
2.	Mendawai	517,00	927,00
3.	Madurejo	12.292,00	28.272,00
4.	Kumai	142.740.565,00	65.269.702,00
5.	Sungai Rangit	4.680.010,00	496.425,00
6.	Pangkalan Lada	179.303,00	93.853,00
7.	Semanggang	22.661.266,00	4.093.238,00
8.	Natai Pelingkau	7.201,00	1.946,00
9.	Kumpai batu Atas	145.255,00	166,00
10.	Teluk Bogam	12.897.633,00	20.754.663,00
11.	Kotawaringin Lama	63.181.238,00	9.195.378,00
12.	Arut Utara	10,00	101.910,00
13.	Karang Mulya	35.761.608,00	46.856.000,00
14.	Pandu Senjaya	66.260.905,00	31.238.405,00
15.	Riam Durian	25.658.153,00	2.303.663,00
16.	Sambi	205.326,00	31.885.926,00
17.	Runtu	3.281.197,00	29.632.297,00
18.	Ipuh Bangun Jaya	2.959.070,00	920,00
Jumlah		388.439.034,00	242.046.946,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5) Kas BLUD	18.962.379.039,12	7.941.322.444,51

Saldo Kas BLUD adalah saldo kas pada RSUD Sultan Imanuddin per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.962.379.039,12 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.941.322.444,51. Saldo akhir kas BLUD termasuk di dalamnya adalah koreksi kas kurang debit atas SPM pada BLUD sebesar Rp500,00.



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6) Kas BOS	1.611.950.309,65	4.101.602.885,19

Saldo Kas dari Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.611.950.309,65 merupakan kas yang ditransfer dari Pemerintah Pusat untuk dikelola langsung oleh Sekolah-sekolah Negeri Tingkat Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten, sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.101.602.885,19.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7) Piutang Pajak	41.093.736.163,45	38.792.616.379,88

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.093.736.163,45 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.792.616.379,88. Jumlah Piutang Pajak ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau persamaannya yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah, akan tetapi saat tanggal pelaporan Wajib Pajak belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Piutang Pajak

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Piutang Pajak Hotel	346.038.787,23	2.706.803.619,27
2	Piutang Pajak Restoran	121.843.606,83	405.706.055,73
3	Piutang Pajak Hiburan	24.589.450,00	18.966.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	325.555.083,10	373.283.527,29
5	Piutang Pajak Air Tanah	387.070,00	632.750,00
6	Pajak Penerangan Jalan	97.865.737,30	-
7	Pajak Parkir	15.448.800,00	-
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	145.352.373,99	99.483.611,59
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	39.976.185.705,00	35.168.254.416,00
10	Piutang BPHTB	19.369.550,00	1.321.300,00
11	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	21.100.000,00	18.165.100,00
Jumlah		41.093.736.163,45	38.792.616.379,88

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
8) Piutang Retribusi	1.587.470.143,00	1.010.388.787,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.587.470.143,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.010.388.787,00. Jumlah Piutang Retribusi ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau



persamaannya yang diterbitkan oleh SKPD, akan tetapi saat tanggal pelaporan Wajib Retribusi belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30
Rincian Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	27.260.000,00	26.330.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	238.840.000,00	21.120.000,00
3	Piutang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	627.826.000,00	318.131.000,00
4	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.700.000,00	134.700.000,00
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	83.681.641,00	95.515.051,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	281.520.350,00	176.658.125,00
7	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.205.272,00	128.577.111,00
8	Piutang Retribusi Izin Gangguan	419.380,00	109.017.500,00
9	Piutang Retribusi SITU	109.017.500,00	340.000,00
Jumlah		1.587.470.143,00	1.010.388.787,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
9) Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi	(28.091.726.937,43)	(26.147.807.954,23)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp28.091.726.937,43) sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp26.147.807.954,23) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(27.338.328.868,98)	(25.483.491.547,13)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(753.398.068,45)	(664.316.407,10)
Jumlah		(28.091.726.937,43)	(26.147.807.954,23)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
10) Piutang Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21	579.089.303,00	1.226.721.259,00

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21 per 31 Desember 2020 sebesar Rp579.089.303,00 merupakan hasil perhitungan kelebihan potongan atas pajak PPh 21 pegawai dari tahun 2015 s.d 2020. Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21 per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.226.721.259,00.



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
11) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	32.637.149.875,29	0,00

Pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.637.149.875,29 sedangkan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
12) Piutang Lainnya	97.209.155.589,00	22.608.745.227,75

Piutang Lainnya merupakan Piutang BLUD pada RSUD Sultan Imanuddin. Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp97.209.155.589,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.608.745.227,75.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
13) Penyisihan Piutang Lainnya	(5.690.612.058,45)	(1.981.658.706,18)

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp5.690.612.058,45) sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.981.658.706,18) yang merupakan penyisihan piutang yang dikelola oleh BLUD pada RSUD Sultan Imanuddin.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
14) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	63.289.423,50	77.894.676,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.289.423,50 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp77.894.676,00 yang merupakan Ganti Rugi an. Jamin Ginting (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan telah dilakukan upaya pemotongan pada rekening tambahan penghasilan.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
15) Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(31.644.711,75)	(7.789.467,60)

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp31.644.711,75) sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp7.789.467,60).



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
16) Beban Dibayar Di Muka	343.830.227,96	317.892.613,46

Saldo Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp343.830.227,96 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp317.892.613,46 yang terdiri dari:

Tabel 5.32
Rincian Beban Dibayar Di Muka

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Asuransi Barang Milik Daerah/Pasar (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	144.109.589,04	144.262.295,08
2	Sewa Rumah Asrama (Sekretariat Daerah)	199.720.638,92	173.630.318,38
Jumlah		343.830.227,96	317.892.613,46

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
17) Persediaan	51.010.082.128,19	26.834.480.351,75

Persediaan merupakan barang/bahan habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penanganan dampak pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka saldo akhir persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.010.082.128,19 termasuk di dalamnya adalah sisa persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga tahun 2020, sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.834.480.351,75. Tabel di bawah ini menyajikan rincian persediaan berdasarkan jenisnya:

Tabel 5.33
Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Persediaan ATK, Buku dan Barang Cetak	1.157.910.214,06	980.836.786,10
2	Persediaan Alat Listrik	36.423.040,00	47.151.603,00
3	Persediaan Benda Pos Lainnya	6.984.000,00	7.710.000,00
4	Persediaan Alat Kebersihan	26.316.090,00	22.111.825,00
5	Persediaan Benda Berharga	681.392.010,00	654.165.770,00
6	Persediaan Bahan Material dan Bahan Lainnya	2.316.195.831,46	1.839.962.352,86
7	Persediaan Obat-obatan	23.906.189.264,26	12.582.553.128,29
8	Persediaan Bahan Kimia	755.041.834,41	700.503.786,50
9	Persediaan Hewan dan Ternak	13.575.000,00	13.575.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
10	Persediaan Benih Sayur	13.535.088,00	-
11	Persediaan Benih Ikan	262.828.456,00	-
12	Persediaan Barang Fisik	475.300.980,00	-
13	Persediaan Bahan Pangan	80.500.000,00	-
14	Persediaan Habis Pakai	1.034.528.000,00	-
15	Persediaan Laboratorium	118.967.220,00	-
16	Persediaan Gown/Baju Kerja	28.500.000,00	-
17	Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	20.028.145.100,00	9.985.910.100,00
18	Donasi	67.750.000,00	-
Jumlah		51.010.082.128,19	26.834.480.351,75

Sedangkan daftar saldo akhir persediaan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34
Daftar Saldo Akhir Persediaan SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.678.893,19	56.899.210,00
2	Dinas Kesehatan	18.810.771.632,45	7.139.728.968,87
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.322.398.278,41	7.077.846.181,42
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.068.310.293,87	9.978.604.910,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	851.700,00	482.800,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	978.000,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.567.000,00	26.507.500,00
8	Dinas Sosial	80.500.000,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	13.958.278,50
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	417.817.900,00	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	510.944.678,86	520.078.178,86
12	Dinas Lingkungan Hidup	113.807.555,00	85.574.510,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	725.126.542,00	406.567.349,60
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.808.300,00	2.879.325,00
15	Dinas Perhubungan	85.814.550,00	83.030.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.255.580,00	7.396.300,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.925.900,00	9.218.400,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	19.565.200,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.514.500,00	3.413.750,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.250.750,00	882.500,00
21	Dinas Perikanan	262.828.456,00	-
22	Dinas Pariwisata	31.634.426,00	33.508.936,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	320.877.238,00	235.152.650,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	396.449.844,41	382.308.236,50
25	Sekretariat Daerah	325.807.766,00	377.348.663,00
26	Sekretariat DPRD	19.500.000,00	43.595.000,00
27	Inspektorat Kabupaten	4.375.780,00	7.198.400,00
28	Kecamatan Arut Selatan	-	-
29	Kecamatan Arut Utara	-	5.000.000,00
30	Kecamatan Pangkalan Lada	4.198.450,00	3.623.000,00
31	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.414.900,00	-
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.292.310,00	2.164.900,00
34	Badan Pendapatan Daerah	410.380.904,00	311.947.204,00
35	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Saldo Akhir Persediaan		51.010.082.128,19	26.834.480.351,75

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	130.253.725.029,41	128.155.804.057,25

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp130.253.725.029,41 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp128.155.804.057,25. Penjelasan lebih lanjut mengenai saldo Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Investasi Non Permanen	218.705.204,00	232.705.204,00

Investasi Non Permanen adalah saldo dana yang digulirkan/dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui: (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam bentuk pinjaman kepada petani jagung dengan bunga sebesar 3% dari pokok pinjaman serta dikenakan denda bunga sebesar 0,25% dari suku bunga berlaku. Penanaman Modal kepada masyarakat ini sesuai dengan SK Kepala Daerah dan pengembalian dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.35.



Tabel 5.35
Rincian Investasi Non Permanen

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	16.260.000,00	16.260.000,00
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	202.445.204,00	216.445.204,00
Jumlah		218.705.204,00	232.705.204,00

Pencatatan Dana Bergulir pertama kali sebesar harga perolehan, yaitu sebesar kas yang dibayarkan dan secara periodik. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pada tahun 2016 SKPD pengelola dana bergulir telah melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan waktu jatuh temponya (*aging schedule*) atau nilai saat ini. Dasar pembuatan *aging schedule* adalah SKPD teknis/tim melakukan pengecekan ke lokasi/penerima dana bergulir. Berikut ini adalah *Aging Schedule* per 31 Desember 2020 dari masing-masing SKPD pengelola:

Tabel 5.36
Aging Schedule Dana Bergulir

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kemungkinan Tertagih
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	16.260.000,00
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	202.445.204,00
Jumlah		218.705.204,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Investasi Permanen	130.035.019.825,41	127.923.098.853,25

Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 sebesar Rp130.035.019.825,41 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp127.923.098.853,25 yang terdapat pada:

Tabel 5.37
Rincian Investasi Permanen

(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan Daerah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	PT Bank Pembangunan Kalteng	53.500.000.000,00	50.000.000.000,00
2	PD BPR Marunting Sejahtera	17.879.885.624,29	16.256.676.688,36
3	PDAM Arut Tirta	54.338.613.253,12	57.349.901.216,89



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Nama Perusahaan Daerah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4	PD Agrotama Mandiri	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00
5	PT Jamkrida	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah		130.035.019.825,41	127.923.098.853,25

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2020 sebesar Rp53.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.500.000.000,00 yang berasal dari Penyertaan Modal pada tahun 2020.
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.879.885.624,29 yang terdiri dari:
 - Saldo Awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp16.256.676.688,36
 - Penyesuaian atas laba (rugi) tahun 2019 setelah *audited* sebesar Rp431.999,93
 - Pembagian Deviden ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp477.224.064,00)
 - Penyertaan Modal tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00
 - Laba (rugi) Operasional tahun 2020 sebesar Rp1.100.001.000,00Data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2020 *unaudited*.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PDAM Arut Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.338.613.253,12 yang terdiri dari:
 - Saldo Awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp57.349.901.216,89
 - Penyesuaian Laba (rugi) tahun 2019 hasil *audited* sebesar (Rp174.819.462,00)
 - Laba (rugi) Operasional tahun 2020 sebesar (Rp2.836.468.501,77)Data tersebut berdasarkan laporan keuangan PDAM Tirta Arut per 31 Desember 2020 *unaudited*.
- d. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 pada PD Agrotama Mandiri tetap sebesar Rp1.316.520.948,00. PD Agrotama Mandiri sejak tahun 2015 sudah tidak beroperasi (dalam proses pembekuan).
- e. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 pada PT Jamkrida tetap sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalteng dan PT Jamkrida dicatat berdasarkan metode *cost* karena kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kurang dari 20%. Sedangkan metode pencatatan Investasi Permanen pada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu PD BPR Marunting Sejahtera, PDAM Tirta Arut dan PD Agrotama Mandiri berdasarkan metode ekuitas, dimana apabila mendapatkan keuntungan maka akan dicatat sebagai penambah investasi dan sebaliknya apabila rugi maka akan dicatat mengurangi investasi sehingga modal berkurang. Hal ini dikarenakan ketiga BUMD tersebut sepenuhnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3 Aset Tetap	2.640.463.095.273,22	2.444.426.031.812,46

Aset Tetap adalah jenis Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan/nilai wajar saat perolehannya. Aset Tetap bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 senilai Rp2.640.463.095.273,22 sedangkan per 31 Desember 2019 senilai Rp2.444.426.031.812,46.

Aset Tetap tahun 2020 dan 2019 diklasifikasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.38
Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Klasifikasi Aset Tetap	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Tanah	498.396.123.964,07	491.179.690.204,07
2	Peralatan dan Mesin	607.825.996.038,55	502.297.771.577,42
3	Gedung dan Bangunan	1.087.204.097.394,82	946.795.518.678,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.884.524.022.534,07	2.717.274.864.457,20
5	Aset Tetap Lainnya	42.243.910.443,40	38.476.186.662,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.172.344.563,91	77.189.127.975,03
7	Akumulasi Penyusutan	(2.592.903.399.665,60)	(2.328.787.127.741,86)
Aset Tetap Bersih		2.640.463.095.273,22	2.444.426.031.812,46

Penjelasan lebih lanjut mengenai saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.1 Tanah	498.396.123.964,07	491.179.690.204,07

Saldo Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian independen pada tahun 2005 oleh PT Satyatama Grahatara Surabaya, ditambah dengan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp7.216.433.760,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi senilai Rp498.396.123.964,07. Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Tanah pada tahun 2020 disajikan pada tabel 5.39.



Tabel 5.39
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Tanah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Tanah	491.179.690.204,07
1	Penambahan:	11.455.253.836,00
	Pengadaan Belanja Modal Tanah tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Tanah	267.727.260,00
	Pengadaan Belanja Modal selain Tanah yang dikapitalisasi sebagai Aset Tanah	9.955.000,00
	Hasil Penilaian tahun 2020	4.772.314.250,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	2.669.285.076,00
	Hibah	3.735.972.250,00
2	Pengurangan:	4.238.820.076,00
	Penghapusan	55.000.000,00
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	2.669.285.076,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	1.514.535.000,00
	Saldo Akhir Tanah	498.396.123.964,07

1) Penambahan Aset Tetap – Tanah tahun 2020 total senilai Rp11.455.253.836,00 antara lain disebabkan oleh:

- a. Pengadaan Belanja Modal – Tanah tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Tanah senilai Rp267.727.260,00 sehingga dari realisasi Belanja Modal – Tanah Rp415.506.760,00 tidak semua dikapitalisasi sebagai Aset Tanah. Hal tersebut dikarenakan Belanja Modal – Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sejumlah Rp147.779.500,00 berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Pangkalan Lima Kel. Baru Kec. Arut Selatan Rp88.660.000,00 dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Sei Kapitan Kecamatan Kumai Rp59.119.500,00 diakui sebagai Beban Jasa.

Belanja Modal – Tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan ke beberapa SKPD untuk Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 032/212/IV.II/SK/BPKAD/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, yaitu:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.324.000,00
- Dinas Kesehatan Rp4.860.400,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp461.480,00.
- Dinas Ketahanan Pangan Rp3.868.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup Rp495.000,00
- Dinas Perhubungan Rp2.759.600,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp201.572.200,00
- Dinas Perikanan Rp12.212.400,00
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp7.573.280,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp600.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp7.808.800,00
 - Kecamatan Arut Selatan Rp22.631.800,00
 - Kecamatan Arut Utara Rp1.065.100,00
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Rp495.200,00
- b. Pengadaan Belanja Modal tahun 2020 selain Tanah yang dikapitalisasi sebagai Aset Tanah senilai Rp9.955.000,00 terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa Perencanaan dan Pengawasan Lahan Pasar Korindo yang berasal dari Belanja Modal – Gedung dan Bangunan.
- c. Hasil Penilaian tahun 2020 sebesar Rp4.772.314.250,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Nilai Aset Tetap Nomor 032/175/IV.I/BPKAD/2020 Tanggal 1 Desember 2020 dengan rincian pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp253.415.000,00
 - Dinas Kesehatan Rp281.824.450,00
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp593.094.750,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp2.265.240.000,00
 - Dinas Sosial senilai Rp61.440.000,00 berupa Tanah Hibah dari masyarakat sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 593.21/17/BR/II/2017 dan Nomor 446/104/DINSOS.I/2017 Tanggal 03 Februari 2017
 - Dinas Perhubungan Rp932.512.000,00
 - Dinas Pariwisata senilai Rp271.520.050,00
 - Kecamatan Arut Utara berupa Tanah eks Puskesmas dan Kantor PKK senilai Rp18.420.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Rp94.848.000,00
- d. Penetapan Status Penggunaan-Masuk senilai Rp2.669.285.076,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp110.832.030,00 sesuai SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 032/225/IV.II/SK/BPKAD/2020 Tanggal 10 Desember 2020
 - Dinas Kesehatan senilai Rp996.634.996,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 800/5156/KD.A/2020 Tanggal 14 April 2020 dari Sekretariat Daerah
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp841.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/218/BU.III/2020 Tanggal 06 November 2020 dari Sekretariat Daerah
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp452.288.000,00
 - Dinas Perikanan Rp4.871.250,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp243.250.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/116/BU.III/2020 Tanggal 02 Juli 2020 dari Sekretariat Daerah



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Kecamatan Arut Utara berupa Tanah Kantor Camat dan Rumah Jabatan senilai Rp20.408.800,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/223/BU.III/2020 Tanggal 11 Desember 2020 dari Sekretariat Daerah
- e. Hibah senilai Rp3.735.972.250,00 terdapat pada:
 - Dinas Pariwisata senilai Rp1.092.250,00 berupa Tanah yang berada di Pantai Kubu seluas 2.500 M² berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 032/156/IV.II/SK/BPKAD/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pariwisata
 - Kecamatan Kotawaringin Lama senilai Rp280.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Hibah, dan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah atas nama Bapak Akhmad Subandi, SH
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.734.600.000,00 yang dicatat sesuai Surat Keterangan perkiraan harga pasar terendah tanah/M² di Jl. Kawitan I dari Kelurahan Sidorejo dan BAST Nomor 100/YPLP-PGRI/KTB/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Tanah tahun 2020 total senilai Rp4.238.820.076,00 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Penghapusan Tanah di Kecamatan Pangkalan Banteng senilai Rp55.000.000,00 pada Sekretariat Daerah sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 032/108/IV.III/SK/BPKAD/2020 Tanggal 22 Juni 2020, sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019
 - b. Penetapan Status Penggunaan-Keluar senilai Rp2.669.285.076,00 dari SKPD:
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa Tanah Eks. BPP Kumai senilai Rp54.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/1413-1/TPHP.1/2020 Tanggal 11 Desember 2020 ke Dinas Lingkungan Hidup
 - Sekretariat Daerah Rp2.615.285.076,00
 - c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain senilai Rp1.514.535.000,00 pada Sekretariat Daerah ke Kodim 1014/Pbn sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/215.a/IV/II.BPKAD/2020 Tanggal 25 Februari 2020

Dari keseluruhan bidang Tanah yang tercatat pada KIB Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat Aset Tetap Tanah di bawah Jalan senilai:

- Rp62.392.141.290,00 sebanyak 2.376 bidang yang memiliki status sebagai Tanah Jalan Desa
- Rp4.870.379.250,00 sebanyak 192 bidang yang memiliki status sebagai Tanah Jalan Lingkungan
- Rp201.991.425.700,00 sebanyak 316 bidang yang memiliki status sebagai Tanah Jalan Kabupaten dan 1 bidang sebagai Tanah Jalan Nasional



Pada tahun 2020 terdapat 22 bidang Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat namun mengalami sengketa. Daftar Aset Tanah bersengketa dimaksud dapat dilihat pada **lampiran 5.3**.

Berikut ini adalah daftar saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD:

Tabel 5.40
Daftar Saldo Aset Tetap – Tanah SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.632.174.030,06	22.532.003.000,06
2	Dinas Kesehatan	6.417.781.372,67	5.134.461.526,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	43.585.632.480,00	43.585.632.480,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271.077.076.240,00	271.077.076.240,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	774.002.830,00	180.446.600,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.675.240.000,00	569.000.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152.990.000,00	152.990.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00
9	Dinas Sosial	694.040.000,00	632.600.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.295.503.000,00	2.295.503.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.460.900.000,00	1.460.900.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	398.501.500,00	394.633.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.183.283.200,00	730.500.200,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000.000,00	400.000.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	354.800.000,00	354.800.000,00
16	Dinas Perhubungan	3.742.678.280,00	2.807.406.680,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	479.600.000,00	479.600.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.025.514.400,00	22.813.987.200,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.125.205.425,00	10.125.205.425,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	645.200.000,00	645.200.000,00
21	Dinas Perikanan	773.609.026,00	756.525.376,00
22	Dinas Pariwisata	1.162.212.300,00	889.600.000,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.578.121.871,00	12.381.298.591,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	332.853.500,00	332.253.500,00
25	Sekretariat Daerah	64.044.296.942,67	68.221.308.218,67
26	Sekretariat DPRD	932.900.000,00	932.900.000,00
27	Inspektorat Kabupaten	350.000.000,00	350.000.000,00
28	Kecamatan Arut Selatan	13.616.829.400,00	13.594.197.600,00
29	Kecamatan Arut Utara	92.293.900,00	52.400.000,00
30	Kecamatan Kumai	458.313.066,67	458.313.066,67



No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	327.915.000,00	327.635.000,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	845.343.200,00	750.000.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	467.400.000,00	467.400.000,00
36	Badan Pendapatan Daerah	288.000.000,00	288.000.000,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	487.000.000,00	487.000.000,00
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	3.111.773.000,00	3.111.773.000,00
Saldo Akhir Tanah		498.396.123.964,07	491.179.690.204,07

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	607.825.996.038,55	502.297.771.577,42

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian/inventarisasi oleh BPKP pada tahun 2002 sebagai dasar pembuatan neraca awal, dan selanjutnya ditambahkan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp105.528.224.461,13 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp607.825.996.038,55. Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.41
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Peralatan dan Mesin		502.297.771.577,42
1	Penambahan:	117.137.607.512,88
	Pengadaan Belanja Modal Peralatan & Mesin tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Peralatan & Mesin	95.727.082.699,60
	Pengadaan Belanja Modal selain Peralatan & Mesin yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan & Mesin	2.948.925.100,00
	Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020	77.136.600,00
	Pengadaan Barang dari Belanja Tidak Terduga	3.913.268.771,27
	Hibah	3.270.468.309,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	10.716.886.033,01
	Reklasifikasi masuk	483.840.000,00
2	Pengurangan:	11.609.383.051,75
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	10.716.886.033,01
	Reklasifikasi Keluar	119.949.500,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2020	328.547.518,74
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	444.000.000,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		607.825.996.038,55



1) Penambahan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2020 total senilai Rp117.137.607.512,88 antara lain disebabkan oleh:

a. Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Peralatan dan Mesin hanya senilai Rp95.727.082.699,60 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Rp97.622.948.332,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp1.895.865.632,40 dari Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2020 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Peralatan dan Mesin pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.330.942,00 berupa Barang Habis Pakai, Rp254.447.491,00 dari Belanja Modal BOS dan Rp1.438.922.556,00 dicatat sebagai barang ekstrakomtabel karena harga satuannya di bawah batas kapitalisasi
- Dinas Kesehatan terdapat senilai Rp136.106.793,40 dicatat sebagai barang ekstrakomtabel karena harga satuannya di bawah batas kapitalisasi dan Rp37.480.150,00 berupa Barang Habis Pakai
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat senilai Rp5.575.700,00 berupa Barang Habis Pakai
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat senilai Rp2.192.000,00 berupa Barang Habis Pakai
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat senilai Rp2.390.000,00 berupa Barang Habis Pakai
- Kecamatan Arut Selatan terdapat senilai Rp13.420.000,00 berupa 100 unit Kursi Rapat Plastik @Rp134.200,00

Rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Peralatan dan Mesin total senilai Rp95.727.082.699,60 terdapat pada SKPD berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp20.155.741.746,00
- Dinas Kesehatan Rp24.015.435.058,60
- Rumah Sakit Umum Daerah Rp21.358.449.964,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp5.055.496.500,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp117.788.000,00
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp7.068.714.720,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp6.327.591.900,00
- Dinas Sosial Rp294.605.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp38.800.000,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp988.106.100,00
- Dinas Ketahanan Pangan Rp42.450.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup Rp1.875.025.000,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp529.202.850,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp35.425.000,00
- Dinas Perhubungan Rp310.506.200,00
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp492.903.200,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp801.061.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp173.639.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp695.646.700,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp96.584.000,00
 - Dinas Pariwisata Rp213.152.000,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp217.431.500,00
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp28.223.300,00
 - Sekretariat Daerah Rp318.227.000,00
 - Sekretariat DPRD Rp762.628.000,00
 - Inspektorat Kabupaten Rp265.550.000,00
 - Kecamatan Arut Selatan Rp1.700.409.000,00
 - Kecamatan Arut Utara Rp42.208.986,00
 - Kecamatan Kumai Rp503.498.000,00
 - Kecamatan Kotawaringin Lama Rp485.270.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Lada Rp43.986.800,00
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Rp51.500.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp105.825.000,00
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp172.821.675,00
 - Badan Pendapatan Daerah Rp221.090.000,00
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rp122.089.500,00
- b. Pengadaan Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp2.948.925.100,00 terdapat pada:
- Rumah Sakit Umum Daerah Rp2.517.971.000,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud
 - Dinas Perhubungan Rp225.998.100,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp204.356.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp600.000,00 berupa kotak pengaduan yang berasal dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud
- c. Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020 senilai Rp77.136.600,00 terdapat pada SKPD:
- Dinas Kesehatan Rp56.810.000,00
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp1.111.000,00 berupa 2 (dua) unit *Staples* @Rp555.500,00
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp5.000.000,00
 - Dinas Perhubungan Rp11.985.600,00
 - Dinas Pariwisata Rp1.380.000,00 berupa 4 (empat) unit *Hand Sprayer* @Rp345.000
 - Badan Pendapatan Daerah Rp850.000,00
- d. Pengadaan Barang dari Belanja Tidak Terduga senilai Rp3.913.268.771,27 terdapat pada:
- Dinas Kesehatan Rp482.630.385,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Rumah Sakit Umum Daerah Rp3.099.226.909,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.850.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp28.815.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp257.150.227,27
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp41.596.250,00
- e. Hibah senilai Rp3.270.468.309,00 dengan rincian pada:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp127.000.000,00 yang merupakan Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa 2 (dua) unit Tenda Pengungsi sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor PRJ-55/BNPB/SU/RT.03.03/03/2020 dan 032/87/BPBD.IV.4/III/2020 serta Berita Acara Serah Terima Nomor BA.288.5/D V/RT.03.03/3/2020
 - Dinas Sosial Rp24.194.000,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp923.708.063,00
 - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp206.500.000,00 berupa 5 unit kendaraan roda 3 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA.53/MENLHSET/PSLB3/KAP.3/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020 dan senilai Rp1.669.955.270,00 berupa 1 unit Wheel Loader sesuai BAST Alat Berat Nomor 10.28/PSPLP-KH/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp126.390.000,00 dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor PL.02.03/6.25.7/SET.BIII/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020
 - Dinas Pariwisata senilai Rp69.300.000,00 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 07/BAST.APBD/XI/2020 Tanggal 26 November 2020 Tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan Sekitarnya.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp98.606.176,00 sesuai BAST Nomor 100/YPLP-PGRI/KTB/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp24.814.800,00 berdasarkan BAST Bantuan dari PT BRI Kantor Cabang Pangkalan Bun Nomor B.3076-X/KC/MKR/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020
- f. Penetapan Status Penggunaan-Masuk senilai Rp10.716.886.033,01 pada SKPD:
- Rumah Sakit Umum Daerah berupa Mesin Genset senilai Rp457.798.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/439.1/TPHP.1/2020 Tanggal 14 April 2020 dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp150.000.000,00 berupa satu unit mobil/kendaraan roda empat dengan plat nomor KH122GU tahun 2003 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/213/BU.III/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dari Sekretariat Daerah
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp5.852.263.763,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp1.815.000,00 berupa kursi roda sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 2337/445/RSUD.TU Tanggal 14 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp145.000.000,00 berupa 1 unit minibus sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/213/BU.III/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dari Sekretariat Daerah
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.815.000,00 berupa kursi roda sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 2337/445/RSUD.TU Tanggal 14 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp13.750.000,00 berupa Sepeda Motor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/1344/IV.II/BPKAD/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 dari Pengelola Barang
 - Kecamatan Arut Selatan senilai Rp200.000.000,00 berupa Mini Bus KH2689G sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/210/BU.III/2020 Tanggal 21 Agustus 2020 dari Sekretariat Daerah
 - Kecamatan Kumai berupa Mobil Pemadam Kebakaran beserta Peralatan dan Perlengkapannya senilai Rp964.836.176,67 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/271/BPBD.IV.4/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kecamatan Kotawaringin Lama berupa Mobil Pemadam Kebakaran beserta Peralatan dan Perlengkapannya senilai Rp1.023.072.916,67 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/273/BPBD.IV.4/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Mobil Pemadam Kebakaran beserta Peralatan dan Perlengkapannya senilai Rp941.636.176,67 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/272/BPBD.IV.4/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Rp964.899.000,00
- g. Reklasifikasi masuk senilai Rp483.840.000,00 yang terdapat pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2.500.000,00 berasal dari Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019
 - Sekretariat Daerah Rp481.340.000,00
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2020 total senilai Rp11.609.383.051,75 antara lain disebabkan oleh:
- a. Penetapan Status Penggunaan-Keluar senilai Rp10.716.886.033,01 dari:
- Rumah Sakit Umum Daerah Rp3.630.000,00 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Kursi Roda masing-masing senilai Rp1.815.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp5.555.696.033,01
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp485.298.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp3.721.113.000,00



- Sekretariat DPRD Rp888.000.000,00
- Badan Pendapatan Daerah Rp49.399.000,00
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berupa Sepeda Motor senilai Rp13.750.000,00 ke Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- b. Reklasifikasi Keluar senilai Rp119.949.500,00 dari Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan
- c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2020 senilai Rp328.547.518,74
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp179.197.518,74
 - Kecamatan Pangkalan Lada Rp149.350.000,00
- d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain senilai Rp444.000.000,00 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.42
Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.912.175.610,70	48.655.327.688,70
2	Dinas Kesehatan	81.640.681.081,14	57.205.755.137,54
3	Rumah Sakit Umum Daerah	186.590.216.979,13	159.160.401.106,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.003.967.182,00	26.944.620.682,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.110.676.600,00	841.777.600,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	19.088.991.518,00	6.168.013.035,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.426.642.469,00	1.426.642.469,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.263.082.427,99	22.335.371.561,00
9	Dinas Sosial	1.840.631.700,00	1.521.832.700,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.671.392.560,00	3.708.884.497,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.315.100.122,00	3.326.994.022,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.480.653.534,66	1.438.203.534,66
13	Dinas Lingkungan Hidup	17.843.728.992,40	14.092.248.722,40
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.328.476.561,95	2.792.458.711,95
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.259.089.167,00	1.223.664.167,00
16	Dinas Perhubungan	10.350.027.919,00	9.801.538.019,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.033.305.974,00	4.395.402.774,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.959.828.604,95	3.929.596.804,95
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.368.930.619,00	2.192.876.619,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.784.410.450,00	948.623.750,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.042.656.206,00	2.946.072.206,00
22	Dinas Perikanan	24.418.306.395,00	24.418.306.395,00
23	Dinas Pariwisata	2.709.390.272,75	2.425.558.272,75



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.516.628.581,60	10.963.692.600,34
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.787.372.382,00	7.759.149.082,00
26	Sekretariat Daerah	32.693.622.755,27	35.358.018.528,00
27	Sekretariat DPRD	9.992.546.875,00	10.117.918.875,00
28	Inspektorat Kabupaten	2.173.760.085,00	1.908.210.085,00
29	Kecamatan Arut Selatan	7.122.505.519,00	5.222.096.519,00
30	Kecamatan Arut Utara	1.461.545.845,00	1.419.336.859,00
31	Kecamatan Kumai	4.204.630.112,67	2.736.295.936,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.712.682.840,67	2.204.339.924,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	1.370.885.350,00	1.476.248.550,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.183.963.576,67	1.190.827.400,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.946.916.457,00	3.841.091.457,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.136.169.312,00	6.921.751.387,00
37	Badan Pendapatan Daerah	4.463.768.895,00	4.291.227.895,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.630.889.505,00	4.508.800.005,00
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	985.745.000,00	478.596.000,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		607.825.996.038,55	502.297.771.577,42

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	1.087.204.097.394,82	946.795.518.678,20

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, maupun reklasifikasi masuk. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp140.408.578.716,62 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp1.087.204.097.394,82. Penambahan atau pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel 5.43.

Tabel 5.43
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Gedung dan Bangunan		946.795.518.678,20
1	Penambahan:	167.487.315.019,62
	Pengadaan Belanja Modal Gedung & Bangunan tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Gedung & Bangunan	118.990.121.226,18
	Pengadaan Belanja Modal selain Gedung & Bangunan yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan	445.824.800,00
	Pengadaan Barang dari Belanja Tidak Terduga	5.581.660.150,53
	Hibah	14.782.353.825,07
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	2.096.453.408,00
	Reklasifikasi masuk	25.590.901.609,84



No.	Uraian	Nilai
2	Pengurangan:	27.078.736.303,00
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	2.096.453.408,00
	Reklasifikasi keluar	21.598.768.600,00
	Penghapusan/Pemusnahan	278.939.654,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	521.570.573,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2020	2.583.004.068,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan		1.087.204.097.394,82

- 1) Penambahan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan tahun 2020 total senilai Rp167.487.315.019,62 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal – Gedung dan Bangunan tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Gedung dan Bangunan hanya senilai Rp118.990.121.226,18 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Rp143.482.401.078,77. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp24.492.279.852,59 dari Belanja Modal – Gedung dan Bangunan tahun 2020 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Gedung dan Bangunan pada:
 - Dinas Kesehatan senilai Rp157.485.880,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, Rp1.367.684.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp169.358.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Rp296.395.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp14.005.578.893,92 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp2.137.666,67 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp15.737.892,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp616.101.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp70.521.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perhubungan senilai Rp225.998.100,00 dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin, Rp2.779.860,00 dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Rp59.398.500,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp14.399.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp9.955.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tanah, Rp204.356.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin, dan Rp42.438.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp2.970.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Rp900.000,00 berupa Bahan Habis Pakai
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp199.730.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perikanan senilai Rp2.480.580.500,00 dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Pariwisata senilai Rp7.612.000,00 berupa perencanaan pembangunan tempat pembuangan sampah di Desa Keraya Rp1.628.000,00 dan perencanaan pembuatan jalur pejalan kaki/pedestrian di obyek wisata Pantai Kubu Rp5.984.000,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp19.436.560,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Sekretariat Daerah senilai Rp99.110.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud, Rp833.943.169,00 dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Rp3.587.673.831,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
- b. Pengadaan Belanja Modal tahun 2020 selain Gedung & Bangunan yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan senilai Rp445.824.800,00 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp79.960.800,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp164.874.000,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud
 - Dinas Pariwisata senilai Rp180.990.000,00 berupa Jalan di dalam Kawasan Bangunan Wisata Tebing Tinggi di Desa Kumpai Batu Atas yang berasal dari Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp20.000.000,00 berupa pembuatan Sumur Bor dan Tower air yang berasal dari Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
- c. Pengadaan Barang dari Belanja Tidak Terduga senilai Rp5.581.660.150,53 terdapat pada 3 (tiga) SKPD berikut:
- Dinas Kesehatan Rp1.049.609.512,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp3.256.575.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp1.275.475.638,53 berupa rehab gedung LPTQ beserta pagarnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Hibah senilai Rp14.782.353.825,07 pada:
- Rumah Sakit Umum Daerah Rp5.596.675.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.260.065.000,00 dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 032/109/IV.III/BPKAD/2020 Tanggal 31 Januari 2020 dan senilai Rp198.900.000,00 sesuai dengan BAST Pekerjaan Pembangunan Pintu



- Gerbang Jalan Samari Sport Center Nomor 12/SK-PB/XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp786.430.000,00
 - Dinas Pariwisata senilai Rp1.445.283.825,07 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 07/BAST.APBD/XI/2020 Tanggal 26 November 2020 berupa bangunan pada tempat wisata Tebing Tinggi di Desa Kumpai Batu Atas
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.345.000.000,00 sesuai BAST Nomor 100/YPLP-PGRI/KTB/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020
 - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp150.000.000,00 berupa pekerjaan Rehab Taman Semangat 45
- e. Penetapan Status Penggunaan-Masuk senilai Rp2.096.453.408,00 pada SKPD:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.289.448.408,00 dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/724.I/DLH/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp708.110.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/218/BU.III/2020 Tanggal 6 November 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp98.895.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/319.A-BA/PUPR Tanggal 18 Juni 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Reklasifikasi masuk senilai Rp25.590.901.609,84 terdapat pada:
- Dinas Kesehatan Rp119.949.500,00 dari Aset Peralatan dan Mesin, dan Rp787.322.820,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp24.568.418.489,84 berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perhubungan senilai Rp115.210.800,00 berupa rehab lantai Dermaga Saik yang semula tercatat di Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan tahun 2020 total senilai Rp27.078.736.303,00 antara lain disebabkan oleh:
- a. Penetapan Status Penggunaan-Keluar senilai Rp2.096.453.408,00 pada:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp98.895.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/319.A-BA/PUPR Tanggal 18 Juni 2020 ke Dinas Lingkungan Hidup
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp708.110.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/218/BU.III/2020 Tanggal 6 November 2020 ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp1.289.448.408,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- b. Reklasifikasi Keluar senilai Rp21.598.768.600,00 terdapat pada:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp21.595.768.600,00
 - Dinas Pariwisata senilai Rp3.000.000,00 berupa perencanaan pembuatan *shelter (gazebo)* tahun 2017 di Tanjung Harapan Kecamatan Kumai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 930/PPHP-DISPAR/05/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017
- c. Penghapusan/Pemusnahan senilai Rp278.939.654,00 dengan rincian pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp102.840.814,00 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/209/IV.III/SK/BPKAD/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
 - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp98.900.000,00 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/106/IV.III/SK/BPKAD/2020 Tanggal 6 Mei 2020
 - Dinas Perikanan Rp5.000.000,00 berupa Plang Nama Kantor sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/107/IV.III/SK/BPKAD/2020 Tanggal 6 Mei 2020
 - Sekretariat Daerah senilai Rp72.198.840,00 berupa pagar VIP ROOM Bandara Iskandar sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/210/IV.III/BPKAD/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
- d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat senilai Rp521.570.573,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp415.070.573,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp106.500.000,00
- e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2020 senilai Rp2.583.004.068,00 pada SKPD berikut:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp866.750.278,00
 - Dinas Kesehatan Rp1.458.359.790,00
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp244.000.000,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp13.894.000,00

Adapun daftar saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44
Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.919.046.534,65	271.895.810.547,65
2	Dinas Kesehatan	160.764.193.505,26	112.656.867.304,26
3	Rumah Sakit Umum Daerah	167.275.267.181,69	98.718.753.585,85
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.181.499.193,65	70.975.605.785,65
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.261.762.533,33	5.252.368.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.099.477.972,91	4.391.367.972,91



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.555.409.083,00	2.456.109.083,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.922.159.903,00	7.193.742.695,00
9	Dinas Sosial	2.076.550.525,00	2.076.550.525,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.715.482.439,00	5.807.163.539,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.695.222.810,00	3.457.933.710,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	843.293.991,00	817.648.991,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	45.670.649.993,50	46.755.353.401,50
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.036.268.665,00	2.909.230.365,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	902.635.700,00	902.635.700,00
16	Dinas Perhubungan	21.177.898.871,79	20.894.112.721,79
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	808.413.970,37	808.413.970,37
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90.073.590.838,00	83.183.655.838,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.137.520.000,00	3.137.520.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	22.615.322.873,00	21.644.533.573,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.396.560.117,77	3.396.560.117,77
22	Dinas Perikanan	19.475.778.073,72	19.480.778.073,72
23	Dinas Pariwisata	16.734.610.762,07	14.299.820.737,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22.835.233.721,00	22.774.669.381,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.154.682.231,00	15.134.682.231,00
26	Sekretariat Daerah	36.051.900.325,77	34.844.703.527,24
27	Sekretariat DPRD	11.780.731.004,89	11.326.581.870,04
28	Inspektorat Kabupaten	3.680.530.392,28	3.680.530.392,28
29	Kecamatan Arut Selatan	13.022.000.116,36	12.888.707.645,36
30	Kecamatan Arut Utara	4.769.059.609,92	4.769.059.609,92
31	Kecamatan Kumai	4.655.703.235,16	4.472.518.813,16
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	9.303.278.728,74	7.475.560.478,74
33	Kecamatan Pangkalan Lada	3.383.143.081,00	3.383.143.081,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	3.564.712.369,00	3.564.712.369,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.472.351.350,00	6.472.351.350,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.423.085.453,30	7.218.832.453,30
37	Badan Pendapatan Daerah	1.528.222.420,00	1.528.222.420,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.661.309.282,27	3.569.167.782,27
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	579.538.536,42	579.538.536,42
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan		1.087.204.097.394,82	946.795.518.678,20



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.884.524.022.534,07	2.717.274.864.457,20

Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, reklasifikasi masuk, dan utang belanja yang diakui sebagai penambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp167.249.158.076,87 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp2.884.524.022.534,07. Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.45
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.717.274.864.457,20
1	Penambahan:	167.366.868.876,87
	Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	108.665.902.203,95
	Pengadaan Belanja Modal Selain Jalan, Irigasi & Jaringan yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	5.233.725.529,00
	Pengadaan Barang dari Belanja Tidak Terduga	378.433.000,00
	Utang Belanja yang diakui sebagai penambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 2020	22.156.944.393,92
	Hibah	27.268.942.150,00
	Reklasifikasi masuk	3.662.921.600,00
2	Pengurangan:	117.710.800,00
	Reklasifikasi keluar	117.710.800,00
	Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.884.524.022.534,07

- 1) Penambahan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 total senilai Rp167.366.868.876,87 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya senilai Rp108.665.902.203,95 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp125.882.549.773,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp17.216.647.569,05 dari Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp15.473.385.900,05 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perhubungan senilai Rp553.217.500,00 berupa pengecatan marka jalan sehingga dicatat sebagai Beban Pemeliharaan



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Dinas Pariwisata senilai Rp180.990.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp20.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan
 - Sekretariat Daerah senilai Rp989.054.169,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
- b. Pengadaan Belanja Modal tahun 2020 selain Jalan, Irigasi & Jaringan yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan senilai Rp5.233.725.529,00 yaitu pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp379.380.000,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - Dinas Kesehatan Rp1.367.684.000,00 berasal dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp169.358.000,00 berasal dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Perhubungan senilai Rp2.779.860,00 berupa pemasangan PDAM pelabuhan penyeberangan Kumai yang berasal dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Perikanan Rp2.480.580.500,00 berasal dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan
 - Sekretariat Daerah Rp833.943.169,00 berasal dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan
- c. Pengadaan Barang dari Belanja Tidak Terduga senilai Rp378.433.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah
- d. Utang Belanja senilai Rp22.156.944.393,92 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diakui sebagai penambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 dikarenakan pembayaran atas pekerjaan fisik yang telah selesai tidak bisa dibayarkan seluruhnya
- e. Hibah senilai Rp27.268.942.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Reklasifikasi masuk senilai Rp3.662.921.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 total senilai Rp117.710.800,00 disebabkan oleh:
- a. Reklasifikasi Keluar senilai Rp 117.710.800,00 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.500.000,00 ke Aset Peralatan dan Mesin
 - Dinas Perhubungan Rp115.210.800,00 ke Aset Gedung dan Bangunan



Daftar saldo akhir Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.46
Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.459.929.520,00	1.083.049.520,00
2	Dinas Kesehatan	3.776.337.000,00	1.465.953.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	24.306.986.463,94	23.759.195.463,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.726.785.040.701,83	2.568.065.453.630,96
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.394.133.986,00	4.795.100.986,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	570.000,00	570.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.016.096.400,00	9.016.096.400,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	991.701.567,50	991.701.567,50
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	361.635.000,00	361.635.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.415.500.620,10	2.415.500.620,10
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.000.000,00	9.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	5.807.726.552,95	5.920.157.492,95
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	996.794.082,00	996.794.082,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	432.904.181,00	432.904.181,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	148.516.866,00	148.516.866,00
16	Dinas Perikanan	12.622.055.636,00	10.141.475.136,00
17	Dinas Pariwisata	12.852.939.021,58	12.852.939.021,58
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	32.260.198.197,22	32.260.198.197,22
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	892.111.700,00	892.111.700,00
20	Sekretariat Daerah	41.849.230.720,95	41.015.287.551,95
21	Inspektorat Kabupaten	4.205.240,00	4.205.240,00
22	Kecamatan Arut Selatan	654.065.029,00	-
23	Kecamatan Arut Utara	639.185.760,00	137.600.000,00
24	Kecamatan Kumai	92.739.488,00	-
25	Kecamatan Kotawaringin Lama	487.366.200,00	242.366.200,00
26	Kecamatan Pangkalan Lada	27.030.000,00	27.030.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.750.000,00	13.750.000,00
28	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	226.272.600,00	226.272.600,00
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.884.524.022.534,07	2.717.274.864.457,20



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	42.243.910.443,40	38.476.186.662,40

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari belanja modal yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp3.767.723.781,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp42.243.910.443,40. Penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2020 disajikan dalam tabel 5.47.

Tabel 5.47
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	38.476.186.662,40
1	Penambahan:	3.767.723.781,00
	Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Tetap Lainnya	3.743.271.646,00
	Hibah	24.452.135,00
2	Pengurangan:	-
	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	42.243.910.443,40

- 1) Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 total senilai Rp3.767.723.781,00 disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Tetap Lainnya hanya senilai Rp3.743.271.646,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Rp4.759.374.090,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp1.016.102.444,00 dari Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya tahun 2020 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai:
 - Rp8.712.000,00 dicatat sebagai barang ekstrakomtabel karena nilainya di bawah batas kapitalisasi
 - Rp79.960.800,00 dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan
 - Rp379.380.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Rp440.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud
 - Rp108.049.644,00 berupa Barang Habis Pakai
 - b. Hibah berupa buku senilai Rp24.452.135,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 100/YPLP-PGRI/KTB/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020.
- 2) Tidak terdapat pengurangan pada saldo Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020.



Daftar saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48
Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.699.172.312,40	30.751.824.531,40
2	Dinas Kesehatan	15.575.000,00	15.575.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	206.756.365,00	206.756.365,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.055.862.700,00	1.266.392.700,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	226.187.500,00	226.187.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.415.000,00	8.415.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.124.100,00	12.124.100,00
8	Dinas Sosial	750.000,00	750.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.212.000,00	3.212.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.250.000,00	1.250.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	365.000,00	365.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.586.871.500,00	1.586.871.500,00
13	Dinas Perhubungan	139.700.000,00	139.700.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.482.080,00	11.482.080,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.000.000,00	14.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.405.059.766,00	2.390.653.766,00
17	Dinas Perikanan	24.534.800,00	24.534.800,00
18	Dinas Pariwisata	221.745.000,00	221.745.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	68.922.650,00	68.922.650,00
20	Sekretariat Daerah	1.099.551.000,00	1.099.551.000,00
21	Sekretariat DPRD	321.414.775,00	321.414.775,00
22	Inspektorat Kabupaten	14.945.395,00	14.945.395,00
23	Kecamatan Arut selatan	66.245.000,00	66.245.000,00
24	Kecamatan Kotawaringin Lama	20.680.000,00	4.180.000,00
25	Kecamatan Pangkalan Lada	1.680.000,00	1.680.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.253.000,00	1.253.000,00
27	Badan Pendapatan Daerah	5.772.000,00	5.772.000,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.383.500,00	10.383.500,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya		42.243.910.443,40	38.476.186.662,40



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.172.344.563,91	77.189.127.975,03

Terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dikarenakan Bangunan dan atau Gedung yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan. Jika dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp35.983.216.588,88 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp113.172.344.563,91. Di bawah ini adalah rincian penambahan/pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020:

Tabel 5.49
Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Kontruksi Dalam Pengerjaan	77.189.127.975,03
1	Penambahan:	61.467.229.898,72
	Pengadaan Belanja Modal tahun 2020	35.560.055.292,64
	Utang Belanja yang diakui sebagai penambah Aset KDP Gedung dan Bangunan 2020	5.699.826.606,08
	Utang Belanja yang diakui sebagai penambah Aset KDPJalan, Irigasi dan Jaringan 2020	2.143.229.000,00
	Reklasifikasi masuk	18.064.119.000,00
2	Pengurangan:	25.484.013.309,84
	Reklasifikasi keluar	25.484.013.309,84
	Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.172.344.563,91

- 1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2020 total senilai Rp61.467.229.898,72 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal tahun 2020 senilai Rp35.560.055.292,64 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp157.485.880,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp296.395.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp14.005.578.893,92 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Rp15.473.385.900,05 berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp2.137.666,67 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa perencanaan teknis pembangunan pagar makam Giriloyo Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp15.737.892,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp616.101.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp70.521.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Perhubungan Rp59.398.500,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp14.399.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp42.438.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp2.970.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp199.730.000,00 merupakan aula Dispora dalam proses pembangunan
 - Dinas Pariwisata Rp7.612.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp19.436.560,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Sekretariat Daerah senilai Rp3.587.673.831,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Rp989.054.169,00 berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- b. Utang Belanja yang diakui sebagai penambah Aset KDP Gedung dan Bangunan 2020 senilai Rp5.699.826.606,08 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Utang Belanja yang diakui sebagai penambah Aset KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan 2020 senilai Rp2.143.229.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Reklasifikasi masuk senilai Rp18.064.119.000,00 pada:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp18.061.119.000,00 dari Aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Pariwisata Rp3.000.000,00 dari Aset Gedung dan Bangunan
- 2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2020 total senilai Rp25.484.013.309,84 disebabkan oleh:
- a. Reklasifikasi Keluar pada SKPD:
- Dinas Kesehatan Rp787.322.820,00 ke Aset Gedung dan Bangunan
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp24.568.418.489,84 ke Aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp128.272.000,00 ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan



Adapun daftar saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.50
Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	619.890.273,72	619.890.273,72
2	Dinas Kesehatan	1.845.122.206,00	2.474.959.146,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	979.191.000,00	25.251.214.489,84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.067.064.482,05	35.812.197.082,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.137.666,67	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	75.839.500,00	75.839.500,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.737.892,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	616.101.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.815.893.558,00	1.745.372.558,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.675.000,00	48.675.000,00
13	Dinas Perhubungan	263.470.500,00	204.072.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian	254.243.000,00	239.844.000,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42.438.000,00	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.970.000,00	-
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	199.730.000,00	-
18	Dinas Pariwisata	10.612.000,00	-
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	164.271.560,00	144.835.000,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.427.000,00	9.427.000,00
21	Sekretariat Daerah	14.301.503.925,47	9.724.775.925,47
22	Kecamatan Arut Selatan	835.926.000,00	835.926.000,00
23	Kecamatan Arut Utara	2.100.000,00	2.100.000,00
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan		113.172.344.563,91	77.189.127.975,03

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(2.592.903.399.665,60)	(2.328.787.127.741,86)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai (Rp2.592.903.399.665,60) merupakan hasil dari koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya dan penyusutan tahun 2020. Akumulasi penyusutan Aset Tetap tahun 2020 tidak sama apabila dibandingkan dengan hasil uji dari penjumlahan beban penyusutan



tahun 2020 ditambah akumulasi penyusutan Aset Tetap tahun 2019 *audited*. Terdapat selisih perhitungan sebesar Rp4.382.481.568,42 yang disebabkan oleh koreksi:

- 1) Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap Hibah senilai Rp3.090.080.409,03 yang diterima di tahun 2020, namun tahun perolehan Aset Tetap Hibah tersebut sebelum tahun 2020 yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Sultan Imanuddin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- 2) Akumulasi penyusutan atas pengalihan status masuk Aset Tetap senilai Rp7.235.133.390,86 pada RSUD Sultan Imanuddin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng, serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- 3) Akumulasi penyusutan atas pengalihan status keluar Aset Tetap senilai (Rp7.235.133.390,86) pada RSUD Sultan Imanuddin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta Badan Pendapatan Daerah
- 4) Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dilelang dan pemusnahan senilai (Rp915.427.075,81) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Sekretariat Daerah, serta Kecamatan Pangkalan Lada
- 5) Akumulasi penyusutan atas reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain senilai (Rp472.325.996,72) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6) Akumulasi penyusutan atas Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain/pinjam pakai Rp195.298.592,06 pada Sekretariat Daerah
- 7) Akumulasi penyusutan atas reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tetap Rp200.000.000,00
- 8) Akumulasi penyusutan atas kesalahan klasifikasi pada KIB, atribusi, reklasifikasi serta Nilai Buku yang lebih besar dari Nilai Perolehan senilai Rp2.284.855.639,86

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing SKPD per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 terangkum pada tabel 5.51.



Tabel 5.51
Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(92.612.725.415,28)	(75.303.321.522,72)
2	Dinas Kesehatan	(70.963.863.640,00)	(62.672.518.809,95)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(144.940.956.255,01)	(118.181.886.288,28)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.981.340.116.392,38)	(1.807.308.285.641,85)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(5.569.839.464,69)	(4.131.680.566,85)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(11.339.534.373,42)	(5.220.486.203,20)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.670.427.089,60)	(1.550.168.609,15)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(12.834.629.153,38)	(10.631.843.116,00)
9	Dinas Sosial	(1.868.537.056,10)	(1.689.385.028,86)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.094.544.575,62)	(5.114.897.438,80)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.005.498.445,83)	(2.465.482.360,92)
12	Dinas Ketahanan Pangan	(1.505.432.685,35)	(1.401.399.515,55)
13	Dinas Lingkungan Hidup	(24.729.914.921,19)	(22.122.765.645,26)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.003.554.170,65)	(2.606.395.449,51)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.371.357.205,13)	(1.296.748.142,11)
16	Dinas Perhubungan	(15.331.291.275,51)	(12.976.223.586,72)
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(2.533.487.122,29)	(1.239.752.162,58)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(15.094.071.218,00)	(13.018.738.488,63)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.301.140.607,48)	(1.986.322.087,37)
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(6.287.477.725,91)	(5.477.436.152,84)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.683.802.969,05)	(2.308.030.829,82)
22	Dinas Perikanan	(28.687.975.231,94)	(25.706.206.300,71)
23	Dinas Pariwisata	(9.404.416.719,15)	(8.036.589.171,27)
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	(39.094.586.462,19)	(37.023.927.771,20)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(9.380.546.218,73)	(8.153.367.633,52)
26	Sekretariat Daerah	(47.811.766.056,46)	(46.563.027.299,60)
27	Sekretariat DPRD	(9.411.189.968,40)	(9.194.980.996,83)
28	Inspektorat Kabupaten	(2.080.823.781,98)	(1.778.508.666,73)
29	Kecamatan Arut Selatan	(6.464.540.207,56)	(5.283.888.981,04)
30	Kecamatan Arut Utara	(2.198.303.864,11)	(1.923.863.371,51)
31	Kecamatan Kumai	(2.906.915.805,36)	(2.133.191.254,11)
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	(3.086.502.717,80)	(2.373.383.014,35)
33	Kecamatan Pangkalan Lada	(1.800.870.970,51)	(1.746.844.978,32)
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	(2.129.526.193,23)	(1.613.488.320,36)
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.459.317.929,37)	(3.704.423.287,86)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(6.947.583.688,22)	(6.062.073.589,15)
37	Badan Pendapatan Daerah	(4.065.499.710,74)	(3.806.984.242,86)
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(4.565.175.526,49)	(4.167.507.030,49)
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	(1.325.656.851,49)	(811.104.184,98)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		(2.592.903.399.665,60)	(2.328.787.127.741,86)



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.4 Aset Lainnya	59.158.746.187,56	74.755.394.161,81

Aset Lainnya adalah aset yang tidak diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang ataupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi (TGR), Tagihan Lainnya, Aset Lainnya yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 senilai Rp59.158.746.187,56 dan per 31 Desember 2019 Rp74.755.394.161,81. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai saldo Aset Lainnya:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Tagihan Lainnya	175.342.231,00	177.389.331,00

Tagihan Lainnya merupakan saldo tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1 (satu) tahun. Saldo Tagihan Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp175.342.231,00 sedangkan per 31 Desember 2019 Rp177.389.331,00. Upaya penagihan telah dilakukan selama tahun 2020 sehingga saldo Tagihan Lainnya berkurang sebesar Rp2.047.100,00 karena adanya pelunasan piutang Pajak Reklame tahun 2008 an. Ir. H. Wisman, piutang Pajak Restoran tahun 2009 an. Warung Makan Barokah, dan piutang Pajak Reklame tahun 2009 an. CV. Safa'at, CV. Alba, CV. Bina Putra, Toko Audi Komputer. Di bawah ini adalah rincian saldo Tagihan Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

Tabel 5.52
Rincian Tagihan Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Piutang tahun 2008	873.923,00	2.466.023,00
	Piutang Pajak Reklame:		
	- GMHK Ega Megatron	86.720,00	86.720,00
	- Ir. H. Wisman	-	1.592.100,00
	- CV. Surya Alam Makmur	324.000,00	324.000,00
	Piutang Pajak Golongan C:		
	- CV. Bina Putra	463.203,00	463.203,00
2	Piutang tahun 2009	3.159.750,00	3.614.750,00
	Piutang Pajak Restoran		
	- Warung Makan Barokah	-	50.000,00
	Piutang Pajak Hotel:		
	- Losmen Permata Hijau	354.000,00	354.000,00
	- Losmen Mentari	594.000,00	594.000,00
	- Losmen Seleкта	150.000,00	150.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Piutang Pajak Reklame:		
	- CV. Safa'at	-	96.750,00
	- CV. Alba	-	108.000,00
	- Toko Audi Komputer	-	92.250,00
	- CV. Bina Putra	-	108.000,00
	- CV. Bina Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV. Griya Fortuna Buun	216.000,00	216.000,00
	- CV. Maju Jaya Borneo	108.000,00	108.000,00
	- Koperasi Rajawali Perkasa	108.000,00	108.000,00
	- CV. Putra Arut Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV. Sawit Sumber Mas Sarana	290.250,00	290.250,00
	- Bengkel Sumber Baru	579.000,00	579.000,00
	- Jaya Makmur	92.250,00	92.250,00
	- Kios Berkat Anugrah	162.000,00	162.000,00
	- CV. Alba	108.000,00	108.000,00
	- CV. Mulya	96.750,00	96.750,00
	- UD. Sinti	108.000,00	108.000,00
3	Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan PT Korindo TA. 2002	59.148.018,00	59.148.018,00
4	Piutang Retribusi Pasar dan Tebusan Blok Pasar Indra Kencana	97.249.320,00	97.249.320,00
5	Piutang Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	9.800.000,00	9.800.000,00
6	Piutang Bunga Dana UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.111.220,00	5.111.220,00
	Jumlah	175.342.231,00	177.389.331,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Aset yang Dibatasi Penggunaannya	32.154.484.809,80	44.116.138.774,80

Aset yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang telah ada peruntukannya yaitu saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah atau Kas Daerah. Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 senilai Rp32.154.484.809,80 sedangkan per 31 Desember 2019 Rp44.116.138.774,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.961.653.965,00. Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada tabel 5.53.



Tabel 5.53
Rincian Aset yang Dibatasi Penggunaannya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dana DBH-DR	19.002.151.290,00	35.634.003.985,00
2	DAK Fisik	1.160.776.487,80	895.870.219,80
3	BOP PAUD	534.276.000,00	7.200.000,00
4	BOKB	448.614.427,00	638.699.343,00
5	Dana BOK	6.047.459.853,00	2.362.872.964,00
6	Dana BOK Tambahan	824.772.715,00	-
7	Dana CHT	23.307.051,00	-
8	Dana Desa	-	2.249.343.200,00
9	Dana Sertifikasi Guru	3.001.276.480,00	824.156.380,00
10	Dana Tamsil Guru	15.513.000,00	211.000.000,00
11	Dana Tunjangan Khusus Guru	185.199.500,00	77.179.600,00
12	Dana Amiduk	149.353.132,00	193.523.841,00
13	Dana Kelurahan	598.364.848,00	557.180.694,00
14	BOP Kesetaraan	89.278.426,00	361.650.000,00
15	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	61.341.600,00	31.636.700,00
16	Dana Pelayanan Kepariwisata	12.800.000,00	71.821.848,00
Jumlah		32.154.484.809,80	44.116.138.774,80

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Aset Tak Berwujud	49.212.867.367,00	46.315.302.925,00

Saldo Aset Tak Berwujud berasal dari pengadaan belanja modal dan belanja selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp2.897.564.442,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp49.212.867.367,00. Rincian penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.54
Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset Tak Berwujud		46.315.302.925,00
1	Penambahan:	2.897.564.442,00
	Pengadaan Belanja Modal Aset Tak Berwujud tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud	2.158.969.442,00
	Pengadaan Belanja Modal selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud	539.110.000,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020	199.485.000,00
2	Pengurangan:	-
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud		49.212.867.367,00



- 1) Penambahan Aset Tak Berwujud total senilai Rp2.897.564.442,00 berasal dari:
 - a. Pengadaan Belanja Modal – Aset Tak Berwujud tahun 2020 yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud hanya senilai Rp2.158.969.442,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Aset Tak Berwujud Rp4.842.414.442,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp2.683.445.000,00 dari Belanja Modal – Aset Tak Berwujud tahun 2020 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Aset Tak Berwujud pada:
 - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.517.971.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin dan Rp164.874.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp600.000,00 berupa kotak pengaduan sehingga dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin
 - b. Pengadaan Belanja Modal selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud senilai Rp539.110.000,00 pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa *e-book* senilai Rp440.000.000,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - Sekretariat Daerah senilai Rp99.110.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020 senilai Rp199.485.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang memenuhi kapitalisasi Aset Tak Berwujud yaitu berupa Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang berasal dari belanja jasa konsultasi perencanaan Detail Engineering Design/DED.
- 2) Tidak terdapat pengurangan Aset Tak Berwujud selama tahun 2020.

Daftar saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.55
Daftar Saldo Aset Tak Berwujud SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.578.500,00	300.578.500,00
2	Dinas Kesehatan	14.723.500,00	14.723.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.465.743.000,00	1.180.480.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.635.369.285,00	22.550.846.285,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	147.950.000,00	-
6	Dinas Sosial	227.800.000,00	29.950.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.718.000,00	14.718.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	18.700.000,00	18.700.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
9	Dinas Lingkungan Hidup	902.873.000,00	902.873.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.135.000,00	76.950.000,00
11	Dinas Perhubungan	8.266.582.040,00	8.216.697.040,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.203.668.000,00	1.029.703.000,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	609.818.000,00	536.338.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	282.013.242,00	221.920.000,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	199.485.000,00	-
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.345.000,00	94.345.000,00
17	Dinas Perikanan	466.950.000,00	466.950.000,00
18	Dinas Pariwisata	49.830.000,00	49.830.000,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.850.000,00	44.850.000,00
20	Sekretariat Daerah	730.511.000,00	631.401.000,00
21	Inspektorat Kabupaten	99.192.500,00	99.192.500,00
22	Kecamatan Arut Selatan	63.725.200,00	48.950.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.897.899.800,00	6.897.899.800,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.297.994.200,00	1.297.994.200,00
25	Badan Pendapatan Daerah	767.462.000,00	767.462.000,00
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	304.925.600,00	304.925.600,00
27	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	517.025.500,00	517.025.500,00
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud		49.212.867.367,00	46.315.302.925,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Amortisasi	(37.637.624.341,00)	(32.610.048.993,00)

Amortisasi adalah perhitungan akumulasi penyusutan untuk Aset Tak Berwujud dimana per 31 Desember 2020 saldonya senilai (Rp37.637.624.341,00) sedangkan per 31 Desember 2019 senilai (Rp32.610.048.993,00). Adapun daftar saldo akhir Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.56
Daftar Saldo Amortisasi SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(280.407.200,00)	(263.859.100,00)
2	Dinas Kesehatan	(14.723.500,00)	(11.778.800,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(818.080.000,00)	(624.981.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(17.680.328.685,00)	(15.203.975.585,00)



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(14.718.000,00)	(14.718.000,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan	(18.700.000,00)	(18.700.000,00)
7	Dinas Sosial	(11.980.000,00)	(5.990.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	(704.825.400,00)	(559.797.800,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(64.190.000,00)	(57.810.000,00)
10	Dinas Perhubungan	(6.853.411.776,00)	(5.616.331.888,00)
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(415.685.800,00)	(209.745.200,00)
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(536.338.000,00)	(536.338.000,00)
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(123.760.000,00)	(93.280.000,00)
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(39.897.000,00)	-
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(78.787.000,00)	(75.685.000,00)
16	Dinas Perikanan	(444.554.000,00)	(428.956.000,00)
17	Dinas Pariwisata	(29.898.000,00)	(19.932.000,00)
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(44.850.000,00)	(44.850.000,00)
19	Sekretariat Daerah	(577.253.000,00)	(503.321.000,00)
20	Inspektorat Kabupaten	(35.684.000,00)	(15.845.500,00)
21	Kecamatan Arut Selatan	(48.950.000,00)	(48.950.000,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(6.129.931.080,00)	(5.692.827.720,00)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.248.012.800,00)	(1.228.045.700,00)
24	Badan Pendapatan Daerah	(600.708.000,00)	(531.079.600,00)
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(304.925.600,00)	(286.225.600,00)
26	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	(517.025.500,00)	(517.025.500,00)
Saldo Akhir Amortisasi		(37.637.624.341,00)	(32.610.048.993,00)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5) Aset Lain-lain	21.715.281.878,00	20.232.361.725,39

Aset Lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Aset dalam kondisi Rusak Berat yang diusulkan untuk dihapuskan, aset hasil penilaian, aset dalam proses Hibah, aset dalam proses Lelang, dan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019, terdapat penambahan senilai Rp1.482.920.152,61 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp21.715.281.878,00. Penambahan/pengurangan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 dijelaskan dalam tabel 5.57.



Tabel 5.57
Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Aset Lain-lain	20.232.361.725,39
1	Penambahan:	5.880.857.159,74
	Reklasifikasi masuk karena Rusak Berat	521.570.573,00
	Reklasifikasi masuk karena Lelang tahun 2020	2.911.551.586,74
	Reklasifikasi masuk karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	1.958.535.000,00
	Hibah	299.700.000,00
	Hasil Penilaian tahun 2020	189.500.000,00
2	Pengurangan:	4.397.937.007,13
	Penghapusan karena Lelang tahun 2020	3.916.597.007,13
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	481.340.000,00
	Saldo Akhir Aset Lain-lain	21.715.281.878,00

- 1) Penambahan saldo Aset Lain-lain total senilai Rp5.880.857.159,74 disebabkan antara lain oleh:
 - a. Reklasifikasi masuk karena Rusak Berat senilai Rp521.570.573,00 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp415.070.573,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp106.500.000,00
 - b. Reklasifikasi masuk karena Lelang tahun 2020 senilai Rp2.911.551.586,74 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp866.750.278,00
 - Dinas Kesehatan Rp1.458.359.790,00
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp244.000.000,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp13.894.000,00 berupa bongkaran atap bangunan aula kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp179.197.518,74
 - Kecamatan Pangkalan Lada Rp149.350.000,00
 - d. Reklasifikasi masuk karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain senilai Rp1.958.535.000,00 pada:
 - Sekretariat Daerah senilai Rp1.514.535.000,00 ke Kodim 1014/Pbn sesuai dengan BAST Nomor 032/215.a/IV/II.BPKAD/2020 Tanggal 25 Februari 2020
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Rp444.000.000,00
 - e. Hibah senilai Rp299.700.000,00 yang terdapat pada:
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp34.750.000,00
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp264.950.000,00
 - f. Hasil Penilaian tahun 2020 sebesar Rp189.500.000,00 pada Sekretariat Daerah



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- 2) Pengurangan saldo Aset Lain-lain total senilai Rp4.397.937.007,13 disebabkan oleh:
- Penghapusan karena Lelang tahun 2020 senilai Rp3.916.597.007,13 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/190/IV.III/SK/BPKAD/2020 Tanggal 22 Desember 2020 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.105.060.278,00
 - Dinas Kesehatan Rp1.458.359.790,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp61.740.000,00
 - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp26.805.000,00
 - Dinas Perhubungan senilai Rp7.000.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 2
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp246.125.000,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp13.894.000,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp24.366.420,39
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp192.697.518,74
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp7.500.000,00 berupa 2 unit Kendaraan Dinas Roda 2
 - Sekretariat DPRD Rp444.000.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Lada Rp149.350.000,00
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp4.700.000,00
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rp5.100.000,00
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Rp169.899.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap total senilai Rp481.340.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa Aset Pinjam Pakai yang dikembalikan dari Pengadilan Negeri Rp281.340.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/213/BU.III/2020 Tanggal 22 Desember 2020, dan Rp200.000.000 berupa 1 unit Mini Bus KH2689G yang kemudian dialihkan ke Kecamatan Arut Selatan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/210/BU.III/2020 Tanggal 21 Agustus 2020.

Daftar saldo akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58
Daftar Saldo Aset Lain-lain SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.867.013.819,00	8.690.253.246,00
2	Dinas Kesehatan	343.075.042,00	343.075.042,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	932.880.000,00	994.620.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	105.000.000,00	105.000.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.700.000,00	3.700.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.737.500,00	61.737.500,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
7	Dinas Sosial	101.000,00	101.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	108.500.000,00	2.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	-	26.805.000,00
10	Dinas Perhubungan	4,00	7.000.004,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.125.000,00	4.250.000,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	82.100.000,00	82.100.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	24.366.420,39
14	Dinas Pariwisata	56.600.000,00	56.600.000,00
15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	441.150.000,00	419.900.000,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	268.950.000,00	11.500.000,00
17	Sekretariat Daerah	8.829.500.504,00	7.606.805.504,00
18	Sekretariat DPRD	-	444.000.000,00
19	Inspektorat Kabupaten	3.859.000,00	3.859.000,00
20	Kecamatan Pangkalan Lada	4.000.000,00	4.000.000,00
21	Kecamatan Pangkalan Banteng	12.800.000,00	12.800.000,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	4.700.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	285.000.000,00	285.000.000,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	5.100.000,00
25	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.307.190.009,00	1.033.089.009,00
Saldo Akhir Aset Lain-lain		21.715.281.878,00	20.232.361.725,39

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.461.605.757,24)	(3.475.749.601,38)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 senilai (Rp6.461.605.757,24) sedangkan per 31 Desember 2019 (Rp3.475.749.601,38) yang merupakan akumulasi penyusutan aset rusak berat, aset yang dimanfaatkan pihak lain, dan aset dalam proses lelang. Berikut ini adalah daftar SKPD yang memiliki saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

Tabel 5.59
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.001.396.700,92)	(42.794.454,73)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	(61.740.000,00)
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(105.000.000,00)	(105.000.000,00)
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(29.817.900,49)	-



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5	Dinas Lingkungan Hidup	-	(26.805.000,00)
6	Dinas Perhubungan	(4,00)	(7.000.004,00)
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(19.704.539,51)	(19.704.539,51)
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	(2.436.375,20)
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	(83.718.459,15)	(62.468.459,15)
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(210.613.908,15)	(9.000.000,00)
11	Sekretariat Daerah	(1.970.390.224,68)	(2.090.599.907,28)
12	Sekretariat DPRD	-	(380.621.040,25)
13	Badan Pendapatan Daerah	(40.964.020,34)	(40.964.020,34)
14	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-	(626.615.800,92)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(6.461.605.757,24)	(3.475.749.601,38)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2 Kewajiban	147.903.816.749,95	38.678.771.352,90

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki saldo Kewajiban yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp147.903.816.749,95 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.678.771.352,90.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	147.903.816.749,95	38.678.771.352,90

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp147.903.816.749,95 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.678.771.352,90. Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Lancar (kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan) yaitu kewajiban yang timbul akibat adanya kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta adanya kewajiban yang timbul akibat penyedia jasa telah menyediakan jasa akan tetapi pembayarannya di kemudian hari sehingga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan aliran kas keluar.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Pendapatan Diterima Di Muka	53.626.410,96	40.600.000,00

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp53.626.410,96 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp40.600.000,00 yang merupakan pendapatan atas Sewa Barang Milik Daerah pada RSUD Sultan Imanuddin dan Dinas Kesehatan.



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Utang Belanja	111.850.190.338,99	38.638.171.352,90

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 terdiri dari utang belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar Rp111.850.190.338,99 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.638.171.352,90. Berikut ini adalah daftar saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD:

Tabel 5.60
Daftar Utang Belanja SKPD

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.432.194.589,00	404.692.277,00
2	Dinas Kesehatan	6.946.025.607,00	1.579.084.347,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	48.432.116.319,68	24.944.549.064,90
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.526.692.762,00	254.171.626,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	266.955.373,00	112.505.497,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	611.768.456,00	328.382.008,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	295.618.997,00	143.859.284,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	236.573.152,00	152.750.199,00
9	Dinas Sosial	309.159.742,00	174.270.399,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.470.896,00	163.882.535,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	340.220.370,00	220.200.381,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	293.821.128,00	128.344.013,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	360.667.315,00	188.412.481,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	344.929.063,00	224.851.027,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	317.592.240,00	176.077.618,00
16	Dinas Perhubungan	324.023.266,00	164.118.465,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	346.594.649,00	258.505.809,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	429.991.708,00	239.289.487,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	319.212.746,00	188.192.486,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	291.048.568,00	145.419.491,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	373.004.219,00	160.450.724,00
22	Dinas Perikanan	277.240.649,00	144.015.141,00
23	Dinas Pariwisata	331.730.580,00	176.800.413,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	888.249.695,00	565.282.197,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	384.093.729,00	187.459.248,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
26	DPRD	7.807.506,00	-
27	Sekretariat Daerah	1.018.599.802,00	493.784.857,00
28	Sekretariat DPRD	193.771.383,00	122.069.622,00
29	Inspektorat Kabupaten	323.388.195,00	200.040.621,00
30	Kecamatan Arut Selatan	568.138.959,00	300.372.044,00
31	Kecamatan Arut Utara	206.447.205,00	186.733.005,00
32	Kecamatan Kumai	326.566.398,00	191.689.486,00
33	Kecamatan Kotawaringin Lama	238.941.744,00	141.491.776,00
34	Kecamatan Pangkalan Lada	127.642.433,00	74.735.048,00
35	Kecamatan Pangkalan Banteng	188.409.996,00	75.900.477,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	401.160.944,00	179.737.600,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	374.661.602,00	194.134.915,00
38	Badan Pendapatan Daerah	347.228.302,31	392.318.602,00
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	283.072.051,00	167.657.082,00
40	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	5.214.358.000,00	4.491.940.000,00
Saldo Akhir Utang Belanja		111.850.190.338,99	38.638.171.352,90

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Utang Jangka Pendek Lainnya	36.000.000.000,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020 merupakan pinjaman jangka pendek dari Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp36.000.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.3 Ekuitas	2.938.058.435.002,57	2.686.753.574.941,88

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu selisih antara Aset Rp3.085.962.251.752,52 dan Kewajiban Rp147.903.816.749,95. Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.938.058.435.002,57 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.686.753.574.941,88 atau mengalami kenaikan sebesar Rp251.304.860.060,69.



5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.1 Pendapatan – LO	1.535.448.527.918,09	1.299.385.297.164,88

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.535.448.527.918,09 dan TA. 2019 sebesar Rp1.299.385.297.164,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Pendapatan – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	297.799.584.382,39	181.498.369.592,09
2	Pendapatan Transfer-LO	1.137.966.033.146,36	1.047.622.586.701,33
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	99.682.910.389,34	70.264.340.871,46
Jumlah		1.535.448.527.918,09	1.299.385.297.164,88

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	297.799.584.382,39	181.498.369.592,09

Rekening ini menggambarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk TA. 2020 dan TA. 2019. Pendapatan Asli Daerah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp297.799.584.382,39.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Pendapatan Pajak Daerah	66.328.550.464,37	57.071.408.999,15

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuannya terjadi pada



saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan Pajak Daerah dan tidak termasuk pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2020. Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp66.328.550.464,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Pajak Hotel	837.257.037,61	2.049.752.618,73
2	Pajak Restoran	2.408.553.940,80	3.569.477.150,95
3	Pajak Hiburan	228.170.887,45	510.063.987,36
4	Pajak Reklame	843.465.061,89	1.410.136.240,91
5	Pajak Penerangan Jalan	20.612.273.167,12	18.968.134.783,00
6	Pajak Parkir	174.687.000,00	119.632.400,00
7	Pajak Air Tanah	34.400.043,00	42.350.443,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.270.171.300,00	1.045.851.850,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.756.069.554,87	3.558.102.641,20
10	Pajak Bumi dan Bangunan	14.310.581.052,63	12.241.360.274,00
11	BPHTB	21.852.921.419,00	13.556.546.610,00
	Jumlah	66.328.550.464,37	57.071.408.999,15

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Pendapatan Retribusi Daerah	13.589.810.282,00	13.803.201.987,00

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 23 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.589.810.282,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.63
Daftar Pendapatan Retribusi Daerah SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Kesehatan	3.911.951.633,00	4.176.370.571,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	148.600.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.262.808.450,00	1.956.441.350,00
4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	358.230.000,00	-



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
5	Dinas Lingkungan Hidup	184.007.566,00	167.341.500,00
6	Dinas Perhubungan	2.835.442.600,00	2.256.654.050,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	249.734.286,00	172.006.595,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.818.346.375,00	2.402.560.950,00
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.687.353.009,00	1.322.010.640,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	34.100.000,00	16.400.000,00
11	Dinas Perikanan	422.199.000,00	298.212.000,00
12	Dinas Pariwisata	391.651.000,00	442.382.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	45.000.000,00	70.000.000,00
14	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	186.839.000,00	168.092.000,00
15	Sekretariat Daerah	100.300.000,00	59.880.000,00
16	Kecamatan Arut Selatan	17.999.730,00	42.822.815,00
17	Kecamatan Arut Utara	1.029.620,00	1.501.536,00
18	Kecamatan Kumai	1.709.400,00	15.213.660,00
19	Kecamatan Kotawaringin Lama	2.809.523,00	6.324.550,00
20	Kecamatan Pangkalan Lada	14.312.670,00	9.163.420,00
21	Kecamatan Pangkalan Banteng	32.886.420,00	5.911.850,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.400.000,00	65.312.500,00
23	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.700.000,00	-
Jumlah		13.589.810.282,00	13.803.201.987,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.327.140.787,00	8.941.166.757,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.327.140.787,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Pembangunan Kalteng	9.327.140.787,00	8.931.136.872,00
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PD Jamkrida	-	10.029.885,00
Jumlah		9.327.140.787,00	8.941.166.757,00



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.554.082.849,02	101.682.591.848,94

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah masing-masing SKPD untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp208.554.082.849,02 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.65
Daftar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Kesehatan	6.994.110.089,04	7.071.951.951,00
2	RSUD Sultan Imanuddin	193.679.439.357,25	86.433.789.930,13
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	2.338.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	47.995.500,00	18.115.963,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	337.488,00	76.680,00
6	Dinas Perhubungan	115.800.000,00	469.700,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.398.468,00	4.014.573,00
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.141.587,96	24.452.938,52
9	Dinas Perikanan	544.310.600,00	-
10	Kecamatan Arut Selatan	-	254.202,00
11	Kecamatan Kumai	-	201.398,40
12	Kecamatan Pangakalan Lada	-	510.180,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.716.940.115,77	8.013.879.328,65
14	Badan Pendapatan Daerah	443.609.643,00	112.537.004,24
Jumlah		208.554.082.849,02	101.682.591.848,94

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	1.137.966.033.146,36	1.047.622.586.701,33

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya dan Provinsi yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendapatan Transfer – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.137.966.033.146,36 dengan rincian pada tabel 5.66.



Tabel 5.66
Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	958.924.263.043,00	961.791.162.166,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	81.761.160.000,00	29.855.908.600,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	97.280.610.103,36	55.975.515.935,33
Jumlah		1.137.966.033.146,36	1.047.622.586.701,33

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah- LO	99.682.910.389,34	70.264.340.871,46

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp99.682.910.389,34 terdiri dari:

Tabel 5.67
Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Pendapatan Hibah	99.227.910.389,34	69.879.340.871,46
2	Pendapatan Lainnya	455.000.000,00	385.000.000,00
Jumlah		99.682.910.389,34	70.264.340.871,46

Berdasarkan tabel 5.67 di atas, Pendapatan Hibah – LO selama tahun 2020 sebesar Rp99.227.910.389,34 adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Hibah barang berupa Aset Tetap yang diakui sebagai Pendapatan Hibah – LO adalah sebesar nilai bukunya sedangkan Hibah berupa persediaan dan uang yang diakui sebagai Pendapatan Hibah – LO adalah sebesar nilai perolehannya. Pendapatan Lainnya – LO sebesar Rp455.000.000,00 merupakan pendapatan yang diterima oleh SKPD tertentu dari Sumbangan Pihak Ketiga di tahun 2020, SKPD dimaksud adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 5.68 menyajikan rincian Pendapatan Hibah – LO berupa Aset Tetap, Persediaan dan Uang yang diterima oleh masing-masing SKPD untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020.



Tabel 5.68
Rincian Pendapatan Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai
ASET TETAP		47.845.071.151,89
Tanah		5.533.099.050,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.734.600.000,00
2	Kecamatan Kotawaringin Lama	280.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	593.094.750,00
4	Dinas Perhubungan	932.512.000,00
5	Dinas Pariwisata	272.612.300,00
Peralatan dan Mesin		2.678.199.198,91
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.410.207,21
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	127.000.000,00
3	Dinas Sosial	22.650.242,94
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	713.958.020,51
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.526.415.709,16
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	94.814.127,24
7	Dinas Pariwisata	69.300.000,00
8	Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	55.836.091,85
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.814.800,00
Gedung dan Bangunan		13.304.975.743,26
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.807.483.131,34
2	Rumah Sakit Umum Daerah	4.701.231.515,88
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.419.543.711,88
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	781.433.559,09
5	Dinas Pariwisata	1.445.283.825,07
6	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		26.304.345.024,72
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.304.345.024,72
Aset Tetap Lainnya		24.452.135,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.452.135,00
PERSEDIAAN		13.746.213.053,86
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.200.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	676.902.600,00
3	Dinas Kesehatan	7.172.561.437,76
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.360.000,00
5	Sekretariat Daerah	5.340.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	759.187.690,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	4.367.003.795,10
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	299.730.088,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.894.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	366.938.333,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan-persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	4.637.600,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan-persediaan barang yang telah diserahkan kepada masyarakat	6.457.510,00
UANG		37.636.626.183,59
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	349.650.000,00
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dana BOS)	35.161.976.203,59
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.999.999.980,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.000.000,00
Jumlah		99.227.910.389,34



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.2	Beban – LO	1.280.723.248.945,70	1.258.638.378.712,13

Beban – LO merupakan beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban – LO Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.280.723.248.945,70 yang terdiri dari:

Tabel 5.69
Rincian Beban – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Beban Operasi	1.204.107.942.545,70	1.174.445.964.927,13
2	Beban Transfer	76.615.306.400,00	84.192.413.785,00
	Jumlah	1.280.723.248.945,70	1.258.638.378.712,13

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.2.1	Beban Operasi	1.204.107.942.545,70	1.174.445.964.927,13

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.204.107.942.545,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Beban Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Beban Pegawai	458.012.501.009,95	483.589.757.475,50
2	Beban Persediaan	103.257.689.915,22	70.604.095.093,89
3	Beban Jasa	261.589.681.680,61	208.837.067.169,94
4	Beban Pemeliharaan	24.356.503.297,32	33.906.741.098,17
5	Beban Perjalanan Dinas	32.454.937.262,43	56.106.712.073,00
6	Beban Bunga	-	200.000.006,00
7	Beban Hibah	50.805.254.807,88	33.554.095.115,14
8	Beban Bantuan Sosial	3.093.000.000,00	1.161.500.000,00
9	Beban Penyusutan	259.733.790.355,32	275.083.697.679,39
10	Beban Amortisasi	5.027.575.348,00	5.720.718.668,00
11	Beban Penyisihan Piutang	5.777.008.868,97	5.486.580.548,10
12	Beban Lain-lain	-	195.000.000,00
	Jumlah	1.204.107.942.545,70	1.174.445.964.927,13



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Pegawai	458.012.501.009,95	483.589.757.475,50

Beban ini merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp458.012.501.009,95. Beban Pegawai pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71
Daftar Beban Pegawai SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	196.631.920.040,00	200.901.789.053,00
2	Dinas Kesehatan	42.856.624.393,00	48.402.850.325,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	26.355.695.813,64	25.512.953.985,50
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.288.245.013,00	8.214.787.047,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.873.565.282,00	3.239.614.533,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	7.847.544.578,00	8.901.453.055,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.280.923.498,00	3.758.993.992,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.340.075.141,00	3.802.905.579,00
9	Dinas Sosial	4.154.740.111,00	4.623.379.049,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.846.903.757,00	4.392.465.771,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.055.296.117,00	4.140.597.067,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.697.766.330,00	3.774.274.268,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.354.846.946,00	4.888.571.344,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.467.912.811,00	5.161.532.603,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.117.059.845,00	4.680.527.317,00
16	Dinas Perhubungan	4.143.170.905,00	4.910.741.879,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	4.357.530.135,00	4.639.632.068,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5.945.223.145,00	6.936.008.733,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.182.527.644,00	4.912.855.555,00
20	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	3.734.707.934,00	4.119.591.034,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.797.784.245,00	4.265.364.590,00
22	Dinas Perikanan	3.260.353.390,00	3.772.026.454,00
23	Dinas Pariwisata	3.697.260.128,00	4.550.461.928,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	13.966.947.323,00	16.193.991.082,00
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	5.036.765.178,00	5.501.092.717,00
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.467.461.695,00	13.754.068.864,00
27	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	744.739.632,00	768.351.052,00
28	Sekretariat Daerah	12.345.571.275,00	13.505.298.707,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
29	Sekretariat DPRD	2.775.074.526,00	2.963.760.727,00
30	Inspektorat Kabupaten	4.703.079.687,00	5.281.369.017,00
31	Kecamatan Arut Selatan	8.114.982.416,00	8.909.558.000,00
32	Kecamatan Arut Utara	2.729.941.443,00	2.861.889.482,00
33	Kecamatan Kumai	4.572.075.331,00	4.672.269.375,00
34	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.369.551.737,00	3.826.249.760,00
35	Kecamatan Pangkalan Lada	1.779.278.863,00	2.280.696.488,00
36	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.183.390.267,00	2.254.230.720,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.567.276.914,00	5.152.396.907,00
38	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	16.500.406.698,00	13.223.527.686,00
39	Badan Pendapatan Daerah	4.973.215.226,31	5.353.520.017,00
40	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3.895.065.597,00	4.584.109.645,00
Jumlah		458.012.501.009,95	483.589.757.475,50

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Beban Persediaan	103.257.689.915,22	70.604.095.093,89

Beban ini merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp103.257.689.915,22. Beban Persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.72
Daftar Beban Persediaan SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15.349.974.909,65	12.865.793.680,92
2	Dinas Kesehatan	23.567.582.391,85	11.540.110.281,36
3	RSUD Sultan Imanuddin	51.625.944.956,01	29.905.065.984,10
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.301.497.779,52	1.067.888.145,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	111.146.840,00	95.688.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	134.063.450,00	190.720.750,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	81.618.200,00	220.432.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	681.308.096,00	465.504.983,00
9	Dinas Sosial	312.987.930,00	356.285.600,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	462.546.281,50	1.222.306.591,50
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	610.599.536,00	160.740.576,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	163.542.150,00	160.945.190,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	395.642.505,00	750.818.280,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	325.652.219,60	710.612.529,50
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	276.516.075,00	324.280.892,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
16	Dinas Perhubungan	210.766.700,00	301.847.188,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	193.952.180,00	239.283.050,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	554.072.150,00	397.505.888,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	131.419.970,00	206.116.870,00
20	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	763.267.567,00	914.370.350,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	89.477.500,00	125.992.650,00
22	Dinas Perikanan	892.784.659,00	1.145.005.900,00
23	Dinas Pariwisata	248.253.720,00	545.255.340,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	679.078.450,00	972.044.135,01
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	618.341.130,09	584.534.700,50
26	Sekretariat Daerah	800.748.038,00	2.141.099.209,00
27	Sekretariat DPRD	534.876.350,00	460.674.950,00
28	Inspektorat Kabupaten	112.178.760,00	92.326.000,00
29	Kecamatan Arut Selatan	518.705.837,00	688.623.816,00
30	Kecamatan Arut Utara	53.971.800,00	59.086.000,00
31	Kecamatan Kumai	268.591.100,00	118.347.500,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	121.328.650,00	115.040.300,00
33	Kecamatan Pangakalan Lada	48.415.110,00	50.447.305,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	57.601.000,00	45.596.921,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89.739.900,00	112.819.400,00
36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	305.496.324,00	492.620.808,00
37	Badan Pendapatan Daerah	405.617.700,00	549.858.420,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	158.382.000,00	208.404.910,00
Jumlah		103.257.689.915,22	70.604.095.093,89

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Beban Jasa	261.589.681.680,61	208.837.067.169,94

Beban ini merupakan Beban Jasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp261.589.681.680,61. Beban Jasa pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73
Daftar Beban Jasa SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	28.094.840.011,05	24.715.009.592,67
2	Dinas Kesehatan	47.584.066.390,00	30.227.698.341,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	102.733.861.768,78	54.699.627.074,89



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.388.210.858,00	8.703.651.557,72
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	998.360.356,00	1.101.563.783,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.373.171.692,00	3.694.264.524,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	333.936.859,00	770.055.974,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.803.175.393,00	2.380.279.427,00
9	Dinas Sosial	1.635.243.818,00	933.982.052,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.435.567.104,00	1.668.496.517,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.581.633.780,00	1.682.334.588,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	337.870.171,00	461.577.137,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	11.222.648.152,00	10.490.587.542,60
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	482.481.088,00	542.868.824,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	692.486.445,00	1.287.457.551,00
16	Dinas Perhubungan	2.235.896.177,00	2.259.147.231,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	3.861.500.019,00	3.358.984.755,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.827.516.838,04	4.491.492.837,96
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	527.837.362,00	973.806.860,00
20	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	1.385.040.099,00	2.313.026.215,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	881.081.966,00	980.026.414,00
22	Dinas Perikanan	1.302.996.740,00	2.020.006.740,00
23	Dinas Pariwisata	1.411.760.404,00	4.087.953.333,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1.588.336.232,00	2.231.837.302,00
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.672.246.714,00	1.919.510.970,00
26	Sekretariat Daerah	11.821.049.374,74	18.998.533.296,10
27	Sekretariat DPRD	3.894.447.817,00	4.248.538.866,00
28	Inspektorat Kabupaten	455.062.613,00	618.575.390,00
29	Kecamatan Arut Selatan	2.103.520.027,00	1.840.052.603,00
30	Kecamatan Arut Utara	470.911.447,00	422.685.032,00
31	Kecamatan Kumai	1.050.103.730,00	998.213.033,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	827.602.493,00	752.705.975,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	201.535.920,00	344.584.878,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	291.683.735,00	327.042.687,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.573.714.077,00	3.117.887.953,00
36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.512.798.739,00	2.963.261.153,00
37	Badan Pendapatan Daerah	1.818.399.698,00	2.313.388.383,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	1.177.085.573,00	3.896.350.777,00
Jumlah		261.589.681.680,61	208.837.067.169,94



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Beban Pemeliharaan	24.356.503.297,32	33.906.741.098,17

Beban ini merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp24.356.503.297,32. Beban Pemeliharaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.74
Daftar Beban Pemeliharaan SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.955.230.383,82	1.154.491.998,00
2	Dinas Kesehatan	1.125.568.685,00	725.865.835,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	2.300.123.006,00	2.899.642.269,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.934.420.551,50	17.863.927.015,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	24.501.500,00	72.012.200,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	580.162.400,00	730.204.500,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	35.091.452,00	81.367.001,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	640.474.601,00	403.309.178,00
9	Dinas Sosial	200.396.400,00	98.506.300,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	68.348.700,00	284.488.250,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24.644.020,00	100.905.636,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	48.679.381,00	34.837.330,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.397.646.490,00	3.308.400.045,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	67.638.681,00	233.603.198,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	130.713.074,00	92.824.556,00
16	Dinas Perhubungan	1.044.537.423,00	794.523.891,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	21.857.400,00	44.051.990,17
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	266.103.173,00	89.551.900,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.345.352,00	157.271.623,00
20	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	82.577.700,00	30.053.500,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	58.868.981,00	68.648.029,00
22	Dinas Perikanan	107.763.947,00	220.148.500,00
23	Dinas Pariwisata	86.435.388,00	63.746.150,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	163.970.350,00	275.476.028,00
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	79.481.214,00	130.761.356,00
26	Sekretariat Daerah	1.477.434.528,00	2.104.982.285,00
27	Sekretariat DPRD	446.478.396,00	524.548.949,00
28	Inspektorat Kabupaten	76.776.963,00	105.784.906,00
29	Kecamatan Arut Selatan	786.101.700,00	146.400.400,00
30	Kecamatan Arut Utara	52.099.800,00	46.652.600,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
31	Kecamatan Kumai	176.439.100,00	107.125.300,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	128.417.000,00	107.628.400,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	22.298.500,00	25.811.900,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	26.020.000,00	92.359.500,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79.739.029,00	100.540.177,00
36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	331.644.396,00	379.112.828,00
37	Badan Pendapatan Daerah	153.893.332,00	156.268.475,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	61.580.300,00	50.907.100,00
Jumlah		24.356.503.297,32	33.906.741.098,17

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5) Beban Perjalanan Dinas	32.454.937.262,43	56.106.712.073,00

Beban ini merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.454.937.262,43. Beban Perjalanan Dinas pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.75
Daftar Beban Perjalanan Dinas SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.115.258.103,43	4.682.916.766,00
2	Dinas Kesehatan	9.650.309.217,00	11.371.933.665,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	200.786.602,00	692.305.169,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	554.115.413,00	1.131.289.823,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	305.795.473,00	610.661.127,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	733.226.471,00	1.293.728.691,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	548.788.156,00	892.271.987,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	417.484.976,00	888.342.425,00
9	Dinas Sosial	461.389.254,00	727.558.876,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	367.601.318,00	744.912.331,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	603.342.537,00	744.045.621,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	285.534.383,00	585.142.115,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	240.290.159,00	704.577.346,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	199.162.796,00	556.131.293,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	750.711.877,00	1.422.653.283,00
16	Dinas Perhubungan	314.147.186,00	611.351.529,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	177.431.412,00	821.511.057,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	550.316.700,00	1.043.767.400,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	225.335.672,00	654.361.056,00
20	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	523.388.126,00	944.074.477,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	138.491.311,00	407.805.545,00
22	Dinas Perikanan	296.038.338,00	923.684.956,00
23	Dinas Pariwisata	286.077.027,00	1.096.221.381,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1.192.546.134,00	1.824.912.699,00
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	404.068.100,00	807.731.604,00
26	Sekretariat Daerah	1.629.949.031,00	4.795.456.888,00
27	Sekretariat DPRD	4.569.221.418,00	4.932.973.420,00
28	Inspektorat Kabupaten	1.953.032.442,00	2.025.692.612,00
29	Kecamatan Arut Selatan	228.282.364,00	387.091.781,00
30	Kecamatan Arut Utara	247.588.700,00	358.744.956,00
31	Kecamatan Kumai	248.762.900,00	432.755.027,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	160.768.000,00	314.660.587,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	206.416.205,00	309.871.500,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	372.903.000,00	306.040.802,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	391.259.155,00	1.544.961.823,00
36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	795.463.834,00	1.670.888.943,00
37	Badan Pendapatan Daerah	770.705.900,00	1.516.968.912,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	338.947.572,00	1.326.712.600,00
Jumlah		32.454.937.262,43	56.106.712.073,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6) Beban Bunga	0,00	200.000.006,00

Beban Bunga periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan TA. 2019 sebesar Rp200.000.006,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7) Beban Hibah	50.805.254.807,88	33.554.095.115,14

Beban Hibah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp50.805.254.807,88 yaitu Beban Hibah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (PPKD) dan SKPD dalam bentuk program kegiatan. Beban Hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel 5.76.



Tabel 5.76
Daftar Beban Hibah SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.333.071.550,00	4.111.811.206,53
2	Dinas Kesehatan	-	69.400.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.865.888.476,88	6.284.897.280,32
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.607.500.000,00	570.815.276,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	1.124.296.900,00
6	Dinas Sosial	7.225.481.340,00	40.710.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.792.769.734,00	170.955.400,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	234.408.458,00	579.749.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	366.938.333,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	893.910.950,00	10.500.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	705.398.880,00	838.234.997,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	166.760.000,00	186.500.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18.500.000,00	31.000.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.246.331.670,00	544.290.500,00
15	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	149.740.000,00	581.306.000,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.457.510,00	35.700.000,00
17	Dinas Perikanan	11.014.530.436,00	3.281.529.036,29
18	Dinas Pariwisata	584.777.000,00	518.021.600,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	3.675.606.400,00	5.210.086.178,00
20	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.930.783.500,00	796.081.400,00
21	Sekretariat Daerah	70.000.000,00	545.750.000,00
22	Kecamatan Arut Selatan	1.031.021.885,00	114.790.000,00
23	Kecamatan Arut Utara	5.000.000,00	-
24	Kecamatan Kumai	528.984.685,00	103.616.000,00
25	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	7.351.394.000,00	7.804.054.341,00
Jumlah		50.805.254.807,88	33.554.095.115,14

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
8) Beban Bantuan Sosial	3.093.000.000,00	1.161.500.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.093.000.000,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.161.500.000,00 yang dikelola khusus oleh Bendahara Umum Daerah.



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
9) Beban Penyusutan	259.733.790.355,32	275.083.697.679,39

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari penyusutan seluruh aset tetap dalam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp259.733.790.355,32. Beban Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel 5.77.

Tabel 5.77
Daftar Beban Penyusutan SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.905.584.805,08	10.425.816.847,32
2	Dinas Kesehatan	8.592.217.390,21	7.779.441.651,62
3	RSUD Sultan Imanuddin	25.290.946.168,08	24.193.011.098,38
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.756.453.013,60	196.431.480.197,29
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.288.158.897,84	1.231.812.569,20
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.469.567.675,45	556.417.927,60
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.258.480,45	133.684.807,85
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.317.695.068,90	4.104.138.506,19
9	Dinas Sosial	177.608.270,18	112.132.512,16
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	791.531.279,01	733.110.167,43
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	540.016.084,91	521.955.130,42
12	Dinas Ketahanan Pangan	103.520.766,84	123.085.333,76
13	Dinas Lingkungan Hidup	2.462.455.971,53	2.287.430.292,87
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	392.967.449,49	292.422.399,46
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74.609.063,02	100.016.113,88
16	Dinas Perhubungan	2.338.384.786,41	2.355.194.674,43
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.145.932.705,78	434.356.247,34
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.229.428.696,30	2.122.346.559,26
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	312.354.934,98	316.560.520,66
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	757.934.748,50	644.967.833,74
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	372.911.200,47	292.262.644,32
22	Dinas Perikanan	2.966.457.696,12	3.689.476.009,97
23	Dinas Pariwisata	1.364.951.815,54	1.504.837.212,98
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2.723.353.499,20	3.592.004.357,80
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.224.200.828,64	1.280.751.988,77
26	Sekretariat Daerah	4.310.780.821,42	4.322.395.819,85
27	Sekretariat DPRD	1.091.259.700,53	874.070.208,68



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
28	Inspektorat Kabupaten	302.315.115,25	269.592.686,06
29	Kecamatan Arut Selatan	938.180.017,77	629.030.249,36
30	Kecamatan Arut Utara	274.440.492,60	246.856.028,51
31	Kecamatan Kumai	585.734.327,91	255.987.934,75
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	627.154.125,15	365.228.724,75
33	Kecamatan Pangkalan Lada	203.375.992,19	208.321.078,57
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	335.054.382,93	201.912.823,53
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	747.690.537,85	759.392.782,44
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	864.881.762,12	843.933.822,46
37	Badan Pendapatan Daerah	323.703.212,34	391.126.765,71
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	393.881.388,43	445.552.228,15
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	15.837.182,30	11.582.921,87
Jumlah		259.733.790.355,32	275.083.697.679,39

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
10) Beban Amortisasi	5.027.575.348,00	5.720.718.668,00

Beban ini merupakan Beban Amortisasi yang berasal dari penyusutan seluruh Aset Tak Berwujud dalam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.027.575.348,00. Rincian Beban Amortisasi pada masing-masing SKPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.78
Daftar Beban Amortisasi SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16.548.100,00	33.289.100,00
2	Dinas Kesehatan	2.944.700,00	2.944.700,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	193.099.000,00	206.462.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.476.353.100,00	2.673.129.800,00
5	Dinas Sosial	5.990.000,00	5.990.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	2.943.600,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	145.027.600,00	145.027.600,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.380.000,00	6.380.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.237.079.888,00	1.368.420.508,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	205.940.600,00	104.872.600,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	8.393.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.480.000,00	25.784.000,00
13	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	39.897.000,00	-
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.102.000,00	10.190.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
15	Dinas Perikanan	15.598.000,00	15.598.000,00
16	Dinas Pariwisata	9.966.000,00	9.966.000,00
17	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	-	4.990.000,00
18	Sekretariat Daerah	73.932.000,00	113.600.200,00
19	Kecamatan Arut Selatan	-	9.790.000,00
20	Inspektorat Kabupaten	19.838.500,00	15.845.500,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	437.103.360,00	751.019.160,00
22	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	19.967.100,00	99.929.500,00
23	Badan Pendapatan Daerah	69.628.400,00	87.453.400,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	18.700.000,00	18.700.000,00
Jumlah		5.027.575.348,00	5.720.718.668,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
11) Beban Penyisihan Piutang	5.777.008.868,97	5.486.580.548,10

Beban ini merupakan Beban Penyisihan Piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.777.008.868,97 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.79
Daftar Beban Penyisihan Piutang SKPD

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	TA. 2020	TA. 2019
1	Dinas Kesehatan	43.576.000,00	3.894.733,80
2	RSUD Sultan Imanuddin	3.708.953.352,27	243.348.227,01
3	Dinas Lingkungan Hidup	6.848.500,00	6.072.500,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25.315.769,40	-
5	Dinas Perhubungan	81.801.250,00	167.504.500,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.348.385,20	4.531.726,20
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42.333.546,25	28.011.693,75
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.553.806,00	12.980.532,15
9	Dinas Perikanan	150.000,00	750.000,00
10	Kecamatan Arut Selatan	7.938,00	-
11	Kecamatan Pangkalan Banteng	85.000,00	-
12	Sekretariat Daerah	2.515.000,00	300.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	683.000,00	12.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	1.854.837.321,85	5.019.174.635,19
Jumlah		5.777.008.868,97	5.486.580.548,10



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
12) Beban Lain-lain	0,00	195.000.000,00

Beban Lain-lain merupakan beban yang terjadi akibat penurunan nilai Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan TA. 2019 sebesar Rp195.000.000,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.2.2 Beban Transfer	76.615.306.400,00	84.192.413.785,00

Beban Transfer untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp76.615.306.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rincian Beban Transfer

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	7.832.933.700,00	6.486.739.300,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	68.782.372.700,00	77.705.674.485,00
	Jumlah	76.615.306.400,00	84.192.413.785,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	254.725.278.972,39	40.746.918.452,75

Surplus Dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp254.725.278.972,39 dimana Pendapatan – LO sebesar Rp1.535.448.527.918,09 dan Beban – LO sebesar Rp1.280.723.248.945,70.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.4 Surplus Non-Operasional	1.258.076.353,36	2.183.539.824,85

Surplus dari Kegiatan Non-Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.258.076.353,36 sedangkan TA. 2019 sebesar Rp2.183.539.824,85.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.5 Defisit Non-Operasional	(5.184.302.292,51)	(5.098.731.583,41)

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp5.184.302.292,51) sedangkan TA. 2019 sebesar (Rp5.098.731.583,41).



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.6 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non-Operasional	(3.926.225.939,15)	(2.915.191.758,56)
<p>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non-Operasional merupakan penjumlahan antara Surplus Non-Operasional dan Defisit Non-Operasional, dimana sampai dengan 31 Desember 2020 Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional sebesar (Rp3.926.225.939,15) dan TA. 2019 sebesar (Rp2.915.191.758,56).</p>		
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.7 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	250.799.053.033,24	37.831.726.694,19
<p>Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional dan Non-Operasional, sehingga diperoleh Surplus Sebelum Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp250.799.053.033,24 dan TA. 2019 sebesar Rp37.831.726.694,19.</p>		
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.8 Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	(733.667.268,00)	0,00
<p>Defisit Dari Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp733.667.268,00) dikarenakan adanya Beban Luar Biasa berupa Belanja Tidak Terduga pada PPKD sedangkan TA. 2019 sebesar Rp0,00.</p>		
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.4.9 Surplus/(Defisit) – LO	250.065.385.765,24	37.831.726.694,19
<p>Surplus/(Defisit)-LO merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa selama satu periode pelaporan. Surplus-LO berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp250.065.385.765,24 sedangkan TA. 2019 sebesar Rp37.831.726.694,19.</p>		



5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas disajikan dengan pengklasifikasian menurut aktivitas yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris guna memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah. Penjelasan Arus Kas dari keempat aktivitas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi	1.448.577.184.457,94	1.356.743.314.843,90

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi atau aktivitas penerimaan kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp1.448.577.184.457,94 dan 31 Desember 2019 senilai Rp1.356.743.314.843,90 terinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.81
Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Penerimaan Pajak Daerah	64.838.822.752,80	51.527.738.156,10
2	Penerimaan Retribusi Daerah	13.208.556.926,00	13.532.547.717,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.804.364.851,00	8.941.166.757,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	136.365.772.873,48	95.550.543.620,24
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	29.764.009.462,00	57.921.302.247,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	34.619.424.857,00	38.813.631.459,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	602.446.484.000,00	670.997.942.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	292.094.344.724,00	194.058.286.460,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	163.174.967.600,00	106.059.541.400,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	64.243.460.228,07	81.343.170.283,22
11	Bantuan Keuangan dari Propinsi	400.000.000,00	550.000.000,00
12	Penerimaan Hibah	37.161.976.183,59	37.062.444.744,34
13	Penerimaan Lainnya	455.000.000,00	385.000.000,00
	Jumlah	1.448.577.184.457,94	1.356.743.314.843,90



		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.2	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	1.065.409.823.365,03	1.033.851.100.822,31

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp1.065.409.823.365,03 dan 31 Desember 2019 senilai Rp1.033.851.100.822,31. Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.82
Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Pembayaran Pegawai	441.025.705.448,00	482.596.403.755,50
2	Pembayaran Barang dan Jasa	407.372.358.282,67	381.938.442.734,81
3	Pembayaran Bunga	-	280.000.007,00
4	Pembayaran Hibah	7.351.394.000,00	7.804.054.341,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	3.093.000.000,00	1.161.500.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	49.260.669.634,36	-
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	6.502.448.300,00	5.118.744.700,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.237.976.400,00	1.304.585.600,00
9	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	149.566.271.300,00	153.647.369.684,00
	Jumlah	1.065.409.823.365,03	1.033.851.100.822,31

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.3	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi	434.412.438,00	633.832.558,00

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi atau aktivitas penerimaan kas karena adanya pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp434.412.438,00 merupakan hasil dari penjualan aset Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp633.832.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	220.660.438,00	633.832.558,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	213.752.000,00	-
	Jumlah	434.412.438,00	633.832.558,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.4	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi	381.505.194.475,77	384.837.690.237,29

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp381.505.194.475,77 merupakan kegiatan pengadaan/pembelian Aset Tetap yang dianggarkan dari Belanja Modal APBD dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp384.837.690.237,29. Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.84
Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Perolehan Tanah	415.506.760,00	346.517.905,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	97.622.948.332,00	54.893.662.839,22
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	143.482.401.078,77	132.223.414.395,24
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.882.549.773,00	154.912.088.124,43
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.759.374.090,00	10.951.107.223,40
6	Perolehan Aset Lainnya	4.842.414.442,00	4.510.899.750,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	7.000.000.000,00
8	Pembayaran Pokok Utang	-	20.000.000.000,00
	Jumlah	381.505.194.475,77	384.837.690.237,29

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.5	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan	36.014.000.000,00	142.419.800,00

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan atau aktivitas penerimaan kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp36.014.000.000,00 dan 31 Desember 2019 senilai Rp142.419.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	36.000.000.000,00	-
2	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	14.000.000,00	142.419.800,00
	Jumlah	36.014.000.000,00	142.419.800,00



	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.6 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Tidak terdapat Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.7 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris	94.036.815.731,00	92.058.964.682,00

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu senilai Rp94.036.815.731,00 dan 31 Desember 2019 senilai Rp92.058.964.682,00 yang berasal dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.8 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris	94.036.741.731,00	92.058.964.682,00

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp94.036.741.731,00 dan 31 Desember 2019 senilai Rp92.058.964.682,00 yang merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.5.9 Saldo Akhir Kas	97.590.424.926,37	59.479.771.871,23

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp97.590.424.926,37 dan 31 Desember 2019 Rp59.479.771.871,23. SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp97.531.350.426,37 tidak sama atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas sampai dengan 31 Desember 2020. Terdapat selisih sebesar Rp59.074.500,00 yang disebabkan antara lain:

- Kurang debet SPM pada BLUD Tahun 2019
- SP2D yang belum dicairkan Tahun 2020
- PFK Taperum yang belum dibayarkan Tahun 2020



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 5.86 berikut:

Tabel 5.86
Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode:	38.110.653.055,14	(61.169.223.857,70)
	Saldo awal kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN	59.479.771.871,23	120.648.995.728,93
	Saldo akhir kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN	97.590.424.926,37	59.479.771.871,23
2	Saldo akhir kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN terdiri dari:		
a	Saldo akhir kas di Kasda	44.461.969.610,80	3.074.805.820,73
b	Saldo akhir kas yang dibatasi penggunaannya	32.154.484.809,80	44.116.138.774,80
c	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	7.835.000,00	2.705.000,00
d	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	3.367.123,00	1.150.000,00
e	Saldo akhir kas dana JKN	388.439.034,00	242.046.946,00
f	Saldo akhir kas BLUD RSUD dr. Sultan Imanuddin	18.962.379.039,12	7.941.322.444,51
g	Saldo akhir kas BOS	1.611.950.309,65	4.101.602.885,19
h	Saldo akhir kas (a + b + c + d + e + f + g)	97.590.424.926,37	59.479.771.871,23
i	SiLPA	97.531.350.426,37	59.479.771.371,23
j	Selisih (h – i)	59.074.500,00	500,00
3	Penjelasan selisih:		
	Kurang debet SPM pada BLUD Tahun 2019	500,00	500,00
	SP2D yang belum dicairkan	59.000.000,00	-
	PFK Taperum yang belum dibayarkan	74.000,00	-



5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menjelaskan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional Pemerintah pada periode pelaporan. Penjelasan mengenai pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Saldo Awal Ekuitas tahun 2020 senilai Rp 2.686.753.574.941,88
- Surplus – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp250.065.385.765,24 merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar total senilai Rp1.239.474.295,45 disebabkan adanya:
 1. Koreksi saldo awal Kas di Kasda yang merupakan koreksi atas saldo awal Kas di Kas Daerah yang bersifat umum senilai Rp35.068.265,00
 2. Koreksi saldo awal Piutang Pajak senilai Rp809.344.972,00 yang merupakan koreksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Restoran tidak tercatat tahun 2019 pada Badan Pendapatan Daerah
 3. Koreksi saldo awal Piutang Retribusi senilai Rp195.828.000,00 yang merupakan koreksi piutang tidak tercatat tahun 2019 pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp194.625.000,00
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp3.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp1.200.000,00
 4. Koreksi saldo awal Piutang Lainnya senilai Rp2.185.408.366,25 terdapat pada RSUD Sultan Imanuddin
 5. Koreksi saldo awal Persediaan senilai Rp472.742.155,77 pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan (Rp37.916.523,23)
 - DP3AP2KB Rp349.233.104,00
 - Dinas Pariwisata (Rp6.109.440,00)
 - Dinas Perikanan yang merupakan koreksi atas Persediaan hasil pembenihan ikan yang belum tercatat senilai Rp167.535.015,00
 6. Koreksi saldo awal Tanah senilai Rp79.860.000,00 pada Dinas Sosial Rp61.440.000,00 dan Kecamatan Arut Utara Rp18.420.000,00
 7. Koreksi Saldo Awal Aset yang Dibatasi Penggunaannya yang merupakan koreksi atas saldo awal Kas di Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya senilai (Rp35.068.265,00)
 8. Koreksi penyisihan Piutang senilai Rp100.281.289,36 pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp7.789.467,60
 - DP3AP2KB (Rp6.328.942,34)
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp605.000,00
 - Dinas Perhubungan Rp53.383.000,00
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp4.531.726,20
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rp25.581.243,75



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp13.849.794,15
 - Dinas Perikanan Rp750.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp120.000,00
9. Koreksi penyusutan Aset Tetap/Amortisasi senilai (Rp1.787.912.496,04) terdapat pada:
- Dinas pendidikan dan kebudayaan (Rp2.840.235.846,23)
 - Dinas Kesehatan (Rp55.400.686,94)
 - RSUD Sultan Imanuddin (Rp115.275.713,55)
 - PUPR Rp917.151.653,15
 - Satpol PP (Rp6.399.036,52)
 - Nakertrans (Rp8.183.715,81)
 - Dinas Lingkungan Hidup (Rp964.879,04)
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rp4.191.271,65)
 - Dinas Perhubungan (Rp16.682.902,38)
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Rp2.802.253,93)
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Rp11.690.891,25)
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Rp2.296.688,58)
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Rp9.837.144,87)
 - Dinas Perikanan (Rp17.811.098,23)
 - Dinas Pariwisata (Rp2.875.732,34)
 - Kecamatan Kotawaringin Lama (Rp155.715,61)
 - Kecamatan Pangkalan Banteng (Rp222.561,55)
 - Badan Pendapatan Daerah Rp24.222.260,25
 - BPKAD (Rp20.628.336,95)
 - PPKD Rp498.715.484,21
 - BKPP (Rp3.787.107,57)
 - Kecamatan Kumai (Rp4.106,79)
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Rp28.660.684,74)
 - Dinas Ketahanan Pangan (Rp512.402,96)
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Rp2.860.938,76)
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Rp421.648,21)
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Rp2.977.756,57)
 - Sekretariat Daerah (Rp10.498.189,17)
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rp12.949.271,04)
 - Kecamatan Arut Selatan (Rp42.471.208,75)
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rp7.204.103,66)
10. Koreksi nilai Utang senilai Rp55.929.217,00 terdapat pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Rp300,00)
 - Dinas Kesehatan Rp64.040.450,00
 - RSUD Rp18.594.815,00
 - PUPR (Rp10.303.880,00)
 - Satpol PP (Rp500,00)



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

- Badan Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Rp57,00
 - DP3AP2KB (Rp59,00)
 - Dinas PMD (Rp587.170)
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Rp1.289.713,00)
 - Dinas Perikanan (Rp132,00)
 - Dinas Pariwisata Rp246,00
 - DPRD (Rp13.000.000,00)
 - Sekretariat DPRD Rp13.000.000,00
 - Kecamatan Arut Selatan Rp474.540,00
 - Kecamatan Kumai Rp8,00
 - Kecamatan Arut Utara (Rp7.043.748,00)
 - Inspektorat (Rp7.955.610)
 - BKPP Rp213,00
11. Koreksi nilai penyusutan Aset Lain-lain senilai (Rp872.007.208,89) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jadi, Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp2.938.058.435.002,57.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Kabupaten Kotawaringin Barat didirikan pada tanggal 3 Oktober 1959 dan memiliki semboyan Marunting Batu Aji (Menuju Kejayaan). Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah bertetangga dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin terdiri atas 81 Desa, 13 Kelurahan, dan 6 Kecamatan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Arut Selatan, yaitu 128.248 jiwa sedangkan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kumai, yaitu seluas 2.921 Km². Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2017 – 2037, Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' – 3°33' Lintang Selatan, 111°20' – 112°6' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Hasil proyeksi penduduk, BPS mencatat bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat ada sebanyak 307.079 jiwa (proyeksi SUPAS-Survei Penduduk Antar Sensus). Komposisi jumlah penduduk tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 161.458 jiwa dan perempuan sebanyak 145.621 jiwa.

Terhitung mulai tanggal 21 April 2017 Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H diangkat sebagai Bupati Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-2912 Tahun 2017, sehingga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2017 dipimpin oleh:

1. Bupati : Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H
2. Wakil Bupati : AHMADI RIANSYAH
3. Sekretaris Daerah : SUYANTO, S.H., M.H

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka pada awal tahun 2017 terjadi Perubahan Struktur Organisasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pelantikan Organisasi Pemerintah Daerah yang diadakan pada tanggal 7 Januari 2017.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dari pembebanan gaji yang dibayarkan dan dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2020 sebanyak 3973 orang yang terdiri dari: Pejabat Negara 2 orang, golongan IV sebanyak 890 orang, golongan III sebanyak 2.617 orang, golongan II sebanyak 457 orang, dan golongan I sebanyak 9 orang.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2020, yang mana dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.449.011.596.895,94 atau naik 6,75 persen dibandingkan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.357.377.147.401,90. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.442.474.017.840,80 atau naik 3,65 persen dibandingkan Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.391.688.791.559,60. Surplus Anggaran sebesar Rp6.537.579.055,14 merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja – Transfer Daerah. Pembiayaan Netto sebesar Rp90.993.771.371,23 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp95.493.771.371,23 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.500.000.000,00. Jumlah Aset Daerah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.085.962.251.752,52 atau naik sebesar 13,23 persen dibandingkan Aset Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.725.432.346.294,78.

Demikian secara ringkas pokok-pokok mengenai Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020. Semoga Laporan Keuangan yang disajikan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

Pangkalan Bun, Mei 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
REALISASI BELANJA HIBAH BOP PAUD
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	PENERIMA	ALAMAT	NILAI
1	TK. GUMBANG ASRI	JL. AHMAD YANI KM 9,5 BTN PANGKALAN LIMA ASRI KEC. ARUT SELATAN	15.900.000,00
2	KB PINANG MERAH	BTN PINANG MERAH, PASIR PANJANG KEC. ARUT SELATAN	68.400.000,00
3	TK. SUMBERMAS SARANA SELANGKUN	Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan	45.000.000,00
4	TPA AL KAUTSAR	Jl. Pangeran Ratu Anum Kusuma Yudha RT 16 Kec. Arut Selatan	16.500.000,00
5	TK. AL-HIKMAH	Jl. Tengku Usman RT. 28 Kec. Arut Selatan	15.300.000,00
6	TK. ISLAM AL IKHLAS	Jl. Pakunegara, Gg. Ramania RT. 17 Kec. Arut Selatan	102.000.000,00
7	KB. KEMALA BHAYANGKARI	Jalan Tarmili No. 23 Kec. Arut Selatan	11.700.000,00
8	TK. HARAPAN MULIA	Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Arut Selatan	38.400.000,00
9	TK. PERTIWI TELADAN	Jl. Pangeran Antasari RT. 08 Kec. Arut Selatan	12.900.000,00
10	KB. ANGKASA	Jl. Iskandar Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	8.100.000,00
11	TK ISLAM AL HIJRAH	Kecamatan Arut Selatan	39.900.000,00
12	TK PERTIWI ARSEL	JL. ISKANDAR PANGKALAN BUN KEC. ARUT SELATAN	26.100.000,00
13	KB MAKARTI TUNAS HARAPAN	Jl. Poros Pangkalan Lima Kec. Arut Selatan	15.300.000,00
14	TK KUSUMA NUSA	Jl. HM. MOESTALIM GG. BAYAM 1 KEC. ARUT SELATAN	19.500.000,00
15	TK SUMBERMAS SARANA SULUNG	Desa Sulung Kec. Arut Selatan	23.100.000,00
16	TK KARTIKA V-42	Jl. Pangeran Antasari Kec. Arut Selatan	19.200.000,00
17	TK TUNAS RIMBA	Jl. Pakunegara Kec. Arut Selatan	27.600.000,00
18	TK ISLAM AL-WARDAH	Jl. Kawitan II Kec. Arut Selatan	60.000.000,00
19	TK KEMALA BHAYANGKARI	Jl. TERMILI NO.23 PANGKALAN BUN KEC. ARUT SELATAN	77.700.000,00
20	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL	Jl. Jend. Sudirman No 13 A RT 15 Kec. Arut Selatan	21.000.000,00
21	TK. KALIMANTAN SAWIT ABADI	Natai Baru Estate Desa Natai Baru Kec. Arut Selatan	22.800.000,00
22	TPA. PELITA IBU	Jl. Hasanudin No. 02 RT. 02 Kelurahan Sidorejo Kec. Arut Selatan	12.900.000,00
23	TK. ANGGREK 2	Jl. Pangeran Antasari RT. 18 Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan	46.200.000,00
24	TK. IT AL MANAR	Jl. H. Mostalim RT. 16 Kelurahan Madurejo Kec. Arut Selatan	106.200.000,00
25	TK. ISLAM AR-RAHMAN	Jalan PKGB III RT. 13 RW. 04 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan	46.800.000,00
26	KB. KUSUMA NUSA	Jl. H. Mostalim GG. Bayam I Kelurahan Madurejo Kec. Arut Selatan	9.300.000,00
27	TK. NURUL YAQIN	Jl. G. M. Arsyad RT. 15 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan	16.500.000,00
28	TK. KARTIKA XVII 24	Jl. Iskandar Kelurahan Madurejo Kec. Arut Selatan	36.900.000,00
29	TK. CEMPAKA PUTIH	Jl. Pasir Panjang - Kumpai Batu RT. 13 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	16.524.000,00
30	TK. IT SABILUR ROSYAD	Jl. Aci Dina RT. 001 Kelurahan Mendawai Seberang Kec. Arut Selatan	20.700.000,00
31	KB. RUMAH BELAJARKU	Perum Bumi Asih Permai Blok K-11 GG. 6 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	22.200.000,00
32	KB. AN NISA	Jl. Dah Hamzah No. 09 RT. 19 Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan	13.500.000,00
33	TPA. IT. AL-MANAR	Jl. H. Moestalim RT. 16 Kelurahan Madurejo Kec. Arut Selatan	12.900.000,00
34	TK. ALAM BINA INSAN	Jl. Cilik Riwut I GG. Rusa III RT. 14 Kelurahan Sidorejo Kec. Arut Selatan	36.600.000,00
35	KB. PELANGI	Jl. Majambek RT. 04 Kelurahan Mendawai Seberang Kec. Arut Selatan	10.200.000,00
36	KB. ALAM BINA INSAN	Jl. Cilik Riwut I GG. Rusa III RT. 14 Kelurahan Sidorejo Kec. Arut Selatan	7.200.000,00
37	TK. MUSLIMAT NU FATIMAH	Jl. Pangeran Diponegoro No. 06 RT. 11 Kelurahan Raja Kec. Arut Selatan	18.600.000,00
38	TK. PERMATA BANGSA	Jl. Pasanah GG. Banteng IV Kelurahan Sidorejo Kec. Arut Selatan	9.600.000,00
39	TK. TUNAS KARYA	Jl. Abdul Ancis RT. 21 Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan	42.900.000,00
40	TK. MITRA MENDAWAI SEJATI SUAYAP	Jl. Negara KM. 34 Dusun Suayap Desa Umpang Kec. Arut Selatan	41.700.000,00

NO	PENERIMA	ALAMAT	NILAI
41	TK. SUMBER MAS SARANA 1	Komplek Perkebunan Kelapa Sawit Golf Kondang Desa Rangda	36.000.000,00
42	TK. MANDIRI	Jl. Dusun Pendulangan RT. 02 Desa Tanjung Putri	15.600.000,00
43	TK. BENUA SEBERANG	Jl. Danau Bundar RT.02 Kelurahan Raja Seberang	15.600.000,00
44	TK. CAHAYA MULIA	Jl. Macan No. 135, RT. 01 Kelurahan Sidorejo	52.500.000,00
45	TK. TANJUNG HARAPAN	Jl. Ahmad Yani RT. 02 RW. 02 Desa Tanjung Terantang	9.300.000,00
46	KB. CAHAYA MULIA	Jl. Macan RT. 01 Kelurahan Sidorejo	12.600.000,00
47	TPA. NURRAHMAH	Jl. Jendral Sudirman RT. 15 Kelurahan Sidorejo	14.700.000,00
48	TK. ISLAM DARUL ULUM	Jl. Pangeran Diponegoro No. 25 Kelurahan Masurejo	46.800.000,00
49	TK. PUTERA HARAPAN	Jl. Urip Sumoharjo RT. 05 RW. 02 Desa Kumpai Batu Bawah	30.300.000,00
50	TK. ANGGREK I	Jl. Pangeran Antasari RT. 12 Kelurahan Mendawai	50.700.000,00
51	KB. NURUL MUSLIMIN	Jl. Kawitan 2 RT.05 Kelurahan Sidorejo	12.600.000,00
52	KB. AISIYIAH	Jl. Jend. Sudirman No. 13A RT.15 Kelurahan Sidorejo	11.100.000,00
53	TK. MAKARTI MUKTI SIWI	Jl. Poros Pangkalan Lima Desa Natai Raya	27.600.000,00
54	TK. MELATI	Jl. Kyai Gede RT.8 RW.03 Desa Medang Sari	26.400.000,00
55	TK. TUNAS HARAPAN	Jl. Pangkalan Lima IIQ Desa Natai Baru	20.100.000,00
56	KB. NUR ROHMAH	Jl. Jenderal Sudirman RT. 15 Gang Pempulu II Kelurahan Sidorejo	12.000.000,00
57	TKS ISLAM MUJAHIDIN	Jl. Dewan Amir Husin Hamzah Kelurahan Mendawai	93.300.000,00
58	TK. BOUGENVILLE	Jl. Ahmad Wongso Kelurahan Madurejo	32.400.000,00
59	KB. BUNDA AYU	Jl. Perwira RT. 11 No.12 Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan	29.400.000,00
60	TK PELANGI	Jl. Syahfari Arsyad RT. 03	14.100.000,00
61	TK. MANGGIS	Jl. Jendral Sudirman RT. 27 RW. 08 Kelurahan Mendawai	15.300.000,00
62	TK. KASIH ANAK BANGSA	Jl. Majambek GG Danau Katimpun RT. 02 Kelurahan Raja Seberang	13.800.000,00
63	TK. ANGKASA	Jl. Iskandar Komp. TNI AU Iskandar Desa Pasir Panjang	25.200.000,00
64	KB. IT AL-MANAR	Jl. H. Moestalim RT 16 Kelurahan Madurejo	22.500.000,00
65	TK. SUMBERMAS SARANA KENAMBUI	Jl.Negara Km. 30,4 Desa Runtu	33.900.000,00
66	TK. BERUNAI	Jl. Berunai RT. 05 RW. 02 Kelurahan Baru	64.800.000,00
67	KB. BUNGA HATI	Jl. Jenderal Sudirman RT. 24 Karang Anyar Kelurahan Mendawai	12.000.000,00
68	TK. BAHAGIA	Jl. Tamkin RT. 001 Desa Nanga Mua	3.300.000,00
69	TK SURYA PERSADA	Base Camp Siba PT SINP PBNA Kelurahan Pangkut	54.900.000,00
70	TK. MANDALA JAYA	Jl. PT BJAP 02 Desa Gandis	29.100.000,00
71	TK. ALAM PERMAI	PT. BJAP I ESTATE III Kelurahan Pangkut	34.800.000,00
72	TK. PERTIWI	Jl. Theopilus Umar No. 01 RT. 05 Kelurahan Pangkut	39.300.000,00
73	TK MARUNDO JAYA	PT. BJAP 02 ESTATE 1 Kelurahan Pangkut	44.400.000,00
74	KB. BAKTI IBU	Jl. Kiay Suring No. 05 RT. 06 RW. 02 Desa Palih Baru	7.800.000,00
75	TK. BATU RAJA	Jl. Dua Mei RT. 08 Desa Rungun	20.700.000,00
76	TK MELATI	Jl. Cakra Negara No. 02 RT. 07 RW. 01 Desa Riam Durian	62.400.000,00
77	TK. TUNAS MANDIRI	Jl. Bukit Batu No. 40 RT. 02 RW. 01 Desa Ipuh Bangun Jaya	19.200.000,00
78	TK. HARAPAN PERTIWI	Jl. Makarti Gang Kantil No. 07 Desa Sukajaya	20.100.000,00
79	TUNAS HARAPAN	Jl. Pangeran Diponegoro RT 07/02 Desa Suka Makmur	21.900.000,00
80	TK. PERMATA HATI	Jalan Raya Indah No. 05 RT. 03 Desa Sagu Sukamulya	54.300.000,00
81	TK. BUMI TAMA	Metro Manggau Desa Riam Durian	86.100.000,00
82	TK. SEROJA	Jl. Pangkalan Singat Km. 01 Desa Sumber Mukti	13.200.000,00
83	TK. PERDANA	Jl. H.M. Idris No. 490 Desa Sungai Bedaun	54.900.000,00
84	TK. SADAR BHAKTI	Jl. Pangeran Syarif RT. 15 RW. 05 Kelurahan Kumai Hilir	60.900.000,00
85	TK. TUNAS HARAPAN	Jl. Inpres No. 71 Desa Sungai Bedaun	24.600.000,00
86	TK. TUNAS KARYA	Jl. Madrasah No. 402 Kelurahan Candi	20.100.000,00
87	TK. PERTIWI KUMAI	Jl. H. Abdul Aziz RT. 05 Kelurahan Kumai Hulu	30.600.000,00
88	TK. NURUL IMAN	Perum Bumi Kumai Damai Desa Sungai Tendang	14.700.000,00
89	KB. IT. CENDIKIA	Jl. Panglima Utar RT. 05 Gang Bina Raga Desa Sungai Kapitan	3.900.000,00
90	TK. PANTAI PERMAI	Jl. P3 IDT RT. 04 RW. 01 Desa Sungai Bakau	39.000.000,00
91	TK. YAA BUNAYYA	Jl. Pangkalan Lima RT. 04 Desa Sungai Tendang	10.800.000,00
92	TK. ADE IRMA SURYANI	Jl. Patih Mambang RT. 03 Desa Keraya	11.100.000,00
93	TK. AL KAUTSAR	Jalan A. Yani Km. 17 Gang Petai I RT. 10 RW. 03 Desa Bumi Harjo	16.200.000,00
94	TK. KARTIKA	Jl. Abdul Kadir RT. 11 Kelurahan Kumai Hulu	51.600.000,00
95	KB. ANGGREK TUNAS BARU	Jl. Pasir Putih RT. 12 Desa Sungai Kapitan	9.300.000,00
96	TK. KARTINI	Jl.Tengku Abdurrahman RT. 02 Desa Sebuai Timur	6.900.000,00
97	KB. TADIKA PURI	Jl. Sei Kakap, RT. 005 RW. 02 Desa Pangkalan Satu	16.500.000,00
98	TK. DEWI SARTIKA	Jl. Said Husain Hamzah RT. 06 Desa Teluk Bogam	18.300.000,00
99	KB. MAWAR	Jl. Tengku Abdurrahman RT. 02 Desa Sebuai Timur	6.600.000,00
100	TK. DAARUNNAJAH	Jl. Annur No. 03 RT. 03 Kelurahan Kumai Hulu	72.000.000,00

NO	PENERIMA	ALAMAT	NILAI
101	TK. MELATI	Jl. Husin Hamzah RT. 05 Desa Sabuai	16.800.000,00
102	TK. MANDALA I	Jl. Cempedak RT.02 Desa Batu Belaman	16.500.000,00
103	KB. KUSUMA PERTIWI	Jl. Ahmad Yani Km. 17 Desa Bumi Harjo	16.200.000,00
104	TK.IT. MAMBAUL HASAN	Jl. Puskesmas RT. 06 Desa Sungai Tendang	26.400.000,00
105	KB. ADE IRMA SURYANI	JL. Patih Mambang RT. 02 Desa Keraya	12.600.000,00
106	TK. PERMATA IBU	Jl. Abdul Hamid RT. 14 Kelurahan Kumai Hulu	20.100.000,00
107	TK IT CENDIKIA	Jl. Panglima Utar RT. 05 Desa Sungai Kapitan	41.100.000,00
108	TK PANTAI INDAH	Jl. Bahagia RT. 06 RW. 02 Desa Kubu	19.800.000,00
109	TK. KUSUMA PERTIWI	Jl. Ahmad Yani Km. 17 RT 11 Sungai Rangit SP. 2 Desa Bumi Harjo	37.500.000,00
110	KB. AN NUR	Jl. Paleleng RT. 03 Desa Batu Belaman	21.300.000,00
111	TK. MUTIARA BUNDA	Jl. Trans Borneo RT.18 Kumai Seberang kelurahan Kumai Hilir	12.000.000,00
112	TK. H. MUHAMMAD IDRIS	Jl. Al Huda RT. 17 RW. 06 No. 890 Kelurahan Kumai Hulu	18.000.000,00
113	TK AL ISHLAHUL IMAN	Jl. A. Yani KM. 75 RT.04 RW. 01 Desa Amin Jaya	48.300.000,00
114	TK. PGRI	Jl. Nangka RT. 06 RW. 02 Desa Sidomulyo	31.500.000,00
115	TK. USWATUN KHASANAH	Jl. RA. Kartini RT. 04 Desa Berambai Makmur	8.700.000,00
116	TK. TERATAI JAYA	Jl. Kenanga Dusun II Desa Sungai Hijau	17.700.000,00
117	TK. PESONA ASTRA	BASE CAMP PT GSPP Desa Arga Mulya	72.600.000,00
118	TK TUNAS HARAPAN	BASE CAMP PT. GSDI-GSYM Desa Sungai Bengkuang	70.800.000,00
119	TK. MAKARTI	GG. Kenanga NO. 2 RT.003 RW. 001 Desa Simpang Berambai	25.800.000,00
120	TK. SEBUKAT HARAPAN	Jl. Veteran RT. 03 Dusun 1 Sebukut Desa Pangkalan Banteng	18.300.000,00
121	KB. KASIH IBU	Desa Natai Kerbau	20.400.000,00
122	TK. MELATI	Jl. Anggrek Ungu RT. 07 RW. 02 Desa Amin Jaya	21.000.000,00
123	TK. BANGUN MAKARTI JAYA	PT. BJAP 1 Estate 1 Afd. 7 Desa Sungai Pakit	53.700.000,00
124	TK. TRUBA ANANDA	PT. Indotruba Tengah Desa Amin Jaya	35.700.000,00
125	TK. TUNAS KARYA	Jl. Supriyadi RT.04 RW. II Dusun I Desa Sungai Bengkuang	22.200.000,00
126	TK. AISYIAH BUSTANUL ATHFAL	Jl. Ahmad Yani Km. 60 Desa Karang Mulya	25.500.000,00
127	TK. MEKAR JAYA	Jl. Mangga No.01 Desa Karang Mulya	32.400.000,00
128	TK. HARAPAN LESTARI	Kompleks PT WANA SAWIT Desa Natai Kerbau	29.100.000,00
129	TK. TUNAS SUBUR	Jl. Ahmad Yani PT. WSSL1 Desa Amin Jaya	51.900.000,00
130	TK. RADEN AJENG KARTINI	Jl. Rambutan RT. 06 Desa Natai Kerbau	21.000.000,00
131	TK PERTIWI	Jalan Kenanga RT. 02 RW. 01 Desa Sungai Kuning	19.800.000,00
132	TK. TUNAS KARYA	Jl. Jalur 3 RT.03 RW. 01 Desa Sungai Pakit	20.100.000,00
133	TK MEKAR SARI	Jl. Komplek Fasilitas Umum RT. 07 RW. 04 Desa Arga Mulya	15.300.000,00
134	TK. SINAR HIJAU	Jl. Apel NO. 09 RT.09 RW. I Desa Sungai Hijau	26.400.000,00
135	TK. INDRIA MAKARTI	Jl. Ahmad Dahlan RT.04 RW.01 Desa Kebun Agung	21.300.000,00
136	TK. PERINTIS	Jl. Gajah Mada RT.21 RW.01 Desa Pangkalan Tiga	46.500.000,00
137	KB. SARI HATI	RT. 04 RW. 02 Desa Makarti Jaya	19.200.000,00
138	TK. MAKARTI PUTRA	Jl. Beringin RT. 01 RW. 01 Desa Pangkalan Durin	35.700.000,00
139	KB IT AL WIDAD	Jl. Patimura RT. 17 RW. 03 Desa Purbasari	11.100.000,00
140	KB. PELITA BANGSA	Jl. Lada Lima RT. 16 RW. 01 Desa Sungai Melawen	11.700.000,00
141	TK. NILASARI	Jl. Bunga Sepatu RT. 08 RW. 03	33.900.000,00
142	TK. TUNAS BANGSA	Jl. Slamet Riyadi Desa Lada Mandala Jaya	37.500.000,00
143	TK LESTARI	Jl. Pirsus II RT. 26 RW. 06 Desa Pandu Sanjaya	87.000.000,00
144	TK. Harapan Bangsa	Jl. Soekarno Hatta Desa Pangkalan Dewa	62.700.000,00
145	TK. ANGGREK	Jl. Beringin RT.04 RW.01 Desa Sungai Rangit Jaya	32.100.000,00
146	KB. KASIH BUNDA	Jl. Kenanga 1 RT. 01 RW. 01 Desa Pangkalan Durin	16.500.000,00
147	TK. KARYA BHAKTI	Jl. Tjilik Riwut NO. 2 RT/RW 04/02 Desa Kadipi Atas	17.700.000,00
148	TK. IT AL WIDAD	Jl. Patimura RT. 17 RW. 03 Desa Purbasari	38.400.000,00
149	TK. DAHLIA	Jl. A. Yani Km. 40 RT. 24 RW. 02 Desa Pandu Sanjaya	51.000.000,00
150	TK. TUNAS HARAPAN	Jl. RA. Kartini RT. 05 RW. 01 Desa Purbasari	52.500.000,00
151	KB. INSAN MANDALA KASIH	Jl. Slamet Riyadi RT. 13 RW. 06 Desa Lada Mandala Jaya	18.300.000,00
152	TK. ISLAM BHRUL ULUM	Jl. Ahmad Yani KM 40 RT. 13 RW. 03 Desa Pandu Sanjaya	34.500.000,00
153	KB. SAYANG IBU	Jl. A. Yani KM 46 RT. 16 RW. 04 Desa Pangkalan Desa	21.900.000,00
154	KB. NIDAU FITRAH	Jl. Gajah Mada Blok A. RT.7 RW.4 Desa Pangkalan Tiga	23.100.000,00
155	KB. BUNGA BANGSA	Jl. Mangga RT.24 RW.02 Desa Pandu Sanjaya	18.000.000,00
156	TK. TUNAS KARYA	Jl. Sultan Agung RT. 17 RW. 06Desa Sumber Agung	51.600.000,00
157	KB. MELATI	JL. A. Yani KM. 23 Desa Sumber Agung	15.900.000,00
158	TK. MIFTAHUL JANNAH	JL. Apel RT. 16 RW. 01 Desa Sungai Melawen	38.400.000,00
159	TK. ISA AL-MASIH	Jl. Kenanga No. 02 Kecamatan Arut Selatan	8.400.000,00
160	KB. TUNAS HARAPAN	Jl. Tjilik Riwut RT. 09/RW. 04, Kec. Pangkalan Lada	5.400.000,00
161	TK. MANDIRI	Jl. Kaloka Desa Gandis RT. 003 Kecamatan Arut Utara	4.800.000,00
Jumlah			4.705.524.000,00

REKENING-REKENING SEKOLAH YANG BELUM DITETAPKAN SEBAGAI REKENING MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
1	SMP NEGERI 1 ARUT SELATAN	4000202007753	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Arsel	Tabungan	Rutin	95.242,00
2	SMP NEGERI 1 ARUT SELATAN	4000202006004	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Arsel	Tabungan	BOP	117.004,00
3	SMP NEGERI 2 ARUT SELATAN	4000202007773	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Arsel	Tabungan	Rutin	164.753,00
4	SMP NEGERI 2 ARUT SELATAN	4000202006044	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Arsel	Tabungan	BOP	119.989,00
5	SMP NEGERI 3 ARUT SELATAN	4000202010617	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 3 Arsel	Tabungan	Rutin	89.176,00
6	SMP NEGERI 3 ARUT SELATAN	4000202005408	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 3 Arsel qq Abdullah Husaini	Tabungan	BOP	169.577,00
7	SMP NEGERI 4 ARUT SELATAN	4000202007797	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 4 Arsel	Tabungan	Rutin	159.778,00
8	SMP NEGERI 4 ARUT SELATAN	4000202012954	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 4 Arsel	Tabungan	BOP	63.992,00
9	SMP NEGERI 5 ARUT SELATAN	4000202007803	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 5 Arsel	Tabungan	Rutin	94.562,00
10	SMP NEGERI 5 ARUT SELATAN	4000202005988	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 5 Arsel	Tabungan	BOP	68.017,00
11	SMP NEGERI 6 ARUT SELATAN	4000202007734	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 6 Arsel	Tabungan	Rutin	67.060,00
12	SMP NEGERI 6 ARUT SELATAN	4000102000096	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 6 Arsel	Tabungan	BOP	-
13	SMP NEGERI 7 ARUT SELATAN	4000202007763	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 7 Arsel	Tabungan	Rutin	65.367,00
14	SMP NEGERI 7 ARUT SELATAN	4000202006018	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 7 Arsel	Tabungan	BOP	76.575,00
15	SMP NEGERI 8 ARUT SELATAN	4000202008271	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 8 Arsel	Tabungan	Rutin	105.889,00
16	SMP NEGERI 8 ARUT SELATAN	4000202012953	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 8 Arsel	Tabungan	BOP	85.715,00
17	SMP NEGERI 9 ARUT SELATAN	4000202008444	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 9 Arsel	Tabungan	Rutin	64.174,00
18	SMP NEGERI 9 ARUT SELATAN	4000202007379	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 9 Arsel	Tabungan	BOP/BOSDA	90.592,00
19	SMP NEGERI 10 ARUT SELATAN	4000202008008	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 10 Arsel	Tabungan	Rutin	58.592,80
20	SMP NEGERI 10 ARUT SELATAN	4000202007360	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 10 Arsel	Tabungan	BOP	83.386,00
21	SMP NEGERI 10 ARUT SELATAN	4000202007360	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 10 Arsel	Giro	DAK	-
22	SMP NEGERI 11 ARUT SELATAN	4000201021492	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 11 Arsel	Tabungan	Rutin	95.670,00
23	SMP NEGERI 11 ARUT SELATAN	4000201021493	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 11 Arsel	Tabungan	BOP	144.121,00
24	SD-SMP SATAP NEGERI 1 ARSEL	4000102000490	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP SATAP N 1 Arsel	Tabungan	Rutin	-
25	SD-SMP SATAP NEGERI 1 ARSEL	4000202005963	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP SATAP N 1 Arsel	Tabungan	BOP	-
26	SMP NEGERI 1 KUMAI	4040202004832	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Kumai	Tabungan	Rutin	85.420,00
27	SMP NEGERI 1 KUMAI	4040201003668	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Kumai	Tabungan	BOP	71.287,00
28	SMP NEGERI 2 KUMAI	4000202007798	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Kumai	Tabungan	Rutin	147.029,00
29	SMP NEGERI 2 KUMAI	4000202005436	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Arsel qq JUNAIDI	Tabungan	BOP	124.121,00
30	SMP NEGERI 3 KUMAI	4000202007745	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 3 Kumai	Tabungan	Rutin	45.329,00
31	SMP NEGERI 3 KUMAI	4040202005004	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 3 Kumai	Tabungan	BOP	176.606,00

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
32	SMP NEGERI 4 KUMAI	4040202004833	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 4 Kumai	Tabungan	Rutin	46.960,00
33	SMP NEGERI 4 KUMAI	4040202005851	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 4 Kumai	Tabungan	BOP	130.387,00
34	SMP NEGERI 5 KUMAI	4040202006150	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 5 Kumai	Tabungan	Rutin	77.411,00
35	SMP NEGERI 5 KUMAI	4040202005865	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Bendahara BOP SMPN 5 Kumai	Tabungan	BOP	84.441,00
36	SMP NEGERI 6 KUMAI	4040202006246	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 6 Kumai	Tabungan	Rutin	80.762,00
37	SMP NEGERI 6 KUMAI	4040202006247	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 6 Kumai	Tabungan	BOP	94.855,00
38	SD SMP SATAP NEGERI 1 KUMAI	4040202006309	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap N 1 Kumai	Tabungan	Rutin	58.174,00
39	SD SMP SATAP NEGERI 1 KUMAI	4040202006279	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD SMP Satu Atap Negeri 1 Kumai	Tabungan	BOP	59.355,00
40	SD SMP SATAP NEGERI 2 KUMAI	4040202006250	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap N 2 Kumai	Tabungan	Rutin	74.219,00
41	SD SMP SATAP NEGERI 2 KUMAI	4040202006249	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD SMP Satu Atap Negeri 2 Kumai	Tabungan	BOP	60.314,00
42	SD SMP SATAP NEGERI 3 KUMAI	4040202006242	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap 3 Kumai	Tabungan	Rutin	131.976,00
43	SD SMP SATAP NEGERI 3 KUMAI	4040202006241	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N Satu Atap 3 Kumai	Tabungan	BOP	52.212,00
44	SD SMP SATAP NEGERI 4 KUMAI	4040202006244	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap N 4 Kumai	Tabungan	Rutin	78.636,00
45	SD SMP SATAP NEGERI 4 KUMAI	4040202006245	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD SMP Satu Atap Negeri 4 Kumai	Tabungan	BOP	87.190,00
46	SD SMP SATAP NEGERI 5 KUMAI	4040202006298	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap N 5 Kumai	Tabungan	Rutin	89.021,00
47	SD SMP SATAP NEGERI 5 KUMAI	4040202006299	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD SMP Satu Atap Negeri 5 Kumai	Tabungan	BOP	49.388,00
48	SMP NEGERI 1 PANGKALAN LADA	4000202006365	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Pangkalan Lada	Tabungan	Rutin	162.865,00
49	SMP NEGERI 1 PANGKALAN LADA	4000202006011	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Pangkalan Lada	Tabungan	BOP	177.370,00
50	SMP NEGERI 2 PANGKALAN LADA	4000202007776	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Pangkalan Lada	Tabungan	Rutin	125.880,00
51	SMP NEGERI 3 PANGKALAN LADA	4000202007826	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 3 Pangkalan Lada	Tabungan	Rutin	53.153,00
52	SMP NEGERI 3 PANGKALAN LADA	4000202006742	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 3 Pangkalan Lada	Tabungan	BOP	100.252,00
53	SMP NEGERI 4 PANGKALAN LADA	4000202008457	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 4 Pangkalan Lada	Tabungan	Rutin	148.303,00
54	SMP NEGERI 4 PANGKALAN LADA	4000202007355	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 4 Pangkalan Lada	Tabungan	BOP	160.563,00
55	SMP NEGERI 5 PANGKALAN LADA	4000202012024	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 5 Pangkalan Lada	Tabungan	Rutin	57.991,00
56	SMP NEGERI 5 PANGKALAN LADA	4000202009598	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 5 Pangkalan Lada	Tabungan	BOP	221.151,00
57	SMP NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG	4050202001485	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Pangkalan Banteng	Tabungan	Rutin	269.452,00
58	SMP NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG	4000202006022	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 1 Pangkalan Banteng	Tabungan	BOP	145.480,00
59	SMP NEGERI 2 PANGKALAN BANTENG	4000202006006	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Pangkalan Banteng	Tabungan	Rutin	229.511,00
60	SMP NEGERI 2 PANGKALAN BANTENG	4000201023260	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 2 Pangkalan Banteng	Tabungan	BOP	51.139,00
61	SMP NEGERI 3 PANGKALAN BANTENG	4050202001397	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 3 Pangkalan Banteng	Tabungan	Rutin	74.782,00
62	SMP NEGERI 3 PANGKALAN BANTENG	4000202012618	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 3 Pangkalan Banteng	Tabungan	BOP	76.097,00
63	SMP NEGERI 4 PANGKALAN BANTENG	4050201001495	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 4 Pangkalan Banteng	Tabungan	Rutin	97.915,00
64	SMP NEGERI 4 PANGKALAN BANTENG	4000202006734	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 4 Pangkalan Banteng	Tabungan	BOP	79.033,00

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
65	SMP NEGERI 5 PANGKALAN BANTENG	4050202003220	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 5 Pangkalan Banteng	Tabungan	Rutin	246.395,00
66	SMP NEGERI 5 PANGKALAN BANTENG	4050202003052	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 5 Pangkalan Banteng	Tabungan	BOP	70.508,00
67	SD-SMP SATAP NEGERI 1 P.BANTENG	4050202004375	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap N 1 P.Banteng	Tabungan	Rutin	130.848,00
68	SD-SMP SATAP NEGERI 1 P.BANTENG	4050202006574	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD SMP Satu Arap Negeri 1 P.Banteng	Tabungan	BOP	189.025,00
69	SMP NEGERI 1 KOTAWARINGIN LAMA	4060202000594	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Kotawaringin Lama	Tabungan	Rutin	134.870,00
70	SMP NEGERI 1 KOTAWARINGIN LAMA	4060201001915	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Kotawaringin Lama	Tabungan	BOP	80.804,00
71	SMP NEGERI 2 KOTAWARINGIN LAMA	4000202007811	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 2 Kotawaringin Lama	Tabungan	Rutin	52.473,00
72	SMP NEGERI 2 KOTAWARINGIN LAMA	4060102000004	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 2 Kotawaringin Lama	Tabungan	BOP	-
73	SMP NEGERI 3 KOTAWARINGIN LAMA	4000202007809	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 3 Kotawaringin Lama	Tabungan	Rutin	80.015,00
74	SMP NEGERI 3 KOTAWARINGIN LAMA	4000201020888	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 3 Kotawaringin Lama	Tabungan	BOP	57.839,00
75	SMP NEGERI 4 KOTAWARINGIN LAMA	4000202007818	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 4 Kotawaringin Lama	Tabungan	Rutin	168.682,00
76	SMP NEGERI 4 KOTAWARINGIN LAMA	4000201020823	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 4 Kotawaringin Lama	Tabungan	BOP	129.661,00
77	SMP NEGERI 5 KOTAWARINGIN LAMA	4000202009512	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 5 Kotawaringin Lama	Tabungan	Rutin	85.727,00
78	SMP NEGERI 5 KOTAWARINGIN LAMA	4000202009525	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMPN 5 Kotawaringin Lama	Tabungan	BOP	129.084,00
79	SD-SMP SATAP NEGERI 1 KTW. LAMA	4000202007743	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD SMP Satu Atap Negeri 1 Kotawaringin Lama	Tabungan	Rutin	178.192,00
80	SD-SMP SATAP NEGERI 1 KTW. LAMA	4000201023907	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD SMP Satu Atap Negeri 1 Kotawaringin Lama	Tabungan	BOP	159.357,00
81	SMP NEGERI 1 ARUT UTARA	4000202007800	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Arut Utara	Tabungan	Rutin	74.577,00
82	SMP NEGERI 1 ARUT UTARA	4000202011878	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Arut Utara	Tabungan	BOP	124.029,00
83	SMP NEGERI 1 ARUT UTARA	4050102000078	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Arut Utara	Giro	BOS	-
84	SMP NEGERI 1 ARUT UTARA	4050102000158	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 1 Arut Utara	Giro	DAK	-
85	SMP NEGERI 2 ARUT UTARA	4000201023898	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Arut Utara	Tabungan	Rutin	67.221,00
86	SMP NEGERI 2 ARUT UTARA	4000202014750	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SMP N 2 Arut Utara	Tabungan	BOP	3.368.119,00
87	SD-SMP SATAP NEGERI 1 ARUT UTARA	4000202007812	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap N 1 Arut Utara	Tabungan	Rutin	40.808,00
88	SD-SMP SATAP NEGERI 1 ARUT UTARA	4000201023907	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD-SMP Satap N 1 Arut Utara	Tabungan	BOP	217.336,00
89	SD Negeri 1 AMIN JAYA	4050102000168	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Amin Jaya	Giro	DAK	-
90	SD Negeri 1 AMIN JAYA	4050202001458	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 AMIN JAYA	Tabungan	Rutin	113.746,00
91	SD Negeri 1 ARG MULYA	4050102000171	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Arga Mulya	Giro	DAK	-
92	SD Negeri 1 BABUAL BABOTI	4060201002314	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 BABUAL BABOTI	Tabungan	Rutin	52.196,00
93	SD Negeri 1 BATU BELAMAN	4040202004838	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA USBN SDN 1 BATU BELAMAN KUMAI	Tabungan	Rutin	92.073,00
94	SD Negeri 1 BERAMBAI MAKMUR	4050201004225	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 BERAMBAI MAKMUR	Tabungan	Rutin	87.664,00
95	SD Negeri 1 BUMI HARJO	4040202004853	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 BUMI HARJO	Tabungan	Rutin	108.581,00
96	SD Negeri 1 CANDI	4040102000159	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Candi	Giro	DAK	-

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
97	SD Negeri 1 DAU	4000202008219	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 DAU	Tabungan	Rutin	78.487,00
98	SD Negeri 1 DAWAK	4000202007616	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 DAWAK	Tabungan	Rutin	1.369.987,00
99	SD Negeri 1 GANDIS	4000202008338	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA RUTIN SDN 1 GANDIS	Tabungan	Rutin	142.249,00
100	SD Negeri 1 IPUH BANGUN JAYA	4000202008247	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 IPUH BANGUN	Tabungan	Rutin	1.419.016,00
101	SD Negeri 1 KADIPI ATAS	4000202007903	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 KADIPI ATAS	Tabungan	Rutin	141.212,00
102	SD Negeri 1 KARANG MULYA	4050202005054	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 KARANG MULYA	Tabungan	Rutin	196.910,00
103	SD Negeri 1 KARANG SARI	4050102000174	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Karang Sari	Giro	DAK	-
104	SD Negeri 1 KARANG SARI	4050201004216	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 KARANG SARI	Tabungan	Rutin	82.871,00
105	SD Negeri 1 KEBUN AGUNG	4050201001284	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 KEBUN	Tabungan	Rutin	97.379,00
106	SD Negeri 1 KERABU	4000202008382	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 KERABU	Tabungan	Rutin	4.464.848,00
107	SD Negeri 1 KERAYA	4040202004986	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA RUTIN / SDN 1 KERAYA	Tabungan	Rutin	55.958,00
108	SD Negeri 1 KINJIL	4000202007859	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 KINJIL	Tabungan	Rutin	93.264,00
109	SD Negeri 1 KONDANG	4000202008238	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 KONDANG	Tabungan	Rutin	58.307,00
110	SD Negeri 1 KOTAWARINGIN HILIR	4060201002180	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA RUTIN SDN 1 KOTAWARINGIN HILIR	Tabungan	Rutin	95.348,00
111	SD Negeri 1 KOTAWARINGIN HULU	4060202002580	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 KOTAWARINGIN HULU	Tabungan	Rutin	164.468,00
112	SD Negeri 1 KUBU	4040202004857	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 KUBU	Tabungan	Rutin	65.967,00
113	SD Negeri 1 KUMAI HULU	4040202004873	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 KUMAI HULU	Tabungan	Rutin	109.958,00
114	SD Negeri 1 KUMPAI BATU ATAS	4000202007828	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA RUTIN SDN 1 KUMPAI BATU ATAS	Tabungan	Rutin	1.709.464,00
115	SD Negeri 1 LADA MANDALA JAYA	4000202007868	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PAN PENYELENGGARA UASBN SDN 1 LADA MANDALA	Tabungan	Rutin	63.423,00
116	SD Negeri 1 LALANG	4000202008501	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 LALANG	Tabungan	Rutin	168.394,00
117	SD Negeri 1 MADUREJO	4000102001184	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Madurejo	Giro	DAK	550.000,00
118	SD Negeri 1 MAKARTI JAYA	4000102001022	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Makarti Jaya	Giro	DAK	-
119	SD Negeri 1 MAKARTI JAYA	4000202007900	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 MAKARTI JAYA	Tabungan	Rutin	89.425,00
120	SD Negeri 1 MARGA MULYA	4050202001500	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 MARGA	Tabungan	Rutin	102.813,00
121	SD Negeri 1 MEDANG SARI	4000202007810	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 MEDANGSARI	Tabungan	Rutin	102.703,00
122	SD Negeri 1 MENDAWAI	4000201023593	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 MENDAWAI	Tabungan	Rutin	138.195,00
123	SD Negeri 1 MENDAWAI SEBERANG	4000202005058	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN.MENDAWAI SEBERANG/PBN	Tabungan	Rutin	106.967,00
124	SD Negeri 1 MULYA JADI	4050202001468	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 MULYA JADI	Tabungan	Rutin	78.698,00
125	SD Negeri 1 NATAI BARU	4000202014126	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 NATAI BARU	Tabungan	Rutin	1.897.438,00

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
126	SD Negeri 1 NATAI KERBAU	4050202001409	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 NATAI	Tabungan	Rutin	164.712,00
127	SD Negeri 1 NATAI RAYA	4000201022060	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 NATAI RAYA	Tabungan	Rutin	118.411,00
128	SD Negeri 1 PANDAU	4000202008221	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 PANDAU	Tabungan	Rutin	115.858,00
129	SD Negeri 1 PANDU SANJAYA	4050102000170	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Pandu Sanjaya	Giro	DAK	-
130	SD Negeri 1 PANDU SENJAYA	4000202007946	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 PANDU SANJAYA	Tabungan	Rutin	76.743,00
131	SD Negeri 1 PANGKALAN BANTENG	4050202001393	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 P.BANTENG	Tabungan	Rutin	148.286,00
132	SD Negeri 1 PANGKALAN DEWA	4000202007895	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 PANGKALAN DEWA	Tabungan	Rutin	88.307,00
133	SD Negeri 1 PANGKALAN DURIN	4000202007889	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 PANGKALAN DURIN	Tabungan	Rutin	3.352.552,00
134	SD Negeri 1 PANGKALAN SATU	4000102001055	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Pangkalan Satu	Giro	DAK	-
135	SD Negeri 1 PANGKALAN TIGA	4050202001517	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 PANGKALAN TIGA	Tabungan	Rutin	132.056,00
136	SD Negeri 1 PANGKUT	4000102001173	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Pangkut	Giro	DAK	-
137	SD Negeri 1 PASIR PANJANG	4000202007785	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 PASIR	Tabungan	Rutin	93.026,00
138	SD Negeri 1 PURBASARI	4000102001103	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Purbasari	Giro	DAK	-
139	SD Negeri 1 RAJA	4000202007986	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA RUTIN SDN 1 RAJA	Tabungan	Rutin	145.645,00
140	SD Negeri 1 RAJA SEBERANG	4000102001044	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Raja Seberang	Giro	DAK	-
141	SD Negeri 1 RAJA SEBERANG	4000202007984	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 RAJA	Tabungan	Rutin	136.306,00
142	SD Negeri 1 RIAM DURIAN	4000202007610	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 RIAM DURIAN	Tabungan	Rutin	62.431,00
143	SD Negeri 1 RUNGUN	4000202007742	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UN US SDN 1 RUNGUN	Tabungan	Rutin	130.663,00
144	SD Negeri 1 RUNTU	4000102000926	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Runtu	Giro	DAK	-
145	SD Negeri 1 SAGU SUKAMULYA	4060102000544	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Sagu Sukamulya	Giro	DAK	-
146	SD Negeri 1 SAGU SUKAMULYA	4000202008397	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SAGU SUKAMULYA	Tabungan	Rutin	158.895,00
147	SD Negeri 1 SAKABULIN	4000202008395	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SAKABULIN	Tabungan	Rutin	1.674.369,00
148	SD Negeri 1 SEBUAI TIMUR	4040202006251	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SABUAI TIMUR	Tabungan	Rutin	92.609,00
149	SD Negeri 1 SUNGAI BEDAUN	4040202004861	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SUNGAI BEDAUN	Tabungan	Rutin	115.940,00
150	SD Negeri 1 SUNGAI CABANG	4040202004864	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SUNGAI CABANG	Tabungan	Rutin	1.355.553,00
151	SD Negeri 1 SUNGAI SEKONYER	4040202004863	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SUNGAI SEKONYER	Tabungan	Rutin	148.224,00
152	SD Negeri 1 SUNGAI TENDANG	4040202004843	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SUNGAI TENDANG KUMAI	Tabungan	Rutin	97.668,00
153	SD Negeri 1 SIDO MULYO	4050202001443	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 SIDO MULYO	Tabungan	Rutin	80.134,00
154	SD Negeri 1 SIDOMULYO	4050102000167	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Sidomulyo	Giro	DAK	-
155	SD Negeri 1 SIMPANG BARAMBAI	4050201004222	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SIMPANG BERAMBAI	Tabungan	Rutin	127.310,00

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
156	SD Negeri 1 SUKA MAKMUR	4060102000312	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Suka Makmur	Giro	DAK	-
157	SD Negeri 1 SUKA MAKMUR	4060202002493	PT. Bank Pembangunan Kalteng	BOP SDN-1 SUKA MAKMUR	Tabungan	Rutin	140.445,00
158	SD Negeri 1 SUKAJAYA	4000202007855	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 SUKAJAYA	Tabungan	Rutin	1.342.815,00
159	SD Negeri 1 SUKARAMI	4050202005856	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SUKARAMI	Tabungan	Rutin	193.721,00
160	SD Negeri 1 SUMBER AGUNG	4000102001011	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Sumber Agung	Giro	DAK	-
161	SD Negeri 1 SUMBER AGUNG	4000202007932	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 1 SUMBER AGUNG	Tabungan	Rutin	127.434,00
162	SD Negeri 1 SUNGAI BAKAU	4040202004884	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SUNGAI BAKAU	Tabungan	Rutin	1.632.491,00
163	SD Negeri 1 SUNGAI BENGKUANG	4050201004205	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SUNGAI BENGKUANG	Tabungan	Rutin	178.560,00
164	SD Negeri 1 SUNGAI HIJAU	4050201004213	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SUNGAI HIJAU	Tabungan	Rutin	130.276,00
165	SD Negeri 1 SUNGAI KAPITAN	4040102000196	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Sungai Kapitan	Giro	DAK	-
166	SD Negeri 1 SUNGAI KAPITAN	4040202004852	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SUNGAI KAPITAN	Tabungan	Rutin	262.321,00
167	SD Negeri 1 SUNGAI KUNING	4050201004227	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SUNGAI KUNING	Tabungan	Rutin	90.817,00
168	SD Negeri 1 SUNGAI MELAWEN	4040202004878	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 SUNGAI MELAWEN	Tabungan	Rutin	64.741,00
169	SD Negeri 1 SUNGAI PAKIT	4050102000172	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Sungai Pakit	Giro	DAK	-
170	SD Negeri 1 SUNGAI PAKIT	4050201004217	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SUNGAI PAKIT	Tabungan	Rutin	89.680,00
171	SD Negeri 1 SUNGAI PULAU	4050102000169	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Sungai Pulau	Giro	DAK	-
172	SD Negeri 1 SUNGAI PULAU	4050201004203	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SUNGAI PULAU	Tabungan	Rutin	100.491,00
173	SD Negeri 1 SUNGAI RANGIT JAYA	4000102001000	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Sungai Rangit Jaya	Giro	DAK	-
174	SD Negeri 1 SUNGAI RANGIT JAYA	4000202008847	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 SUNGAI RANGIT JAYA	Tabungan	Rutin	72.303,00
175	SD Negeri 1 TANJUNG PUTRI	4000202014842	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD NEGERI 1 TANJUNG PUTRI	Tabungan	Rutin	93.709,00
176	SD Negeri 1 TELUK PULAI	4040202004866	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 1 TELUK PULAI	Tabungan	Rutin	1.376.217,00
177	SD Negeri 1 TEMPAYUNG	4000202007617	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 TEMPAYUNG	Tabungan	Rutin	1.352.318,00
178	SD Negeri 1 UMPANG	4000102001136	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 1 Umpang	Giro	DAK	-
179	SD Negeri 1 UMPANG	4000202007679	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 UMPANG	Tabungan	Rutin	132.188,00
180	SD Negeri 2 BABUAL BABOTI	4000202007426	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 BABUAL BABOTI	Tabungan	Rutin	1.352.589,00
181	SD Negeri 2 BUMI HARJO	4040102000162	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 2 Bumi Harjo	Giro	DAK	-
182	SD Negeri 2 CANDI	4040202004859	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 CANDI KUMAI	Tabungan	Rutin	104.828,00
183	SD Negeri 2 KARANG MULYA	4050201004201	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 KARANG MULYA	Tabungan	Rutin	164.239,00
184	SD Negeri 2 KOTAWARINGIN HILIR	4060201002190	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 KOTAWARINGIN HILIR	Tabungan	Rutin	95.562,00
185	SD Negeri 2 KUBU	4040202004856	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 KUBU KEC.KUMAI	Tabungan	Rutin	94.499,00
186	SD Negeri 2 KUMAI HILIR	4040202004844	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 KUMAI HILIR	Tabungan	Rutin	66.434,00
187	SD Negeri 2 KUMAI HULU	4040202004858	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 KUMAI HULU	Tabungan	Rutin	66.672,00
188	SD Negeri 2 KUMPAI BATU ATAS	4000202011819	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 KUMPAI BATU ATAS	Tabungan	Rutin	65.417,00

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
189	SD Negeri 2 LADA MANDALA JAYA	4000202007867	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PAN PENYELENGGARA UASBN SDN 2 LADA MANDALA	Tabungan	Rutin	102.691,00
190	SD Negeri 2 MEDANG SARI	4000202012490	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 MEDANG SARI	Tabungan	Rutin	384.613,00
191	SD Negeri 2 MENDAWAI	4000202007813	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 MENDAWAI	Tabungan	Rutin	138.356,00
192	SD Negeri 2 PANDU SENJAYA	4040202004813	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 PANDU SENJAYA	Tabungan	Rutin	101.519,00
193	SD Negeri 2 PANGKALAN BANTENG	4050202001432	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 P.BANTENG	Tabungan	Rutin	107.879,00
194	SD Negeri 2 PANGKALAN DEWA	4000202007815	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 PANGKALAN DEWA	Tabungan	Rutin	69.264,00
195	SD Negeri 2 PANGKALAN SATU	4040202004854	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 PANGKALAN SATU	Tabungan	Rutin	80.213,00
196	SD Negeri 2 PANGKALAN TIGA	4050202001521	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 PANGKALAN TIGA	Tabungan	Rutin	56.352,00
197	SD Negeri 2 PANGKUT	4050202006613	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 PANGKUT	Tabungan	Rutin	100.149,00
198	SD Negeri 2 PASIR PANJANG	4000202007817	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 PASIR	Tabungan	Rutin	1.595.172,00
199	SD Negeri 2 PURBASARI	4000102001092	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 2 Purbasari	Giro	DAK	-
200	SD Negeri 2 PURBASARI	4000202007936	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 PURBASARI	Tabungan	Rutin	180.578,00
201	SD Negeri 2 RAJA	4000202014153	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 RAJA	Tabungan	Rutin	92.449,00
202	SD Negeri 2 RIAM DURIAN	4000202007857	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 RIAM DURIAN	Tabungan	Rutin	141.807,00
203	SD Negeri 2 SUNGAI KAPITAN	4040202004841	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 SUNGAI KAPITAN KUMAI	Tabungan	Rutin	154.698,00
204	SD Negeri 2 SUNGAI TENDANG	4040202004845	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 SUNGAI TENDANG KUMAI	Tabungan	Rutin	172.811,00
205	SD Negeri 2 SIDOREJO	4000202007832	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 SIDOREJO	Tabungan	Rutin	115.419,00
206	SD Negeri 2 SUMBER AGUNG	4000202007841	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 SUMBER AGUNG	Tabungan	Rutin	50.556,00
207	SD Negeri 2 SUMBER MUKTI	4000202008348	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 2 SUMBER MUKTI	Tabungan	Rutin	56.589,00
208	SD Negeri 2 SUNGAI HIJAU	4050201004208	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 SUNGAI HIJAU	Tabungan	Rutin	145.112,00
209	SD Negeri 2 SUNGAI MELAWEN	4000202007913	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 SUNGAI MELAWEN	Tabungan	Rutin	143.551,00
210	SD Negeri 2 SUNGAI RANGIT JAYA	4000202007919	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 2 SEI RANGIT JAYA	Tabungan	Rutin	78.569,00
211	SD Negeri 3 CANDI	4040202004851	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 3 CANDI KUMA	Tabungan	Rutin	86.204,00
212	SD Negeri 3 KOTAWARINGIN HILIR	4000202010829	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 3 KOTAWARINGIN HILIR	Tabungan	Rutin	1.807.686,00
213	SD Negeri 3 MADUREJO	4000202007823	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 3 MADUREJO	Tabungan	Rutin	95.854,00
214	SD Negeri 3 MENDAWAI	4000102000952	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 3 Mendawai	Giro	DAK	185.460.000,00
215	SD Negeri 3 MENDAWAI	4000202007985	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 3 MENDAWAI	Tabungan	Rutin	116.523,00
216	SD Negeri 3 PANDU SENJAYA	4000202007923	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 3 PANDU SANJAYA	Tabungan	Rutin	129.513,00
217	SD Negeri 3 PASIR PANJANG	4000202007758	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA RUTIN SDN 3 PASIR PANJANG	Tabungan	Rutin	139.435,00
218	SD Negeri 3 SIDOREJO	4000102000996	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 3 Sidorejo	Giro	DAK	-
219	SD Negeri 3 SIDOREJO	4000202007780	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 3 SIDOREJO	Tabungan	Rutin	166.868,00
220	SD Negeri 4 BARU	4000102001162	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 4 Baru	Giro	DAK	-
221	SD Negeri 4 BARU	4000202012703	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 4 BARU	Tabungan	Rutin	64.637,00

No.	Nama Sekolah	No. Rekening	Nama Bank	Kepemilikan Rekening Atas Nama	Jenis	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2020
222	SD Negeri 4 KOTAWARINGIN HILIR	4060201001505	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 4 KOTAWARINGIN HILIR	Tabungan	Rutin	139.828,00
223	SD Negeri 4 KUMAI HILIR	4040202005104	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 4 KUMAI HILIR	Tabungan	Rutin	104.024,00
224	SD Negeri 4 MADUREJO	4000201023610	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 4 MADUREJO	Tabungan	Rutin	140.165,00
225	SD Negeri 4 MENDAWAI	4000202007791	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 4 MENDAWAI	Tabungan	Rutin	107.774,00
226	SD Negeri 4 PASIR PANJANG	4000202014063	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 4 PASIR	Tabungan	Rutin	145.831,00
227	SD Negeri 4 RAJA	4000201023562	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 4 RAJA	Tabungan	Rutin	145.286,00
228	SD Negeri 4 SIDOREJO	4000102001125	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 4 Sidorejo	Giro	DAK	-
229	SD Negeri 5 MADUREJO	4000202007775	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 5 MADUREJO	Tabungan	Rutin	74.385,00
230	SD Negeri 5 RAJA	4000102000985	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 5 Raja	Giro	DAK	-
231	SD Negeri 5 RAJA	4000201022658	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 5 RAJA	Tabungan	Rutin	194.154,77
232	SD NEGERI 5 SIDOREJO	4000102001232	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SD NEGERI 5 SIDOREJO	Giro	BOS	-
233	SD Negeri 5 SIDOREJO	4000202002905	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 5 SIDOREJO	Tabungan	Rutin	82.580,00
234	SD Negeri 6 BARU	4000201020610	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 6 BARU	Tabungan	Rutin	157.526,00
235	SD Negeri 6 MADUREJO	4000202007892	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 6 MADUREJO	Tabungan	Rutin	52.041,00
236	SD Negeri 6 MENDAWAI	4000202012401	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 6 MENDAWA	Tabungan	Rutin	1.736.576,00
237	SD Negeri 6 RAJA	4000201020843	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN.RAJA-6/PBN	Tabungan	Rutin	147.958,00
238	SD Negeri 7 BARU	4000202014162	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 7 BARU	Tabungan	Rutin	177.737,00
239	SD Negeri 7 MADUREJO	4000202007784	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 7 MADUREJO	Tabungan	Rutin	149.538,00
240	SD Negeri 7 MENDAWAI	4000201022059	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 7 MENDAWAI	Tabungan	Rutin	1.697.831,00
241	SD Negeri 7 RAJA	4000102001140	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Dana DAK SDN 7 Raja	Giro	DAK	-
242	SD Negeri 7 RAJA	4000202007975	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UASBN SDN 7 RAJA	Tabungan	Rutin	1.708.402,00
243	SD Negeri 8 MADUREJO	4000201021142	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 8 MADUREJO	Tabungan	Rutin	50.625,00
244	SD Negeri 8 MENDAWAI	4000202007786	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA PENYELENGGARA UANSB SDN 8 MENDAWAI	Tabungan	Rutin	140.230,00
245	SD Negeri 1 BARU	4000202011783	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 1 BARU	Tabungan	Rutin	138.558,00
246	SD Negeri 2 MADUREJO	4000202013439	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 2 MADUREJO	Tabungan	Rutin	242.531,00
247	SD Negeri 3 RAJA	4000202013658	PT. Bank Pembangunan Kalteng	SDN 3 RAJA	Tabungan	Rutin	192.551,00
248	SD Negeri 3 Kumai Hilir	4040202004840	PT. Bank Pembangunan Kalteng	PANITIA UASBN SDN 3 KUMAI HILIR	Tabungan	Rutin	-
249	TKN PEMBINA PANGKALAN LADA	4000102001114	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA DAK TKN PEMBINA PANGKALAN LADA	GIRO	DAK	0.00
250	TKN PEMBINA PANGKALAN BUN	4000102001557	PT. Bank Pembangunan Kalteng	TK NEGERI PEMBINA PANGKALAN BUN	GIRO	DAK	6.369,00
251	TKN PEMBINA PANGKALAN BANTENG	4050102000177	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA DAK TK NEGERI PEMBINA PANGKALAN BANTENG	GIRO	DAK	0.00
252	TKN PEMBINA KOTAWARINGIN LAMA	4060102000002	PT. Bank Pembangunan Kalteng	DANA DAK TK NEGERI PEMBINA KOTAWARINGIN LAMA	GIRO	DAK	19.790.400,00
Jumlah							263.763.273,57

**DAFTAR ASET BERSENGKETA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31.095	932.900.000,00	SHM	Ahli waris H. Panudi	Kantor Sekretariat DPRD	Jl. H M Rafii Kel. Madurejo Kec. Arsel	Tercatat di Sekretariat DPRD, luas tanah 31.095 m2 tahun 1985, nilai perolehan Rp932.900.000,00, asal usul Pemda melakukan dengan memberikan ganti rugi ke pemilik tanah asal, bukti-bukti pembayaran lengkap. Ada 1 bukti kepemilikan asli berupa SHM dari pemilik atas tanah yang masih dikuasai oleh ahli waris an. Panudi. Ahli waris telah menemukan sertifikat tanah dan menggugat tanah tersebut kepada Pemda, namun Pemda mempunyai dan bisa menunjukkan bukti pembayaran atas tanah tersebut kepada ahli waris dan ahli waris telah mencabut gugatannya, sudah dilakukan rapat bantuan hukum oleh Pemda tanggal 11 Oktober 2019 dan dalam rapat Pemda menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibeli dengan bukti-bukti yang sah, akan tetapi sampai saat ini bukti kepemilikan asli (SHM) atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada Pemda oleh salah satu ahli waris.
2	Tanah Bangunan Pasar	39.777	62.500.000,00	SHP. 1	Ahli waris H. Taib an. Rudy	Pasar Sayangan Pandu Senjaya	Jl. A. Yani Km 40 Kec. Pangkalan Lada	Tanah tersebut dengan luas 39.777 m2 dan bukti kepemilikan SHP No.1 Tahun 2004. Sampai saat ini dokumen asli kepemilikan berupa SHP dikuasai oleh masyarakat an. Rudy Hartono yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tuanya yang bernama M. Thayib. Telah dilakukan upaya penyelesaian pada tahun 2014 oleh Bupati Kotawaringin Barat dengan dibuatnya Surat Kuasa Khusus kepada 3 Orang Pegawai untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait permasalahan penguasaan tanpa hak atas sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, SHP asli masih dipegang masyarakat tersebut. Saat ini di lokasi pasar tersebut oleh ahli waris M. Thayib telah dipasang plang nama tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan ke DAD (Dewan Adat Dayak). Berdasarkan surat Bupati Kotawaringin Barat No. 130/17/Pem Tanggal 3 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pandu Sanjaya yang berisi penegasan bahwa Pasar Sayangan merupakan aset Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat sehingga pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap tanah tersebut menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat, bagi pihak yang mengklaim dipersilahkan menempuh jalur hukum.
3	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2.400	2.400.000.000,00	SKT	Masaidin	Puskesmas Arut Selatan	Jl. P. Antasari Kel. Raja Kec. Arsel	Untuk tanah Pemerintah Daerah di lokasi sekitar Puskesmas Arut Selatan, Pemerintah Daerah dalam proses peradilan mengalami kekalahan dengan Putusan Peninjauan Kembali kepada Kuasa Termohon dengan Surat Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.P.Bun, Jo No. 07/Pdt/2011/PT.PR, Jo No. 2679 K/Pdt/2011, Jo. Nomor 594/PK/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2016. Saat ini tanah tersebut rencana akan diklaim oleh ahli waris Bpk. Massaidin dan tanah akan diganti di lokasi lain, sedangkan pembangunan Puskesmas dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Telah dilakukan Rapat koordinasi bantuan hukum tanggal 30 September 2019 dengan kesepakatan: berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 dan dibuat sebagai dasar hak pembuatan SPPFBT oleh Pengguna Barang dan Lurah bersedia menandatangani SPPFBT tersebut, namun sampai saat ini SPPFBT belum ditandatangani oleh Pengguna Barang.

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	53.888	666.666.667,00	SHP. 155	Julimson	SMPN 11 Pangkalan Bun, TK Pembina, Kantor BPBD	Jl. Cilik Riwut II Kel. Madurejo Kec. Arsel	Tanah tersebut sebagian telah kalah di Pengadilan Mahkamah Agung dengan putusan No. 2899K/Pdt/2014 dan telah di eksekusi oleh pihak pemenang Tanggal 13 Juni 2017 sesuai BA Eksekusi Real No: 1/B.Eks/Pdt.g/2013/PN Pbung dengan ukuran seluas 3.000 m2 (30 m x 100 m), namun ditemukan bukti baru (Novum) berupa dokumen asli berupa SHM dan SKT yang telah diserahkan ke Bagian Hukum Setda Kab. Ktw. Barat bersama Surat No. 011/128/IV.I/BPKAD/2017 Tanggal 29 Mei 2017 Perihal. Penyampaian Novum/Bukti Baru Peninjauan Kembali, direncanakan menempuh jalur hukum Peninjauan Kembali (PK), namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Bagian Hukum Setda Kab. Ktw. Barat. Saat ini adanya klaim tanah dari masyarakat an. Ny. Marianen Sirait bulan Februari 2017 yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 50/DMR/1979 Tanggal 10 Juli 1979, dimana klaim tersebut juga pernah disampaikan tanggal 2 Pebruari 2013 dan telah ditindaklanjuti oleh Pemda Kab. Kobar dengan mngirimkan surat No. 590/41/Pem-IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal tanggapan terhadap permasalahan tanah di jalan Tembalu Kel. Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun dan pokok surat tersebut agar yang bersangkutan menyelesaikan melalui jalur hukum/pengadilan. Adapun lokasi tanah yang di klaim di sebelah SMPN 11 Pangkalan Bun. Sampai saat ini terhadap permasalahan tersebut belum ada tindak lanjut penyelesaiannya dimana Novum baru yang telah disampaikan belum ditindaklanjuti dengan menyampaikan PK ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sedangkan rencana pengembalian batas tanah sedang berproses di BPN Pangkalan Bun. Telah dilakukan Pengembalian batas tanah oleh Tim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 6 September 2018 tanpa bidang tanah yang telah dimenangkan oleh masyarakat.
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.115	1.423.000.000,00	SHP. 24	Marnali bin Usir	Kantor Kelurahan Madurejo	Jl. Iskandar No. 65 Kelurahan Madurejo Kec. Arsel	Saat ini tanah tersebut diklaim secara perdata oleh Keluarga Roheman mantan Lurah Madurejo dan berdasarkan informasi dari Bagian Hukum sidang pengadilan tersebut telah dimenangkan oleh penggugat, namun putusan belum diterima. Hal ini merupakan kerugian bagi Pemda Kab. Kobar yang telah gagal membuktikan kepemilikan atas tanah yang telah digunakan bertahun-tahun, hasil kasasi dimenangkan Pemda. Saat ini penggugat menempuh jalur PK (peninjauan kembali)
6	Tanah Pariwisata	2.500	1.092.250,00	Akta Jual Beli	H. Saleh	Lokasi Pariwisata Kubu	Desa Kubu Kec. Kumai	Perolehan berasal dari hibah Pemerintah Prov Kalimantan Tengah, saat ini tanah dikuasai oleh H. Saleh.
7	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	243.080	425.390.000,00	Gambar Ukur	Wayan	Makam KBA	Desa Kumpai Batu Atas Kec. Arsel	Tanah direncanakan untuk lokasi makam Kumpai Batu Atas masih berupa lahan kosong. Menurut informasi dari masyarakat, lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan kebun oleh masyarakat oleh karena itu akan dilakukan pengecekan lapangan.
8	Tanah kosong yang tidak diusahakan	462	60.000.000,00	SHP No. 27	Purnawan Andarta	Tanah Kosong / Kafe depan Gereja Imanuel	Jl. Hasanudin Kel. Sidorejo Kec. Arsel	Bukti SHP Nomor 27 tahun 1985 luas 462 M ² telah dilakukan pengembalian batas tanah bersama tim dari Pemda dan BPN, hasil pengembalian batas terdapat sebagian bangunan ruko masuk ke tanah Pemda dan telah dilakukan rapat koordinasi.
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	8.800	88.000.000,00	-	Gusti Umar Ali	SDN 3 Pasir Panjang	Jl. Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kec. Arsel	Tanah merupakan fasilitas sosial BTN Griya Dian Ekawati Permai (perumahan pinang merah), dicatat pada tahun 2005 seluas 8.800 m2, dan berdiri bangunan SDN 3 Pasir Panjang. Saat ini tanah tersebut diklaim oleh pengembang perumahan pinang merah dan dijual serta bangunan rumah dinas di atasnya telah dibongkar.
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.918	23.323.368,00	SHP. 5	Imbar, Parij, Agus dkk	BPP Karangmulya	Jl. A. Yani Km. 63 Ds. Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng	Tanah tercatat di Dinas TPHP, Bukti kepemilikan berupa SHP Nomor 05 tahun 2015 yang digunakan oleh BPP Karang Mulya dengan ukuran 28x35m, di sebelahnya ada bangunan pasar, barak masyarakat dan lain-lain.

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	23.893	312.045.000,00	Sertifikat asal/SKT	Iskandar/saleh	Tanah rencana perumahan Anggota DPRD	Jl. Raya Pasir Panjang Desa Batu Belaman Kumai	Sebelum proses pembelian tanah rencana rujab DPR telah dilakukan pengukuran lokasi lahan oleh pihak terkait saat itu, dibuktikan dengan gambar kasar atas lokasi tanah yang dibeli. Kemudian ada program PTSL, masyarakat (pihak pemilik awal tanah rencana rujab DPR) mensertifikatkan tanah yang tidak dibebaskan Pemda, namun penunjukkan lokasinya berada di dalam area tanah yang telah dijual kepada Pemda dengan ukuran sama dengan tanah miliknya. Alas hak Pemda SKT tahun 1994 sedangkan alas hak masyarakat untuk PTSL adalah SKT tahun 2017. Kesimpulan sementara masyarakat salah menunjukkan tanah dalam proses pensertifikan (PTSL) atas tanah miliknya. Atas kasus tersebut telah dilakukan rapat bantuan hukum di tahun 2019, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut Pemda telah menyampaikan surat ke BPN Kab. Kotawaringin Barat No. 032/272/IV.II/ BPKAD/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal mohon penyelesaian tanah Pemkab yang disertifikatkan masyarakat.
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	839	167.800.000,00	SHP No. 31	Kerabat Kerajaan Kutaringin	Ex. Kantor PDAM	Jl. Diponegoro Kel. Raja Kec. Arsel	Saat ini tanah tersebut diklaim oleh ahli waris Bpk. J.C. Rangkap mantan Bupati Kotawaringin Barat dengan dokumen dan di lokasi tanah tersebut saat ini telah berdiri bangunan permanen dan semi permanen dan berdasarkan informasi diduduki oleh masyarakat, untuk masalah tersebut belum dilakukan inventarisasi yang memadai.
13	Tanah Kosong Lainnya	120.202	734.320.400,00	SHM dan SKT	Ahli Waris Rukui, Lunding dkk	Peti Kemas	Jl. Raya Pasir Panjang Desa Pasir Panjang Arsel	Tanah ini terdiri dari 7 dokumen tanah (1 SKT dan 6 SHM). Terdapat 2 dokumen yang masih diakui oleh masyarakat
14	Tanah Bangunan Olah Raga	30.000	6.000.000,00	-	Kasiyanto dan A. Sugeng	Lapangan Desa Marga Mulya	Desa Marga Mulya Pangkalan Banteng	Bukti kepemilikan SKT No. 593.21/83/PB/IX/2005 tanggal 22 September 2005 telah digugat oleh masyarakat yang memiliki SHM. Kemudian Kecamatan memberikan ganti rugi kembali atas klaim tersebut untuk 2 SHM dengan luas 4Ha sebesar Rp40.000.000,00. Penelusuran terbaru 1 SHM digadaikan ke Bank an. Kasiyanto, sedangkan an. Sugeng masih dalam penelusuran. Hasil penelusuran bukti kepemilikan masyarakat memiliki SHM PTSL tahun 2017.
15	Tanah Kosong Lainnya	112.700	56.400.000,00	SHP. 2	Sukirman	SMKN 1 Pangkalan Lada dan tanah kas desa	Dusun Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada	Tanah sebagian ± 5.05 Ha digunakan oleh SMKN 1 Pangkalan Lada, Sisanya ± 6 Ha masih ditelusuri batas-batasnya.
16	Tanah Kosong Lainnya	49.728	12.500.000,00	SHP.46	Harto dkk	Tanah eks. kalimati baru	Desa Pasir Panjang Kec. Arsel	Tanah merupakan lokasi eks. Kalimati baru (lokalisasi). Setelah penutupan lokalisasi, area masih terdapat bangunan/rumah yang dikuasai warga setempat
17	Tanah Kosong Lainnya	2.439	292.700.000	SHP.39	H. Hasan, dkk	Mebel Firdaus	Jl. Kawitan Kel. Sidorejo Kec. Arsel	Telah dilakukan cek lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018, dengan hasil pengecekan sebagai berikut:
								Tanah tersebut tercatat pada KIB Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat. Pada lokasi tersebut terdapat rumah semi permanen dan rumah permanen milik 4 (empat) orang warga/masyarakat dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN Kab. Ktw. Barat dan 3 (tiga) buah SKT yang diterbitkan oleh Kelurahan Sidorejo. Terhadap masyarakat yang menguasai tanah tersebut, dulu pernah dilakukan rapat musyawarah namun tidak mendapatkan kesepakatan. Masyarakat yang menguasai tanah tersebut menginginkan Pemerintah Daerah melepaskan hak pakai tanah tersebut kepada mereka. Sesuai surat dari Supaat Hdi Sugiarto (mantan Lurah Sidorejo) Nomor: Lepas tanggal 18 April 2007 perihal Mohon Pelepasan Hak Pakai Sertifikat No.39 dan surat dari H. Hasan Afandi Nomor: Lepas tanggal 22 April 2008 perihal Mohon Fasilitasi atas Penyelesaian Pelepasan Hak Pakai Nomor 39 Milik Pemda kepada kami.

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
18	Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya	540.325	589.175.070,00	Sertifikat Asal / SKT	H. Jamaluddin / PT. Dona Doni	Hutan Kota	Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada	Tanah tersebut dengan luas 540.325 m2 dan dokumen kepemilikan berupa: - Sertifikat Hak Pakai sebanyak 1 buah dengan luas 36.625 m2 - SKT sebanyak 11 buah - SHM sebanyak 56 buah
								Tanah untuk Lokasi Hutan Kota di Desa Purbasari dibebaskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 540.325 m2, rinciannya sebagai berikut: - Tahun 2002 untuk Kebun PKK seluas 36.625 m2 - Tahun 2005 seluas 14.200 m2 - Tahun 2006 seluas 142.500 m2 - Tahun 2007 seluas 337.100 m2 - Tahun 2008 seluas 9.900 m2
								Tanah untuk Hutan Kota sampai saat ini perlu dilakukan pengamanan fisik maupun peningkatan bentuk dokumen kepemilikan, karena lokasi tersebut dikuasai oleh masyarakat an. H. Jamaludin dan telah ditanami sawit sampai saat ini. Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2009 s.d 2010 namun belum menemukan jalan keluar, karena disebabkan H. Jamaludin tidak pernah hadir ketika Pemerintah Daerah mengundang untuk hadir dalam rapat sehingga permasalahan tersebut tidak selesai dan berlarut-larut. Diperlukan tindakan lanjut dari Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tanah tersebut.
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.739	1.460.900.000,00	SHP. 129	Jumadin dkk	Kantor KB	Jl. Iskandar No.5 Madurejo Arut Selatan	Hasil pengembalian batas tanah tahun 2017 ditemukan masalah yang serupa dengan tanah di Bundaran Pancasila yaitu: Terdapat 4 (empat) buah rumah permanen dan semi permanen milik masyarakat warga yang dibangun di atas tanah Pemerintah Daerah. Untuk bangunan semi permanen milik masyarakat tidak memiliki dokumen, tetapi bangunan permanen memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SHM. Pada Kegiatan Pengembalian Batas Tanah tahun 2017 di Lokasi Belakang DP3A&PB, dilakukan pemasangan patok tanah sebanyak 2 (dua) buah dan plang nama tanah sebanyak 1 (satu) buah. Sampai saat ini terhadap permasalahan tersebut belum ada tindak lanjut penyelesaiannya dimana masyarakat masih menduduki tanah pemda yang telah dipasang patok dan plang nama tersebut.
20	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	97.092	7.961.544.000,00	SK. Gubernur DA.07/D.1.5/IV-1974	Ahli waris Brata Ruswanda	Tanah Pertanian	Jl. Padat Karya Kel. Baru	Tanah pernah berperkara di ranah hukum antara Hasan dan H. Saleh sampai ke tingkat kasasi dan dimenangkan oleh Hasan. Asal usul tanah Pemda berasal melalui pembelian dari Hasan. Telah dilakukan sosialisasi terhadap putusan MA di ruang kerja Kepala Desa Kubu. Sampai saat ini Dokumen SK Gubernur yang asli belum ditemukan, hal ini disebabkan dokumen tersebut hilang karena adanya pencurian pada tanggal 17 Februari 1996, dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor POL: STPL/73/II/1996/PAMAPTA dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat. Telah dilakukan dua kali pemasangan plang pada tanggal 6 Juli 2018 namun beberapa jam kemudian dihilangkan oleh pihak lain (diduga dilakukan oleh Ahli Waris) dan pada tanggal 24 September 2018 untuk pengamanan agar tidak dicabut/hilang dilakukan penjagaan dari BPKAD, Satpol PP, TNI AD selama satu minggu yang berujung dilaporkannya Bupati Kotawaringin Barat ke Bareskrim dengan tuduhan memasuki pekarangan tanpa ijin dan memalsukan dokumen untuk kasus ini para pegawai juga telah Bareskrim ke Jakarta, dan Bareskrim sudah 4x ke Pangkalan Bun. Juga telah dilakukan pemasangan patok didampingi Pengacara. Pada awal Januari 2020 Pemda baru mengetahui adanya instalasi PDAM yang terpasang diatas tanah tersebut an. Kuncoro, hasil koordinasi dengan pihak PDAM dan penjelasan bahwa tanah tersebut milik Pemda akhirnya instalasi tersebut dicabut oleh PDAM. Setelah instalasi PDAM dicabut pada tanggal 17 Maret, ahli waris kembali memasang plang baru di atas tanah tersebut.

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
21	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	50.000	160.000.000,00	SHP No. 133	Gitonoyo, dkk	Kantor Bappeda, SDN 8 Madurejo	Jl. H. M. Rafi'i Kel Madurejo Kec. Arsel	Lokasi di belakang Bappeda terdapat rumah permanen dan semi permanen milik masyarakat/warga yang dibangun di atas tanah Pemerintah Daerah. Dari informasi dilapangan, sebagian masyarakat yang menduduki tanah Pemda memiliki surat kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPN Kotawaringin Barat didapati sertifikat tersebut salah penguasaan oleh masyarakat dimana seharusnya tanah masyarakat berlokasi di belakang tanah Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan kekeliruan pemilik asal tanah menunjukkan batas tanah. Untuk lokasi di samping Pangkalan Bun Park, bangunan yang semi permanen milik masyarakat, kebanyakan tidak memiliki dokumen dan menyadari bahwa tanah tersebut milik Pemda, tetapi sebagian ada yang memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). Pada tahun 2017 dilakukan Pengembalian Batas Tanah di Lokasi Bundaran Pancasila dan sekitarnya telah dilakukan pemasangan patok tanah sebanyak 18 (delapan belas) buah dan plang nama tanah sebanyak 7 (tujuh) buah, hal ini dilakukan untuk mengamankan aset tanah dan mensosialisasikan bahwa tanah tersebut milik Pemda Kab. Ktw. Barat. Tanah disamping Universitas Antakusuma yang dahulu pernah digugat secara perdata oleh masyarakat an. Suhardjono pensiunan PNS AURI dan melalui beberapa kali sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, kasus tersebut dimenangkan oleh Pemda Kab. Ktw. Barat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 01/Pdt.G/PN P. Bun tanggal 9 Juni 2014. Pada tahun 2019 diadakan beberapa kali pertemuan/rapat dengan masyarakat dan disepakati bulan pada Januari 2020, namun pada saat akan dikosongkan dan dibersihkan menggunakan alat berat ditemukan dokumen baru yaitu pengembalian batas Universitas Antakusuma dan lokasi bundaran Pancasila pada tahun 2004, terjadi perbedaan batas tanah milik Pemda dengan masyarakat di Jl.HM.Rafi'i dengan pengembalian batas tahun 2017. Perbedaan tersebut adalah tahun 2004 RM. Kita Jua masuk tanah Pemda sedangkan pengembalian batas tahun 2017 tidak masuk. Saat ini sedang ditelusuri dokumennya dan belum ada tindak lanjut penyelesaiannya.
22	Tanah Kosong Lainnya	20.000	2.060.000.000,00	SHP. 43	Moko, Syahrani, Gitonoyo dkk	Pembibitan Karet	Jl. Lijo Kel. Madurejo Kec. Arsel	Telah ditemukan bukti kepemilikan tanah yaitu dokumen asli berupa SHP dan tanah tersebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, tanah tersebut berlokasi di belakang Taman Makam Pahlawan Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun. Tanah tersebut adalah Balai Pembibitan pada Dinas Perkebunan, hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dari Kepala Dinas Perkebunan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat No. 018/BD.III/DPKT-KB/1974 tanggal 7 Januari 1975 kepada Lidjo Markidi. Tanah tersebut telah digugat oleh ahli waris Lidjo Markidi dengan Surat No: Lepas, Tanggal 10 Oktober 2001, dan telah diupayakan penyelesaiannya dengan melibatkan BPN Kotawaringin Barat, namun permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan sampai saat ini. Berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat kepada Kepala Dinas Perkebunan No. 509/85/Pem tanggal 1 Maret 2003 Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat di Jalan Palagan Sambu Pangkalan Bun yang intinya bahwa untuk penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum (pengadilan). Telah dilakukan konsultasi ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Februari 2018 terkait ditemukannya SHP Asli tanah tersebut, dan hasil konsultasi tersebut disarankan oleh Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalteng untuk mencatat aset tersebut karena telah diserahkan kewenangannya dari Provinsi ke Kabupaten. Saat ini diperlukan dokumen P3D (penyerahan aset dari Provinsi kepada Kabupaten) berupa Berita Acara No. 127/1303/PEM tanggal 2 September 1996 sebagai dasar hukum pencatatan aset sebagai langkah antisipasi gugatan dari berbagai pihak.
		167.092	10.181.544.000,00					

